

BUKU I



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 10.A/LHP/XIX.MAM/05/2023
Tanggal : 19 Mei 2023

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	v
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	

Salinan Seperti Aslinya
Hanya Untuk Pemohon Informasi
PIADC181

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mamuju, 19 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA 
Register Negara Akuntan No. RNA-6054

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi barat yang memiliki 36 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 29 hari mulai tanggal 20 Maret 2023 s.d. 17 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 137/ST/VIII/03/2021 dan 87/ST/XIX.MAM/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi, dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

Salinan Seperti Ini
Hanya Untuk Pemohon
PIADC181



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN
ANGGARAN 2022

AUDITED

- > LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) ;
- > LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Laporan Perubahan SAL) ;
- > NERACA ;
- > LAPORAN OPERASIONAL (LO) ;
- > LAPORAN ARUS KAS (LAK) ;
- > LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) ;
- > CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR LAMPIRAN	6
<u>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</u>	7
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	11
3. NERACA	12
4. LAPORAN OPERASIONAL	14
5. LAPORAN ARUS KAS	16
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	18
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	19
7.1. PENDAHULUAN	19
7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	22
7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	30
7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	42
7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	74
7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	74
7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) ...	92
7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca	93
7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	138
7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	150
7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	153
7.6. KEWAJIBAN KONTIJENSI	154
7.7. PENUTUP	154

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat.....	22
Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat	23
Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat	23
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat	23
Tabel 5. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat	24
Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia	24
Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat.....	25
Tabel 8. Tingkat Inflasi di Sulawesi Barat	26
Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022	27
Tabel 10. Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ...	33
Tabel 11. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertama sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022	35
Tabel 12. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua sesuai Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022	35
Tabel 13. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022	36
Tabel 14. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keempat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022	36
Tabel 15. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelima sesuai Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022	37
Tabel 16. Ringkasan Perubahan APBD Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022	38
Tabel 17. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022	38
Tabel 18. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022	39
Tabel 19. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022	41
Tabel 20. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021	74
Tabel 21. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021	75
Tabel 22. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021	75
<i>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A 2022</i>	2

Tabel 23.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021	76
Tabel 24.	Daftar Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021	77
Tabel 25.	Daftar Rincian Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021	78
Tabel 26.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021	78
Tabel 27.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021	79
Tabel 28.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021	79
Tabel 29.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan 2021	81
Tabel 30.	Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah TA 2022 dan 2021	81
Tabel 31.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 dan 2021	82
Tabel 32.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021	82
Tabel 33.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021	83
Tabel 34.	Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021	83
Tabel 35.	Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2022	85
Tabel 36.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021	85
Tabel 37.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021	86
Tabel 38.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer ke Kabupaten TA 2022 dan 2021	89
Tabel 39.	Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2022 dan 2021	89
Tabel 40.	Daftar Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 dan 2021	90
Tabel 41.	Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022	90
Tabel 42.	Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022	91
Tabel 43.	Rincian SiLPA TA 2022 dan 2021	91
Tabel 44.	Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	93
Tabel 45.	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021	93
Tabel 46.	Rincian Kas di Kasda per 31 Desember 2022 dan 2021	94
Tabel 47.	Rincian Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 2021	94
Tabel 48.	Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021	95
Tabel 49.	Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021	96
Tabel 50.	Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021	96
	<i>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	
	<i>Provinsi Sulawesi Barat T.A 2022</i>	3

Tabel 51.	Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 2021	97
Tabel 52.	Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021	97
Tabel 53.	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021	98
Tabel 54.	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 2021	99
Tabel 55.	Mutasi Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2022	99
Tabel 56.	Rincian Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	100
Tabel 57.	Rincian Nomor Sertifikat Saham Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Sampai Dengan 31 Desember 2022	101
Tabel 58.	Rincian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	103
Tabel 59.	Rincian Tanah di Bawah Jalan yang Telah Dinilai	104
Tabel 60.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	121
Tabel 61.	Rincian Aset Lainnya	121
Tabel 62.	Tuntutan Perbendaharaan	122
Tabel 63.	Tuntutan Ganti Rugi	122
Tabel 64.	Daftar Aset Tak Berwujud	123
Tabel 65.	Rincian Saldo Aset Lain-Lain	125
Tabel 66.	Rincian UUDP	130
Tabel 67.	Rincian Kewajiban	131
Tabel 68.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	131
Tabel 69.	Daftar Rincian Perhitungan Utang Jangka Panjang dan	132
Tabel 70.	Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya	133
Tabel 71.	Daftar Utang Beban Per Tahun	134
Tabel 72.	Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap Per Tahun	134
Tabel 73.	Rincian Kewajiban Jangka Panjang	135
Tabel 74.	Rekap Utang Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	135
Tabel 75.	Tahapan Transfer Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah	136
Tabel 76.	Daftar Proyek PEN yang Dibiayai Utang Tahun 2020	136
Tabel 77.	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021	138
Tabel 78.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021	139
Tabel 79.	Daftar Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021	139
Tabel 80.	Daftar Rincian Realisasi Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021	139
Tabel 81.	Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021	140

Tabel 82.	Daftar Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021.....	141
Tabel 83.	Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021.....	141
Tabel 84.	Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2022	142
Tabel 85.	Daftar Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO Tahun 2022 dan 2021	143
Tabel 86.	Realisasi Beban dan Transfer Tahun 2022 dan 2021	144
Tabel 87.	Daftar Realisasi Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021	144
Tabel 88.	Daftar Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021	145
Tabel 89.	Daftar Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021	145
Tabel 90.	Daftar Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021	146
Tabel 91.	Datar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021	147
Tabel 92.	Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021	147
Tabel 93.	Daftar Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021	148
Tabel 94.	Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Tahun 2022 dan 2021	148
Tabel 95.	Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan 2021	149
Tabel 96.	Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2022 dan 2021	150
Tabel 97.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	151
Tabel 98.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021	151
Tabel 99.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan 2020	152
Tabel 100.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021	152
Tabel 101.	Rincian Saldo Kas di BUD Pada Neraca per 31 Desember 2022.....	152
Tabel 102.	Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022.....	155

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Alokasi Anggaran Pendidikan pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2022
- Lampiran 2. Alokasi Anggaran Kesehatan pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2022
- Lampiran 3. Alokasi Anggaran Infrastruktur pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2022
- Lampiran 4. Rincian SiLPA TA 2022 dan 2021
- Lampiran 5. Rincian Kas di Kas Daerah 2022
- Lampiran 6. Sisa Dana DAK Swakelola
- Lampiran 7. Rincian Dana PFK DAK Swakelola
- Lampiran 8. Sisa Saldo Dana BOS TA 2022
- Lampiran 9.a. Rekapitulasi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
- Lampiran 9.b. Rekapitulasi Jaminan Kesungguhan
- Lampiran 10. Rincian Piutang Jasa Medik RSUD BLUD TA 2022
- Lampiran 11. Rincian Persediaan TA 2022
- Lampiran 12. Daftar Aset Lainnya – Aset Lain-Lain yang Sudah Diserahkan Namun Masih Tercatat di KIB SKPD
- Lampiran 13. Daftar Utang PFK
- Lampiran 14. Daftar Utang Beban
- Lampiran 15. Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1.	PENDAPATAN - LRA	7.5.1.1.	1.896.276.561.452,00	1.894.618.795.334,39	99,91	2.024.671.075.786,41
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.5.1.1.1.	428.261.986.457,00	457.963.285.700,39	106,94	407.996.514.740,59
3.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1.	351.622.443.842,00	376.418.749.983,00	107,05	346.226.491.571,00
4.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2.	4.366.340.000,00	3.437.211.600,00	78,72	2.923.826.300,00
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3.	12.867.247.793,00	8.183.285.026,00	63,60	12.599.189.840,00
6.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4.	59.405.954.822,00	69.924.039.091,39	117,71	46.247.007.029,59
7.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2.	1.466.672.574.995,00	1.434.593.300.534,00	97,81	1.609.482.634.440,00
8.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	7.5.1.1.2.1.	1.423.809.441.995,00	1.391.730.167.534,00	97,75	1.593.040.970.440,00
9.	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.2.1.1	16.816.407.850,00	18.629.983.935,00	110,78	22.485.371.231,00
10.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam - LRA	7.5.1.1.2.1.2	485.053.315,00	304.608.914,00	62,80	570.039.360,00
11.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1.2.1.3	972.189.180.000,00	969.853.896.329,00	99,76	970.916.874.000,00
12.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.1.1.2.1.4	434.318.800.830,00	402.941.678.356,00	92,78	599.068.685.849,00
13.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	7.5.1.1.2.2.	42.863.133.000,00	42.863.133.000,00	100,00	16.441.664.000,00
14.	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	7.5.1.1.2.2.1	42.863.133.000,00	42.863.133.000,00	100,00	16.441.664.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A.2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
15.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.3.	1.342.000.000,00	2.062.209.100,00	153,67	7.191.926.605,82
16.	Pendapatan Hibah - LRA	7.5.1.1.3.1.	1.342.000.000,00	2.062.209.100,00	153,67	7.165.293.605,82
17.	Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.1.1.3.2.	0,00	0,00	0,00	26.633.000,00
18.	BELANJA	7.5.1.2.	1.981.553.974.505,00	1.864.813.748.898,29	94,11	1.815.906.697.868,19
19.	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1.	1.380.479.772.308,00	1.315.943.743.498,29	95,33	1.410.391.991.232,77
20.	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1.	628.157.169.791,00	606.681.872.761,29	96,58	563.347.419.213,13
21.	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2.	668.024.447.607,00	628.999.130.965,00	94,16	580.768.512.777,64
22.	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3.	24.894.625.310,00	24.890.208.737,00	99,98	13.414.036.710,00
23.	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4.	57.769.529.600,00	53.762.531.035,00	93,06	250.372.022.532,00
24.	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5.	1.634.000.000,00	1.610.000.000,00	98,53	2.490.000.000,00
25.	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2.	599.493.986.273,00	547.546.846.841,00	91,33	402.867.597.767,42
26.	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1.	20.359.144.250,00	17.898.298.672,00	87,91	17.216.728.495,00
27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2.	110.772.889.241,00	91.589.673.273,00	82,68	81.862.366.936,00
28.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3.	141.272.231.755,00	131.955.470.775,00	93,41	117.850.474.145,08
29.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4.	291.703.859.630,00	272.994.673.862,00	93,59	142.351.267.113,34
30.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5.	35.385.861.397,00	33.108.730.259,00	93,56	43.586.761.078,00
31.	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3.	1.580.215.924,00	1.323.158.559,00	83,73	2.647.108.868,00
32.	Belanja Tak Terduga		1.580.215.924,00	1.323.158.559,00	83,73	2.647.108.868,00
33.	TRANSFER	7.5.1.2.4.	225.030.353.993,00	224.904.468.328,00	99,94	170.432.402.304,00
34.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		190.619.089.493,00	190.619.089.493,00	100,00	161.832.402.304,00
35.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		190.619.089.493,00	190.619.089.493,00	100,00	161.832.402.304,00
36.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		34.411.264.500,00	34.285.378.835,00	99,63	8.600.000.000,00
37.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		20.444.575.600,00	20.318.689.935,00	99,38	0,00
38.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		13.966.688.900,00	13.966.688.900,00	100,00	8.600.000.000,00

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
39.	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.206.584.328.498,00	2.089.718.217.226,29	94,70	1.986.339.100.172,19
40.	SURPLUS / (DEFISIT)		(310.307.767.046,00)	(195.099.421.891,90)	62,87	38.331.975.614,22
41.	PEMBIAHYAAN	7.5.1.3.1.	310.307.767.046,00	312.023.875.190,74	100,55	131.967.673.987,52
42.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1.1.	365.969.587.736,00	365.969.587.736,74	100,00	178.192.697.843,52
43.	Penggunaan SILPA		170.299.649.601,00	170.299.649.601,74	100,00	103.192.697.843,52
44.	Pinjaman Dalam Negeri		195.669.938.135,00	195.669.938.135,00	100,00	75.000.000.000,00
45.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1.2.	53.661.820.690,00	53.945.712.546,00	96,92	46.225.023.856,00
46.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		53.661.820.690,00	53.945.712.546,00	96,92	46.225.023.856,00
47.	PEMBIAHYAAN NETTO		310.307.767.046,00	312.023.875.190,74	100,55	131.967.673.987,52
48.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.4.	0,00	116.924.453.298,84	0,00	170.299.649.601,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



ZUDAN ARIEF FAKRULLOH

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1.	170.299.649.601,74	103.192.697.843,52
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2.	170.299.649.601,74	103.192.697.843,52
3.	Sub Total		0,00	0,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3.	116.924.453.298,84	170.299.649.601,74
5.	Sub Total		116.924.453.298,84	170.299.649.601,74
6.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.4.	116.924.453.298,84	170.299.649.601,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

3. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1.	ASET			
2.	ASET LANCAR			
3.	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.	102.018.271.777,95	149.474.640.597,14
4.	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.2.	0,00	27.000,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.3.	961.851.446,89	62.708.240,60
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.5.3.1.1.4.	121.425.084,00	110.669.495,00
7.	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.5.	59.530.974,00	767.491.779,00
8.	Kas di Bendahara BLUD	7.5.3.1.1.6.	14.439.677.645,00	19.774.314.181,00
9.	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.7.	2.806.779.137,80	0,00
10.	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.8.	4.351.240.650,83	101.359.954,36
11.	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9.	1.873.372.869,96	2.080.662.653,00
12.	Persediaan	7.5.3.1.1.10.	56.824.888.264,83	38.686.305.693,00
13.	Jumlah Aset Lancar		183.457.037.851,26	211.058.179.593,10
14.	INVESTASI JANGKA PANJANG			
15.	Investasi Nonpermanen			
16.	Investasi Dana Bergulir	7.5.3.1.2.1.	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00
17.	Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	7.5.3.1.2.2.	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)
18.	Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00
19.	Investasi Permanen			
20.	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.3.	70.274.776.128,00	46.580.712.790,00
21.	Jumlah Investasi Permanen		70.274.776.128,00	46.580.712.790,00
22.	Jumlah Investasi Jangka Panjang		70.274.776.128,00	46.580.712.790,00
23.	ASET TETAP			
24.	Tanah	7.5.3.1.3.1.	485.627.108.776,03	467.504.380.178,30
25.	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2.	997.214.943.453,97	919.774.522.490,48
26.	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3.	1.615.326.861.288,88	1.555.490.772.712,72
27.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4.	1.664.843.304.609,65	1.308.537.529.344,16
28.	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5.	27.799.312.540,10	25.469.335.515,10
29.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6.	59.151.181.184,91	193.108.684.647,77
30.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.5.3.1.3.7.	(1.863.850.565.983,23)	(1.645.930.125.808,80)
31.	Jumlah Aset Tetap		2.986.112.145.870,31	2.823.955.099.079,73

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2022

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
32.	ASET LAINNYA			
33.	Tuntutan Perbendaharaan	7.5.3.1.4.1.	174.000.000,00	180.000.000,00
34.	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.4.2.	673.139.155,00	723.139.155,00
35.	Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.4.3.	62.053.526.412,00	56.472.429.602,00
36.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.4.4.	0,00	2.369.848.175,60
37.	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4.5.	84.818.025.374,77	49.669.189.052,08
38.	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	7.5.3.1.4.6.	1.951.961.206,00	0,00
39.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.1.4.3.	(46.361.975.709,63)	(41.913.024.761,20)
40.	Jumlah Aset Lainnya		103.308.676.438,14	67.501.581.223,48
41.	JUMLAH ASET		3.343.152.636.287,71	3.149.095.572.686,31
42.	KEWAJIBAN			
43.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
44.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1.	924.609.879,00	145.408.641,00
45.	Utang Bunga	7.5.3.2.1.2.	429.202.556,00	813.127.061,00
46.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.3.	62.451.777.632,00	55.661.791.690,00
47.	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4.	28.067.934.532,00	56.289.902.738,46
48.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		91.873.524.599,00	112.910.230.130,46
49.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
50.	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.3.2.2.1	260.669.295.342,00	126.779.310.192,10
51.	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.5.3.2.2.2	2.806.779.137,80	1.325.513.678,50
52.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		263.476.074.479,80	128.104.823.870,60
53.	JUMLAH KEWAJIBAN		355.349.599.078,80	241.015.054.001,06
54.	EKUITAS			
55.	EKUITAS	7.5.3.3	2.987.803.037.208,91	2.908.080.518.685,25
56.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.343.152.636.287,71	3.149.095.572.686,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2022

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1.	KEGIATAN OPERASIONAL			
2.	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.	1.953.809.056.978,35	2.076.058.253.158,68
3.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.1.	457.704.495.917,35	412.824.995.243,59
4.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.1.1	376.418.749.983,00	346.226.491.571,00
5.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.2	3.436.491.600,00	2.924.546.300,00
6.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1.1.3	8.183.285.026,00	17.368.189.840,00
7.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.4.1.1.4	69.665.969.308,35	46.305.767.532,59
8.	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.1.2.	1.436.545.261.740,00	1.609.482.634.440,00
9.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		1.393.682.128.740,00	1.593.040.970.440,00
10.	Dana Bagi Hasil - LO		20.886.554.055,00	23.055.410.591,00
11.	Dana Alokasi Umum- LO		969.853.896.329,00	970.916.874.000,00
12.	Dana Alokasi Khusus-LO		402.941.678.356,00	599.068.685.849,00
13.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		42.863.133.000,00	16.441.664.000,00
14.	Dana Insentif Daerah		42.863.133.000,00	16.441.664.000,00
15.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.1.3.	59.559.299.321,00	53.750.623.475,09
16.	Pendapatan Hibah - LO		59.559.299.321,00	53.723.990.475,09
17.	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	26.633.000,00
18.	BEBAN DAN TRANSFER	7.5.4.2.	1.918.483.333.546,20	1.868.269.293.503,81
19.	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1	1.679.457.574.912,20	1.697.836.891.199,81
20.	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	608.886.977.326,29	554.925.427.685,13
21.	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	664.565.522.666,50	586.142.589.666,19
22.	Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	24.506.284.232,00	13.030.112.208,00
23.	Beban Hibah	7.5.4.2.1.4	56.996.878.535,00	256.621.204.016,70
24.	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.5	1.610.000.000,00	2.490.000.000,00
25.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.1.6	322.891.912.152,41	283.894.388.832,79
26.	Beban Lain-lain	7.5.4.2.1.7	0,00	733.168.791,00
27.	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.2	237.723.309.630,00	170.432.402.304,00
28.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		203.437.930.795,00	161.832.402.304,00
29.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		20.318.689.935,00	-

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
30.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		13.966.688.900,00	8.600.000.000,00
31.	BEBAN TIDAK TERDUGA	7.5.4.2.3.	1.302.449.004,00	0,00
32.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		35.325.723.432,15	207.788.959.654,87
33.	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
34.	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		23.694.063.338,00	-
35.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		23.694.063.338,00	0,00
36.	DEFISIT NON OPERASIONAL		9.193.631.585,37	114.662.848.256,36
37.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	242.380.877,41
38.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		9.193.631.585,37	114.420.467.378,95
39.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3.	14.500.431.752,63	(114.662.848.256,36)
40.	POS LUAR BIASA	7.5.4.4.		
41.	Beban Luar Biasa -LO		29.322.500,00	2.647.108.868,00
42.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(29.322.500,00)	(2.647.108.868,00)
43.	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.4.5.	49.796.832.684,78	90.479.002.530,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.		
2.	Arus Masuk Kas			
3.	Penerimaan Pajak Daerah		376.418.749.983,00	346.226.491.571,00
4.	Penerimaan Retribusi Daerah		3.437.211.600,00	2.923.826.300,00
5.	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.183.285.026,00	12.599.189.840,00
6.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		67.167.371.949,39	45.697.007.029,59
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		969.853.896.329,00	970.916.874.000,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		402.941.678.356,00	599.068.685.849,00
9.	Penerimaan Dana Insentif Daerah		42.863.133.000,00	16.441.664.000,00
10.	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		18.934.592.849,00	23.055.410.591,00
11.	Penerimaan Hibah		2.062.209.100,00	7.165.293.605,82
12.	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	26.633.000,00
13.	Jumlah Arus Masuk Kas		1.891.862.128.192,39	2.024.121.075.786,41
14.	Arus Keluar Kas			
15.	Pembayaran Pegawai		606.681.872.761,29	563.347.419.213,13
16.	Pembayaran Barang		628.999.130.965,00	580.768.512.777,64
17.	Pembayaran Bunga		24.890.208.737,00	13.414.036.710,00
18.	Pembayaran Hibah		53.762.531.035,00	250.372.022.532,00
19.	Pembayaran Bantuan Sosial		1.610.000.000,00	2.490.000.000,00
20.	Pembayaran Tak Terduga		1.323.158.559,00	2.647.108.868,00
21.	Pembayaran Bantuan Keuangan		34.285.378.835,00	8.600.000.000,00
22.	Pembayaran Hasil Pajak		190.619.089.493,00	161.832.402.304,00
23.	Jumlah Arus Keluar Kas		1.542.171.370.385,29	1.583.471.502.404,77
24.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		349.690.757.807,10	440.649.573.381,64
25.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.		
26.	Arus Masuk Kas			
27.	Penjualan Aset Lainnya		2.756.667.142,00	550.000.000,00
28.	Jumlah Arus Masuk Kas		2.756.667.142,00	550.000.000,00
29.	Arus Keluar Kas			
30.	Perolehan Tanah		17.898.298.672,00	17.216.728.495,00
31.	Perolehan Peralatan dan Mesin		91.589.673.273,00	81.862.366.936,00
32.	Perolehan Bangunan dan Gedung		131.955.470.775,00	117.850.474.145,08
33.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		272.994.673.862,00	142.351.267.113,34
34.	Perolehan Aset Tetap Lainnya		33.108.730.259,00	43.586.761.078,00
35.	Jumlah Arus Keluar Kas		547.546.846.841,00	402.867.597.767,42

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2022

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
36.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(544.790.179.699,00)	(402.317.597.767,42)
37.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3.		
38.	Arus Masuk Kas			
39.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		195.669.938.135,00	75.000.000.000,00
40.	Jumlah Arus Masuk Kas		195.669.938.135,00	75.000.000.000,00
41.	Arus Keluar Kas			
42.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		53.945.712.546,00	46.225.023.856,00
43.	Jumlah Arus Keluar Kas		53.945.712.546,00	46.225.023.856,00
44.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		141.724.225.589,00	28.774.976.144,00
45.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.		
46.	Arus Masuk Kas			
47.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		129.482.174.278,00	108.693.499.064,00
48.	Jumlah Arus Masuk Kas		129.482.174.278,00	108.693.499.064,00
49.	Arus Keluar Kas			
50.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		128.696.072.340,00	112.101.854.646,17
51.	Jumlah Arus Keluar Kas		128.696.072.340,00	112.101.854.646,17
52.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		786.101.938,00	(3.408.355.582,17)
53.	Kenaikan / (Penurunan)		(52.589.094.364,90)	63.698.596.176,05
54.	Saldo Awal Kas		170.189.851.292,74	106.491.255.116,69
55.	Koreksi SILPA Tahun Lalu			
56.	Saldo Akhir Kas		117.600.756.927,84	170.189.851.292,74

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2022	2021
1.	EKUITAS AWAL	7.5.6	2.908.080.518.685,25	2.793.277.281.250,76
2.	SURPLUS/DEFISIT-LO		49.796.832.684,78	90.479.002.530,51
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			
	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset tetap		0,00	0,00
	Lain-Lain		0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya		29.925.685.838,88	24.324.234.903,98
5.	EKUITAS AKHIR		2.987.803.037.208,91	2.908.080.518.685,25

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022; dan
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

7.1. PENDAHULUAN

- 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3. Sistematika Penulisan CaLK

7.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 7.2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 7.2.2. Kebijakan Keuangan

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala Hambatan Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.3.3. Kebijakan Daerah Terkait Penanganan Pandemi Covid-19 dan Bencana Gempa Bumi

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
- 7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 7.5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

7.6. KEWAJIBAN KONTIJENSI

7.7. PENUTUP

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan senilai 11,75%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 2,34%;
3. *Gini Ratio* senilai 0,371%;
4. Indeks Pembangunan Manusia senilai 66,92;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 2,30%;
6. Tingkat Inflasi senilai 4,85%; dan
7. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat.

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Provinsi (%)	11,85%	11,75%	0,07%
2.	Provinsi (Ribu Orang)	165,99	169,26	3,27
3.	Nasional (%)	9,71%	9,57%	-0,14%
4.	Peringkat Regional Sulampua	5	5	0
5.	Peringkat Nasional	23	24	-1

Sumber Dokumen: <http://sulbar.bps.go.id> dan bps.go.id

Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebesar 11,85%. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 0,07% menjadi sebesar 11,75%. Salah satu penyebab kenaikan tersebut adalah Pandemi COVID-19 dan kenaikan harga BBM. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan diharapkan turun hingga angka 10%. Tingkat

kemiskinan Sulawesi Barat tahun 2022 menunjukkan angka tertinggi selama delapan tahun terakhir. Dengan mulai bangkitnya perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, diharapkan dapat membuat tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat semakin menipis. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat untuk wilayah Sulawesi masih di atas Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Dari persentase ini diharapkan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapatkan prioritas untuk terus menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,9	2,09	0,19
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	-0,11
3.	Peringkat Regional Sulampua	8	4	-4
4.	Peringkat Nasional	21	25	4

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,50	0,52	0,02
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	-0,04
3.	Peringkat Regional Sulampua	4	5	1
4.	Peringkat Nasional	23	27	4

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Barat, TPT di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 menunjukkan angka senilai 2,34% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2021 senilai 3,13%. Data ini lebih rendah dengan TPT Nasional. Rincian dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,13%	2,34%	-0,79%
2.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49%	5,86%	-0,63%
3.	Peringkat Regional Sulampua	9	10	1
4.	Peringkat Nasional	32	34	2

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

7.2.1.3. Gini Ratio

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, yaitu:

1. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,371. Angka ini turun 0,005 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2021 yang sebesar 0,366 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional. Rincian *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Tingkat Provinsi	0,366	0,371	0,005
2.	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0,00
3.	Peringkat Regional Sulampua	5	4	-1
4.	Peringkat Nasional	12	26	14

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Barat, realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 adalah sebesar 66,92 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Provinsi	66,36	66,92	0,56
2.	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
3.	Peringkat Regional Sulampua	8	8	-

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
4.	Peringkat Nasional	31	31	-

Sumber Dokumen sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 adalah sebesar 66,92 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,56 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 66,36 poin. Menurut data BPS, IPM Sulawesi Barat pada tahun 2021 tercatat meningkat, kecuali komponen pengeluaran per kapita disesuaikan. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang baru lahir pada tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Barat tercatat memiliki peluang untuk hidup hingga 65,63 tahun, lebih lama 0,38 tahun dibandingkan tahun 2021. Kemudian, Harapan Lama Sekolah (HLS) anak-anak berusia 7 tahun pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,87 tahun. Angka tersebut lebih lama 0,01 tahun dibandingkan kondisi tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,08 tahun. Angka ini lebih lama 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat Sulawesi Barat tercatat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) senilai Rp9,36 juta per tahun pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat senilai Rp205 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Sulawesi Barat pada saat ini berada pada urutan 8 dari provinsi yang ada di wilayah regional Sulampua dan berada pada urutan 31 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 35 Provinsi yang ada di Indonesia.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Provinsi			Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rp)	32.034,02	32.898,23	33.654,78	11.710.397,80
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,40%	2,56%	2,30%	5,31
3.	Peringkat Regional Sulampua	10	9	9	-
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	27	30	27	-

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2022 laju perekonomian Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari -2,40% menjadi 2,30%. Pada periode tahun 2020 – 2021 pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari -2,40% menjadi 2,56%. Pada kurun waktu tahun 2021 –2022 pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan senilai 0,26% dari 2,56% menjadi 2,30%. Dalam skala provinsi wilayah Sulampua laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan ke-9 dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain dalam wilayah Sulampua.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.

3. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Dengan adanya isu inflasi pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai upaya menekan laju inflasi antara lain melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga kebutuhan pokok, pasar murah, mendistribusikan pasokan pangan, dan melakukan gerakan merdeka pangan, sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menekan laju inflasi.

Sesuai dengan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, tingkat inflasi Kabupaten di Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju) tahun 2022 adalah sebesar 4,85% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Tingkat Inflasi di Sulawesi Barat

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,39%	4,85%	0,46%
2.	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87%	5,51%	3,64%
3.	Peringkat Nasional	2	7	5

Sumber Dokumen: sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Tingkat inflasi di Sulawesi Barat tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,85%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2021 adalah sebesar 4,39% atau lebih tinggi 0,46% dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2021. Berdasarkan data statistik BPS Pusat dan BPS Sulawesi Barat inflasi di Sulawesi Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional 90 kota, yaitu sebesar 5,51%. Untuk perhitungan inflasi, hanya ada satu kota pada Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Untuk perhitungan inflasi kabupaten lain belum tersedia di data statistik BPS Provinsi Sulbar dan BPS Nasional. Sebagai informasi, perhitungan inflasi hanya dihitung berdasarkan kabupaten/kota inflasi bukan dihitung per provinsi.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat

Struktur perekonomian Provinsi di Sulawesi Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.950,97	21.078,17	23.892
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.006,74	1.112,49	1.161
3.	Industri Pengolahan	4.685,56	5.394,76	5.905
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	18,46	18,82	21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,80	70,87	71
6.	Konstruksi	3.347,09	3.889,80	4.032
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.677,40	4.999,22	5.360
9.	Transportasi dan Pergudangan	621,33	645,73	758
10.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104,74	110,48	126
11.	Informasi dan Komunikasi	2.077,72	2.076,69	2.129
12.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.066,18	1.189,98	1.273
13.	Real Estate	1.242,53	1.237,19	1.346
14.	Jasa Perusahaan	29,73	30,21	33
15.	Administrasi Pemerintahan	3.519,22	3.532,52	3.649
16.	Sosial Wajib	2.297,13	2.303,44	1.005
17.	Jasa Pendidikan	915,91	917,68	2.412
18.	Jasa Lainnya	795,07	833,17	898
19.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	46.427,58	50.341,23	54.071
20.	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	46.427,58	50.341,23	54.071
21.	PDRB Provinsi	46.427,58	50.341,23	54.071
22.	PDB Nasional	10.722.442,70	16.970.789,20	16.970.789,20
23.	Peringkat Provinsi	7	8	8
24.	Peringkat Nasional	31	32	32

7.2.1.8. Penanganan Stunting

Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dimuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat, angka stunting Provinsi Sulawesi Barat sebesar 33,80% dari 1.419.229 penduduk. Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah tertinggi angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 36,00%. Selanjutnya ada Kabupaten Majene dengan angka stunting sebesar 35,70%, disusul Kabupaten Mamasa yang berada di urutan ketiga tertinggi dengan angka stunting sebesar 33,70%. Selain itu angka stunting di Kabupaten Mamuju sebesar 30,30% dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 28,60%. Sementara Kabupaten Mamuju Tengah merupakan kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Sulawesi Barat yakni 26,30%.

Meski berhasil menurunkan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat dari sebesar 40,03% pada tahun 2019 menjadi sebesar 33,80% pada 2021 atau turun sekitar 6,23%. Provinsi Sulawesi

Barat hingga tahun 2022 masih berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia, turun dibandingkan pada tahun 2021.

Jika semakin banyak anak stunting baru yang lahir dikhawatirkan pada tahun 2035 ketika penduduk Indonesia mulai memasuki transisi penuaan demografi, banyak anak muda yang harus menanggung beban lebih banyak. Indonesia dikhawatirkan tidak bisa memetik bonus demografi yang berkualitas sehingga bisa berbahaya dalam pembangunan bangsa di masa depan. Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting memperhatikan penyebab dari meningkatnya angka stunting di daerahnya, misalnya stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kekurangan protein hewani, anak terkena penyakit berulang akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, atau kondisi lingkungan dan sanitasi yang kotor.

Hal yang harus diperbaiki agar program/kegiatan yang dilakukan bisa lebih efektif menurunkan stunting adalah dengan melakukan pendataan secara terpadu (*data balita stunting by name by address*) sehingga program/kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan efektif dalam menanggulangi dan menurunkan stunting. Selama ini pendataan belum dilakukan secara terpadu, sehingga balita stunting tidak teridentifikasi secara jelas dan pasti. Data yang ada hanya berupa data gambaran umum saja, tidak berdasarkan *by name by address* balita stunting. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan atas program-program yang sudah dijalankan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan program sebagaimana yang diharapkan, misalnya pemberian makanan tambahan untuk balita dan/atau keluarga miskin hendaknya benar-benar dipantau apakah dimakan atau tidak oleh objek sasaran. Hal ini pada akhirnya menyebabkan program yang dijalankan tidak mencapai target sasaran, sehingga upaya untuk penanggulangan dan penurunan stunting menjadi kurang efektif. Sementara itu, terkait besaran dan alokasi anggaran, besaran anggaran yang dialokasikan terkait penanggulangan stunting sudah dirasa memadai, hanya perlu pengoptimalan dalam pelaksanaannya saja agar dapat terlihat signifikansi hasil yang diharapkan.

Sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, salah satu tugas provinsi adalah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting (RAN-PASTI). Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penurunan stunting tahun 2022 antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan Stunting yang melibatkan seluruh kepala daerah kabupaten se-Sulawesi Barat dan seluruh stakeholder terkait baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Forum ini bertujuan dalam rangka penguatan komitmen provinsi dan kabupaten serta membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan stunting yang terjadi;
2. Penguatan pendataan pada kelompok sasaran prioritas melalui Data Desa Presisi yang diintegrasikan dengan sistem pendataan lainnya baik sistem pencatatan dan pelaporan gizi rutin (e-PPGBM) pada Dinas Kesehatan, serta pendataan keluarga berisiko stunting (PK 2022) yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Barat;
3. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai daerah lokus penanganan stunting; dan
4. Penguatan peran Tim Pendamping Keluarga dan Kader Konvergensi lainnya dalam pendampingan keluarga dengan berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 meliputi:

7.2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah untuk TA 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; dan
3. Meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta mencari sumber-sumber PAD yang belum tersentuh.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mendorong berdirinya Kantor Bea dan Cukai di Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan PAD. Pendirian Kantor Bea dan Cukai diharapkan membantu meningkatkan pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat Sulawesi Barat melalui pengenalan produk-produk asli Sulawesi Barat dalam skala Nasional bahkan Internasional. Peningkatan PAD diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan perekonomian daerah.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menyinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mengedepankan sumber pendapatan potensial untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Pajak Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan potensial dengan kontribusi rata-rata 82,19% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sekitar 19,85% terhadap APBD. Karena dampaknya yang begitu besar, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada ketiga jenis pajak daerah tersebut, tentu saja dengan tetap mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan kerja sama dan dukungan antar instansi pengelola pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;

8. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyedia biaya pembangunan daerah; dan
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak;
 - c. Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan;
 - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)*;
 - f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah; dan
 - g. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

7.2.2.2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

7.2.2.3. Penggunaan Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022 senilai Rp310.307.767.046,00. Realisasi pembiayaan netto mengalami surplus senilai Rp312.023.875.190,74, namun dalam realisasi setelah pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ternyata terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp116.924.453.298,84. Rencana dan realisasi pembiayaan daerah TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan**
Penerimaan pembiayaan TA 2022 direncanakan senilai Rp365.969.587.736,00 dan terealisasi senilai Rp365.969.587.736,74. Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri.
2. **Pengeluaran**
Pengeluaran pembiayaan TA 2022 direncanakan senilai Rp55.661.820.690,00 dan terealisasi senilai Rp53.945.712.546,00 yang terdiri dari pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Belanja mandatori (*mandatory spending*) merupakan belanja yang besar alokasinya dalam pengeluaran APBD telah ditetapkan secara terpisah oleh peraturan perundang-undangan. Besarnya dana tersebut telah dialokasikan secara pasti (*earmarked*) setiap tahun berdasarkan konstitusi (UUD 1945) atau dalam undang-undang organik secara sektoral. Belanja mandatori yang harus mendapat alokasi besaran tertentu dalam APBD tersebut meliputi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran infrastruktur. Keharusan untuk mengalokasikan belanja setiap tahun ini diatur dalam peraturan perundangan di luar wilayah keuangan daerah.

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2022 semula senilai Rp660.023.108.650,00 atau sebesar 32,74% dari total belanja daerah, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berkurang senilai Rp23.410.719.520,00 menjadi senilai Rp636.612.389.130,00 atau sebesar 29,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2022. Dengan rincian pada Lampiran 1.

Nilai alokasi anggaran tersebut telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2022 semula senilai Rp170.562.768.485,00 atau 10,12% dari total belanja daerah di luar gaji, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2022 bertambah senilai Rp16.478.043.126,00 menjadi senilai Rp187.040.811.611,00 atau sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian pada Lampiran 2. Nilai alokasi anggaran tersebut telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

3. Alokasi Anggaran Infrastruktur

Alokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2022 senilai Rp519.445.493.819,00 atau sebesar 52,61% dari total belanja daerah, sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2022 bertambah senilai Rp4.816.763.192,00 menjadi senilai Rp524.262.257.011,00 atau sebesar 53,10% dari total belanja daerah. Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan rincian pada Lampiran 3.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2022, Pendapatan Daerah dianggarkan senilai Rp1.896.276.561.452,00 dan pencapaian realisasi senilai Rp1.894.618.795.384,39 sehingga pencapaian target kinerja keuangan mencapai 99,91%. Ditinjau dari sisi pendapatan daerah, pencapaian target kinerja adalah sudah sangat baik.

Alokasi Belanja Daerah dan Transfer dianggarkan senilai Rp2.206.584.328.498,00 dan realisasi mencapai senilai Rp2.089.718.217.226,29 yang berarti tingkat penyerapan belanja daerah terpenuhi 94,70%. Realisasi Belanja dan Transfer diprioritaskan untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerja sama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, kesesuaian dengan visi misi Gubernur Sulawesi Barat, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal. Ditinjau dari sisi belanja daerah, pencapaian target kinerja keuangan adalah sudah cukup baik dengan capaian 94,70%.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp365.969.587.736,00 dan terealisasi senilai Rp365.969.587.736,74 atau 100,00%; dan
2. Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan pada tahun 2022 senilai Rp55.661.820.690,00 dan terealisasi senilai Rp53.945.712.546,00 atau 96,92%.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD TA 2022 dapat diuraikan pada Tabel 10. Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Tabel 10. Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2022			2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
1.	JUMLAH PENDAPATAN	1.896.276.561.452,00	1.894.618.795.334,39	99,91	2.024.671.075.786,41
2.	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.206.584.328.498,00	2.089.718.217.226,29	94,70	1.986.339.100.172,19
3.	SURPLUS/DEFISIT	(310.307.767.046,00)	(195.099.421.891,90)	62,87	38.331.975.614,22
4.	<u>PEMBIAYAAN</u>				
	PENERIMAAN				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	170.299.649.601,00	170.299.649.601,74	100,00	103.192.697.843,52
	Penerimaan Pinjaman Daerah	195.669.938.135,00	195.669.938.135,00	100,00	75.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan	365.969.587.736,00	365.969.587.736,74	100,00	178.192.697.843,52
	PENGELUARAN				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Utang	55.661.820.690,00	53.945.712.546,00	96,92	46.225.023.856,00
	Jumlah Pengeluaran	55.661.820.690,00	53.945.712.546,00	96,92	46.225.023.856,00
	PEMBIAYAAN NETTO	310.307.767.046,00	312.023.875.190,74	100,55	131.967.673.987,52
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	116.924.453.298,84	0,00	170.299.649.601,74

7.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022 antara lain:

1. Hambatan utama pendapatan daerah yaitu:
 - a. Masih kurangnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendapatan dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak;
 - b. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan mengganti plat kendaraan mereka menjadi kode DC untuk wilayah Sulawesi Barat; dan
 - c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak, retribusi, maupun pungutan lainnya (tunggakan, sumbangan pihak ketiga, dll) yang dipungut di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Permasalahan lain yang tiap tahunnya perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pendapatan, khususnya instansi pengelola pendapatan daerah antara lain:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pemungutan pendapatan daerah;
- b. Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat belum seluruhnya direalisasikan tepat waktu;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi informasi, terutama dalam bidang pelayanan, perlu ditingkatkan;

- e. Beberapa sumber-sumber PAD yang potensial belum memberikan kontribusi, disebabkan belum adanya regulasi pemerintah daerah yang menjadi dasar pemungutan;
- f. Kesadaran dari wajib pajak dan retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini didukung dengan belum siapnya pemerintah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa dana yang dipungut dari mereka akan memberikan manfaat pada mereka dan masyarakat luas pada umumnya; dan
- g. Kesadaran taat bayar pajak dari warga masyarakat wajib pajak belum berbudaya.

Selain itu upaya peningkatan penerimaan daerah perlu pula dilakukan dengan optimalisasi investasi, yang dapat menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingkat ketergantungan keuangan ke pemerintah pusat dapat dikurangi. Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan investasi perlu melakukan perbaikan pelayanan publik, antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan investasi, peningkatan perlindungan investasi, dan penciptaan sistem insentif sehingga Sulawesi Barat senantiasa menjadi wilayah yang menarik untuk berinvestasi.

2. Hambatan utama Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, hambatan-hambatan dalam realisasi belanja daerah sebagai berikut:

- a. Penetapan belanja yang tidak didukung dengan kelengkapan dokumen pencairan (hibah) sehingga menyebabkan tertundanya pencairan;
- b. Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) belum dilaksanakan secara tertib yaitu antara lain penyetoran sisa kas tidak tepat waktu (menyeberang tahun);
- c. Laporan pertanggungjawaban bendahara baik secara fungsional maupun administratif belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga penyampaian laporan semesteran dan laporan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
- d. Pelaporan dana BOS Satdikmen dan Satdikdas belum sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
- e. Tidak tertibnya administrasi keuangan BLUD dan Laporan Keuangan BLUD.

7.3.3. Pergeseran dan Perubahan APBD

Pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa

Selama tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan delapan kali pergeseran anggaran dengan rincian lima kali mendahului perubahan APBD dan tiga kali setelah perubahan APBD serta sekali perubahan APBD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran pertama ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022. Pergeseran anggaran pertama ini untuk mengakomodir:

- a. Pergeseran terhadap belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Dinas Sosial, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Pergeseran pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertama sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	401.921.428.435,00	401.921.428.435,00
4.2	Dana Transfer	1.423.814.008.000,00	1.423.814.008.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.827.077.436.435,00	1.827.077.436.435,00
5.1	Belanja Operasi	1.362.393.489.236,00	1.362.440.305.236,00
5.2	Belanja Modal	407.935.964.219,00	567.064.695.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	10.785.298.144,00
5.4	Belanja Transfer	234.548.188.996,00	234.548.188.996,00
	Total Belanja	2.015.662.940.595,00	2.174.838.488.238,00

2. Pergeseran anggaran kedua ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022. Pergeseran anggaran kedua ini juga untuk mengakomodir:
 - a. Pergeseran terhadap belanja gaji dan tunjangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Daerah;
 - b. Pergeseran antar objek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pariwisata; dan
 - c. Pergeseran Anggaran mendahului perubahan untuk uraian objek belanja atau pemaketan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua sesuai Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	401.921.428.435,00	401.921.428.435,00
4.2	Dana Transfer	1.423.814.008.000,00	1.423.814.008.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.827.077.436.435,00	1.827.077.436.435,00
5.1	Belanja Operasi	1.362.393.489.236,00	1.362.440.305.236,00
5.2	Belanja Modal	407.935.964.219,00	567.064.695.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	10.785.298.144,00
5.4	Belanja Transfer	234.548.188.996,00	234.548.188.996,00
	Total Belanja	2.015.662.940.595,00	2.174.838.488.238,00

3. Pergeseran anggaran ketiga ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022. Pergeseran anggaran ketiga dilakukan untuk mengakomodir:
- Pergeseran terhadap belanja gaji dan tunjangan (TPP) pada seluruh SKPD. Hal ini didasari atas Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/288/Ortala perihal Berita Acara Rapat Validasi TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022; dan
 - Pergeseran antar organisasi yaitu pergeseran anggaran mendahului perubahan untuk pergeseran anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Biro Umum Sekretariat Daerah.
- Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	401.921.428.435,00	401.921.428.435,00
4.2	Dana Transfer	1.423.814.008.000,00	1.423.814.008.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.827.077.436.435,00	1.827.077.436.435,00
5.1	Belanja Operasi	1.362.393.489.236,00	1.365.917.408.624,00
5.2	Belanja Modal	407.935.964.219,00	567.064.695.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	7.308.194.756,00
5.4	Belanja Transfer	234.548.188.996,00	234.548.188.996,00
	Total Belanja	2.015.662.940.595,00	2.174.838.488.238,00

4. Pergeseran anggaran keempat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022. Pergeseran anggaran keempat dilakukan untuk mengakomodir:
- Pergeseran anggaran mendahului perubahan untuk Pergeseran Belanja Gaji dan Tunjangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; dan
 - Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja mendahului perubahan untuk pergeseran anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Sekretariat Daerah, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keempat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	401.921.428.435,00	401.921.428.435,00
4.2	Dana Transfer	1.423.814.008.000,00	1.423.814.008.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.827.077.436.435,00	1.827.077.436.435,00

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
5.1	Belanja Operasi	1.362.393.489.236,00	1.366.343.083.004,00
5.2	Belanja Modal	407.935.964.219,00	567.139.695.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	6.807.520.376,00
5.4	Belanja Transfer	234.548.188.996,00	234.548.188.996,00
	Total Belanja	2.015.662.940.595,00	2.174.838.488.238,00

5. Pergeseran anggaran kelima ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022. Pergeseran anggaran kelima dilakukan untuk mengakomodir:
- Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja. Pergeseran anggaran mendahului perubahan untuk anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Biro Hukum, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan
 - Pergeseran anggaran mendahului perubahan untuk pergeseran penggunaan dana BLUD pada RSUD dan penambahan pendapatan dari dana BLUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelima sesuai Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	401.921.428.435,00	407.785.068.919,00
4.2	Dana Transfer	1.423.814.008.000,00	1.423.814.008.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.827.077.436.435,00	1.832.941.076.919,00
5.1	Belanja Operasi	1.362.393.489.236,00	1.371.306.723.488,00
5.2	Belanja Modal	407.935.964.219,00	568.039.695.862,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	6.807.520.376,00
5.4	Belanja Transfer	234.548.188.996,00	234.548.188.996,00
	Total Belanja	2.015.662.940.595,00	2.180.702.128.722,00

6. Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 tanggal 2 November 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 2 November 2022.

Perubahan APBD dilakukan antara lain:

- Asumsi perubahan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD TA 2022 direncanakan senilai Rp1.871.839.796.940,00 atau mengalami peningkatan senilai Rp44.762.360.505,00 dari Rp1.827.077.436.435,00;
- Kebijakan perencanaan belanja dengan mengacu pada APBD TA 2022 sebelum perubahan senilai Rp2.015.662.940.595,00 dan setelah perubahan bertambah senilai Rp166.484.623.391,00 atau mengalami kenaikan senilai 8 persen, sehingga menjadi Rp2.182.147.563.986,00; dan

- c. Belanja Tidak Terduga, mengalami perubahan menjadi senilai Rp3.866.947.224,00 atau mengalami penurunan senilai Rp6.918.350.920 atau 64% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp10.785.298.144,00.

Tabel 16. Ringkasan Perubahan APBD Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	401.921.428.435,00	428.261.986.457,00
4.2	Dana Transfer	1.423.814.008.000,00	1.442.235.810.483,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.827.077.436.435,00	1.871.839.796.940,00
5.1	Belanja Operasi	1.362.393.489.236,00	1.377.690.444.496,00
5.2	Belanja Modal	407.935.964.219,00	575.559.818.273,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	3.866.947.224,00
5.4	Belanja Transfer	234.548.188.996,00	225.030.353.993,00
	Total Belanja	2.015.662.940.595,00	2.182.147.563.986,00

7. Pergeseran Kesatu Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 4 November 2022.

Pergeseran kesatu setelah perubahan APBD TA 2022 ini berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2502.01.00/362/BPBD/XI/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Permohonan Bantuan Tambahan Anggaran Perubahan Tahun 2022; dan
- Pelaahan Staf Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Nomor 1302.02.1340/BPKPD/2022 perihal Usulan Penggunaan Anggaran BTT melalui Pergeseran Anggaran atas Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2022.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	428.261.986.457,00	428.261.986.457,00
4.2	Dana Transfer	1.442.235.810.483,00	1.442.235.810.483,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.871.839.796.940,00	1.871.839.796.940,00
5.1	Belanja Operasi	1.377.690.444.496,00	1.378.060.310.796,00
5.2	Belanja Modal	575.559.818.273,00	575.559.818.273,00

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.866.947.224,00	3.497.080.924,00
5.4	Belanja Transfer	225.030.353.993,00	225.030.353.993,00
	Total Belanja	2.182.147.563.986,00	2.182.147.563.986,00

8. Kemudian Pergeseran Kedua Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 18 November 2022.

Pergeseran kedua setelah perubahan APBD TA 2022 ini berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022;
- Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3800.00/3730/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Pemanfaatan BTT untuk penanggulangan inflasi dan Ketahanan Pangan Daerah;
- Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 006.00.02/525/2022 perihal Pergeseran Anggaran dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Pergeseran Anggaran pada Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2022;
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 2400/005.00.01/1488/XI/2022 perihal Permohonan Pergeseran Rekening Belanja Gaji pada Aplikasi SIPD TA 2022 melalui Pergeseran Anggaran pada Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2022;
- Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor 005-00.01/636/XI/2022 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN melalui Pergeseran Anggaran pada Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2022; dan
- Telaahan Staf Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 007.04.04.05/1450/BPKPD/2022 perihal Usulan Penggunaan Anggaran BTT melalui Pergeseran Anggaran pada Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2022.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	428.261.986.457,00	428.261.986.457,00
4.2	Dana Transfer	1.442.235.810.483,00	1.443.458.020.995,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.871.839.796.940,00	1.873.062.007.452,00

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
5.1	Belanja Operasi	1.377.690.444.496,00	1.379.728.759.308,00
5.2	Belanja Modal	575.559.818.273,00	577.030.445.273,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.866.947.224,00	1.580.215.924,00
5.4	Belanja Transfer	225.030.353.993,00	225.030.353.993,00
	Total Belanja	2.182.147.563.986,00	2.183.369.774.498,00

9. Kemudian Pergeseran Ketiga Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 5 Desember 2022.

Pergeseran ketiga setelah perubahan APBD TA 2022 ini berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022;
- Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Nomor 3804/4110/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Usulan Bantuan Alsintan;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor B-1802.03.04/13916/XI/2022 perihal Permohonan Penanganan Inflasi Daerah;
- Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 700.00.00/2448/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Permohonan Penanganan Inflasi Daerah;
- Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 3808/1718/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Permohonan Penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dana DID;
- Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Nomor B-007.00.05/1416/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan TA 2022;
- Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Nomor 3804/3018/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Penyampaian Surat Keterangan;
- Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 2503.00.01/405/BPBD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Pergeseran Rincian Uraian Objek Belanja TA 2022;
- Surat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 006.00.02/541/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Pergeseran Anggaran;
- Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 1600.00/857/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Usulan Pergeseran Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan;
- Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor 3802/1097/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Permohonan Pergeseran;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor T.005.00.02/13957/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Pergeseran Anggaran pada Rekening Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN TA 2022;

- q. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Nomor 005.00.01/795/DP34P2KB/XII/2022 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
- r. Surat Kepala Badan Penghubung Nomor 050/264/BP/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Gaji PNS pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat;
- s. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 005.00.01/2709/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Pergeseran Belanja Gaji;
- t. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 007.04.04.09/3868/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran APBDP RSUD Provinsi Sulbar TA 2022;
- u. Surat Sekretaris Dinas Kehutanan Nomor 002.00.01/1984/XII/Dishut tanggal 1 Desember 2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran;
- v. Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 3460/378/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Usulan Pergeseran Gaji dan Tunjangan;
- w. Surat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Nomor 42.00/989/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Gaji;
- x. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor B-1302.02/647/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Permohonan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Fungsional;
- y. Surat Sekretariat DPRD Nomor 2203.00/1160/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran;
- z. Surat Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 005.00.01/930/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Pergeseran Anggaran;
- aa. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 700.00.00/2711/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran TA 2022;
- bb. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Nomor B-007.00.05/1416/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan TA 2022; dan
- cc. Telaahan Staf Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 302.01/1535/BPKPD/2022 perihal Usulan Pergeseran Anggaran pada Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2022.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 19. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	428.261.986.457,00	428.261.986.457,00
4.2	Dana Transfer	1.442.235.810.483,00	1.466.672.574.995,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	1.342.000.000,00
	Total Pendapatan	1.871.839.796.940,00	1.896.276.561.452,00
5.1	Belanja Operasi	1.377.690.444.496,00	1.380.479.772.308,00
5.2	Belanja Modal	575.559.818.273,00	599.493.986.273,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.866.947.224,00	1.580.215.924,00
5.4	Belanja Transfer	225.030.353.993,00	225.030.353.993,00
	Total Belanja	2.182.147.563.986,00	2.206.584.328.498,00

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2022, entitas pelaporan yang dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sementara itu, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan basis pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

1. Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA. Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada LRA.

Pengakuan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

2. Basis Akrual

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, serta surplus atau defisit.

7.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022, penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap semua jenis laporan telah didasarkan pada SAP yang berbasis akrual dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Pendapatan telah diterima pada RKUD;
- 2) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 3) Pendapatan telah diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- 4) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk

mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

- 5) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat; dan
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS);
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CAK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- 5) Dalam hal BLUD, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU);
- 6) Pengakuan Pendapatan-LO pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah:
 - a) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;

b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

7) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan SK atas pendapatan terkait.

b) PAD tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 - 3) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
 - 4) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur senilai aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
 - 5) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 - 6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 - 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
 - 8) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;
 - 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
 - d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- 3) Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.

b. Pengukuran

- 1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- 3) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan

sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA; dan

- 4) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 3) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- 4) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal; dan
 - c) Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CaLK;
- 5) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu; dan
- 6) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada:
 - a) Saat timbulnya kewajiban;
 - b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya

waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;

- 5) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu beban diakui sebelum pengeluaran kas, beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;
- 6) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sementara itu, pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- 7) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencatatan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 8) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 9) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan

persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;

- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

b. Pengukuran

- 1) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- 2) Beban diukur berdasarkan:
 - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 3) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
 - b) Beban Transfer;
 - c) Beban Non Operasional; dan
 - d) Beban Luar Biasa.
- 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; dan
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden);
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke RKUD.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan
- 3) Transfer Keluar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD; dan
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- 2) Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/Keputusan Gubernur.

c. Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran Transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

d. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

b. Pengukuran

- 1) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan;

- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
 - 3) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
- c. Akuntansi Pembiayaan Netto
- 1) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto; dan
 - 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- d. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir
- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
 - 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
 - 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
 - 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang; dan
 - 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- e. Transaksi dalam Mata Uang Asing
- Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- f. Pengungkapan
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
 - 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pengukuran

- 1) Kas dan Setara kas dicatat senilai nilai nominal; dan
- 2) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c. Pengungkapan

- 1) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - a) Saldo Kas di Kas Daerah;
 - b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
 - d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
- 2) Rincian Kas, baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 3) Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK disatukan dalam jurnal kas daerah; dan
- 4) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

a. Pengakuan

- 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat senilai biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- 2) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat senilai nilai nominal deposito tersebut;
- 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- 5) Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut; dan
- 6) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

c. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- 3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dimiliki tidak berkelanjutan) merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir; dan
- 4) Investasi non permanen lainnya.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen (dimiliki berkelanjutan) merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan, Pengukuran, dan Metode Penilaian serta Pelepasan dan Pemindahan Investasi sebagai berikut:

a. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur senilai nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

c. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

d. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- 1) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- 2) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- 3) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

e. Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- 5) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengakuan, pengukuran dan penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebagai berikut:

1) Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat senilai jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

2) Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir, yaitu senilai jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

3) Penyajian

- a) Pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat senilai jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir;
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir;
- c) Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- d) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
- e) Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi (*Net Realizable Value*)

- 1) Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya

akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.

- 2) Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 3) Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
 - a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
 - b) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
 - c) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan;
 - d) Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*);
 - e) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui:
 - (1) Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih;
 - (2) Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih;
 - (3) Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih; dan
 - (4) Kebijakan akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 4) Adapun Tata Cara Penyisihan, Perhitungan Dana Bergulir dan penetapan *aging schedule* adalah sebagai berikut:
 - a) Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - (1) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - (2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - (3) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - (4) Pelaporan dana bergulir; dan
 - (5) Penghapusan dana bergulir.
 - b) Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diklasifikasikan atas:
 - (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan; dan
 - (4) Kualitas macet.
 - c) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b diklasifikasikan atas:
 - (1) Kualitas lancar, senilai 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

- (3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d) Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat senilai nilai kotor (bruto).
- e) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf d meliputi:
 - (1) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - (2) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
- f) Beban penyisihan dana bergulir pada huruf a disajikan dalam LO.
- g) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b disajikan dalam neraca.
- h) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf e meliputi:
 - (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- i) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- j) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri
 - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3)) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana kooperatif
 - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4)) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2)) Penerima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

- (5)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Dana Bergulir dengan *executing agency*
- (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1)) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*
- (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1)) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4)) Penerima Dana Bergulir bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - (5)) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- k) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori, dan tingkat kolektibilitas serta persentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
- (1) Kualitas lancar, senilai 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- (4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

10. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Pengakuan

- 1) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) Jumlah piutang dapat diukur.
- 3) Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.
- 4) Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
- 5) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan.
- 6) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 7) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer.
- 8) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 9) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 10) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada

umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- 11) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- 12) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 13) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
 - b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - d) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian

dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya;

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) DBH disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;

b) DAU senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

c) DAK, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;

6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*);

7) Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;

8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;

b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c) Kualitas Piutang Diragukan; dan

d) Kualitas Piutang Macet.

9) Penggolongan Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan

b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(4) Wajib Pajak likuid; dan/atau

- (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya melalui SKPD dan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi (misalnya Retribusi Kesehatan di RSUD), dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 (satu) s.d.2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun;

- d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- 1) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
 - 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.
 - 3) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
 - 4) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 - 5) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
 - 6) Penyajian Penyisihan Piutang
Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- d. Pemberhentian Pengakuan
- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).
 - 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
 - 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
 - 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
 - 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan

- (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write-off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;
- d) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
- e) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan;
- f) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
- g) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - (5) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain; dan
 - (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write-down* maupun *write-off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai

mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

e. Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

Metode perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan memperhatikan masa berlakunya pemanfaatan barang, seperti obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode periodik digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Penilaian

- 1) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Penilaian dengan metode FIFO digunakan untuk menghitung persediaan obat-obatan.
- 2) Penilaian persediaan menggunakan metode Periodik. Persediaan akhir dihitung dan dinilai dengan menggunakan persediaan akhir dengan harga pembelian terakhir. Penilaian dengan metode periodik digunakan untuk menghitung persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi yaitu:
 - a) persediaan alat tulis kantor;
 - b) persediaan alat listrik;
 - c) persediaan material/bahan;
 - d) persediaan benda pos;
 - e) persediaan bahan bakar;
 - f) persediaan bahan makanan pokok; dan
 - g) persediaan bahan/barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 4) Persediaan disajikan senilai:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar;
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Pengakuan

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
 - 3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
 - 4) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - 5) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- 1) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
- 2) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit *Air Conditioner* (AC) dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 3) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 5) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi kriteria (a) dan (b) sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) Bertambah ekonomis/efisiensi; dan/atau
 - (2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau

- (3) Bertambah volume; dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi; dan/atau
 - (5) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Pengukuran
- Nilai Perolehan Aset Tetap
- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - 5) Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
 - a) Biaya Konstruksi Fisik, yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual;
 - b) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan;
 - c) Biaya Pengawasan Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan;
 - d) Biaya Pengelolaan Kegiatan, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.
 - 6) Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
 - b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 6) Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

d. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

- 1) Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan untuk setiap jenis aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan/renovasi terhadap aset tetap berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan, perhitungan penyusutannya pada tahun perolehan aset tersebut.
- 3) Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun, ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan adalah pendekatan tahunan dengan memperhitungkan penyusutan secara bulanan, yaitu penyusutan dihitung bulanan mulai tanggal perolehan sampai 31 Desember.
- 4) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- 4) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.
- 5) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- 6) Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.
- 7) Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

b. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c) Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Pengukuran

- a. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit - LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit- LRA.
- c. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan antara realisasi dengan anggarannya.

7.5.1.1. Pendapatan

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.894.618.795.334,39	2.024.671.075.786,41

Pendapatan Daerah TA 2022 dianggarkan senilai Rp1.896.276.561.452,00 dengan realisasi senilai Rp1.894.618.795.334,39 atau 99,91% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan TA 2021, realisasi pendapatan TA 2022 menurun senilai Rp130.052.280.452,02 atau 6,42%. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	428.261.986.457,00	457.963.285.700,39	29.701.299.243,39	106,94	407.996.514.740,59
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.466.672.574.995,00	1.434.593.300.534,00	(32.079.274.461,00)	97,81	1.609.482.634.440,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.342.000.000,00	2.062.209.100,00	720.209.100,00	153,67	7.191.926.605,82
Jumlah Pendapatan	1.896.276.561.452,00	1.894.618.795.334,39	(1.657.766.117,61)	99,91	2.024.671.075.786,41

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi pendapatan belum melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 99,91%. Secara rinci akan diuraikan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut.

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
457.963.285.700,39	407.996.514.740,59

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah TA 2022 terealisasi senilai Rp457.963.285.700,39 atau 106,94% dari anggaran senilai Rp428.261.986.457,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp49.966.770.959,80 atau 12,25% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp407.996.514.740,59. Secara rinci nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	(%)	Realisasi
Pajak Daerah	351.622.443.842,00	376.418.749.983,00	24.796.306.141,00	107,05	346.226.491.571,00
Retribusi Daerah	4.366.340.000,00	3.437.211.600,00	(929.128.400,00)	78,72	2.923.826.300,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.867.247.793,00	8.183.285.026,00	(4.683.962.767,00)	63,60	12.599.189.840,00
Lain-lain PAD yang Sah	59.405.954.822,00	69.924.039.091,39	10.518.084.269,39	117,71	46.247.007.029,59
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	428.261.986.457,00	457.963.285.700,39	29.701.298.243,39	106,94	407.996.514.740,59

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 106,94%.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.1.4. Pajak Daerah	376.418.749.983,00	346.226.491.571,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 senilai Rp376.418.749.983,00 atau senilai 107,05% dari anggaran senilai Rp351.622.443.842,00. Realisasi tersebut meningkat senilai Rp30.192.258.412,00 atau 8,72% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp346.226.491.571,00. Secara rinci nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	83.775.251.920,00	89.715.129.926,00	5.939.878.006,00	107,09	76.207.669.615,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	88.874.998.640,00	92.158.454.750,00	3.283.456.110,00	103,69	89.729.008.540,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	78.100.501.232,00	79.361.420.457,00	1.260.919.225,00	101,61	71.764.899.586,00
Pajak Air Permukaan	450.350.750,00	350.306.208,00	-100.044.542,00	77,79	386.392.173,00
Pajak Rokok	100.421.341.300,00	114.833.438.642,00	14.412.097.342,00	114,35	108.138.521.657,00
Jumlah Pajak Daerah	351.622.443.842,00	376.418.749.983,00	24.796.306.141,00	107,05	346.226.491.571,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari lima jenis pendapatan untuk pemerintah Provinsi terdapat empat pajak daerah yang mencapai target penerimaan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 107,09%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 103,69%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mencapai 101,61%, dan Pajak Rokok mencapai 114,35%, sementara Pajak Air Permukaan hanya mencapai 77,79%. Secara keseluruhan Pendapatan Pajak Daerah melebihi target senilai 107,05% dari pendapatan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2021, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan senilai Rp30.192.258.412,00 atau 8,72%.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.1.5. Retribusi Daerah	3.437.211.600,00	2.923.826.300,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 senilai Rp3.437.211.600,00 atau 78,72% dari anggaran senilai Rp4.366.340.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut meningkat senilai Rp513.385.300,00 atau 17,56% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp2.923.826.300,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	634.522.000,00	384.522.000,00	253,81	72.850.500,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	3.000.000,00	15.780.000,00	12.780.000,00	526,00	5.175.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.417.340.000,00	1.099.340.000,00	(318.000.000,00)	77,56	1.725.280.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	231.000.000,00	177.315.000,00	(53.685.000,00)	76,76	50.475.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	905.000.000,00	727.663.000,00	(177.337.000,00)	80,40	389.260.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	300.000.000,00	63.365.000,00	(236.635.000,00)	21,12	0,00
Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.260.000.000,00	719.226.600,00	(540.773.400,00)	57,08	672.044.800
Jumlah Retribusi Daerah	4.366.340.000,00	3.437.211.600,00	(929.128.400,00)	78,72	2.923.826.300,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya ada 2 (dua) komponen retribusi yang melampaui target penerimaan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 253,81% dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar 526,00%, sedangkan komponen retribusi lainnya tidak mencapai target di sebabkan karena SKPD belum maksimal dalam pengelolaan sumber-sumber retribusi yang dapat meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.1.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.183.285.026,00	12.599.189.840,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut merupakan laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2022 senilai Rp8.183.285.026,00 atau senilai 63,60% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut turun senilai Rp4.415.904.814,00 atau 35,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp12.599.189.840,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.1.7. Lain-Lain PAD yang Sah	69.924.039.091,39	46.247.007.029,59

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 senilai Rp69.924.039.091,39 atau 117,71% dari anggaran senilai Rp59.405.954.822,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp23.677.032.061,80 atau 51,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp46.247.007.029,59. Secara rinci anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Daftar Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.141.644.500,00	2.756.667.142,00	615.022.642,00	128,72	550.000.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	73.000.000,00	23.000.000,00	146,00	24.000.000,00
Jasa Giro	12.359.989.482,00	11.383.594.692,73	(1.026.394.789,27)	91,70	11.434.166.158,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.381.805.034,10	1.381.805.034,10	0,00	1.170.812.508,27
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768.916,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.540.292.000,00	10.194.783.186,89	4.654.491.186,89	184,01	237.034.346,32
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.867.466.031,00	1.526.572.312,00	(340.893.719,00)	81,75	642.151.559,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	200.000.000,00	3.422.230.525,26	3.222.230.525,26	1.711,12	310.085.100,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.164.000.000,00	277.831.656,40	(1.886.168.343,60)	12,84	425.515.732,00
Pendapatan BLUD	34.382.562.809,00	38.405.879.342,00	4.023.316.533,00	111,70	30.958.929.510,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	700.000.000,00	551.675.200,00	(148.324.800,00)	78,81	479.543.200,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	59.405.954.822,00	69.924.039.091,39	10.518.084.269,39	117,71	46.247.007.029,59

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer	1.434.593.300.534,00	1.609.482.634.440,00

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 adalah senilai Rp1.434.593.300.534,00 atau senilai 97,81% dari anggaran senilai Rp1.466.672.574.995,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan

senilai Rp 174.889.333.906,00 atau 10,87% dibandingkan TA 2021. Rincian pendapatan transfer dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 25. Daftar Rincian Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.423.809.441.995,00	1.391.730.167.534,00	(32.079.274.461,00)	97,75	1.593.040.970.440,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	42.863.133.000,00	42.863.133.000,00	26.421.469.000,00	100,00	16.441.664.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.466.672.574.995,00	1.434.593.300.534,00	(32.079.274.461,00)	97,81	1.609.482.634.440,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa komponen Pendapatan Transfer tidak mencapai target penerimaan. Pendapatan Transfer hanya mencapai **10,87%** dari anggaran.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.391.730.167.534,00	1.593.040.970.440,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 senilai Rp1.391.730.167.534,00 atau senilai 97,75% dari anggaran senilai Rp1.423.809.441.995,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami penurunan senilai Rp201.310.802.906,00 atau 12,64% dibanding realisasi TA 2021 senilai Rp1.593.040.970.440,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	16.816.407.850,00	18.629.983.935,00	1.813.576.085,00	110,78	22.485.371.231,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	485.053.315,00	304.608.914,00	(180.444.401,00)	62,80	570.039.360,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	972.189.180.000,00	969.853.896.329,00	(2.335.283.671,00)	99,76	970.916.874.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	434.318.800.830,00	402.941.678.356,00	(31.377.122.474,00)	92,78	599.068.685.849,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.423.809.441.995,00	1.391.730.167.534,00	(32.079.274.461,00)	97,75	1.593.040.970.440,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang melampaui target adalah Dana Bagi Hasil Pajak senilai 110,78%, sedangkan Pendapatan Transfer Pusat yang tidak mencapai target adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam senilai 62,80%, Dana Alokasi Umum senilai 99,76%, dan Dana Alokasi Khusus senilai 92,78%.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak	18.629.983.935,00	22.485.371.231,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak untuk TA 2022 senilai Rp18.629.983.935,00 atau senilai 110,78% dari anggaran senilai Rp16.816.407.850,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.855.387.296,00 atau senilai 17,15% dibandingkan realisasi TA 2021.

Tabel 27. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.181.235.160,00	5.041.950.598,00	860.715.438,00	120,59	6.554.670.818,00
DBH PPh Pasal 21	12.240.391.863,00	13.193.252.510,00	952.860.647,00	107,78	15.452.469.077,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	394.780.827,00	394.780.827,00	0,00	100,00	478.231.336,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	16.816.407.850,00	18.629.983.935,00	1.813.576.085,00	110,78	22.485.371.231,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	304.608.914,00	570.039.360,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2022 senilai Rp304.608.914,00 atau 62,80% dari anggaran senilai Rp485.053.315,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp265.430.446,00 atau 46,56%. Rincian nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai berikut.

Tabel 28. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	174.556.411,00	134.485.575,00	(40.070.836,00)	77,04	44.210.754,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	104.302.339,00	104.302.339,00	0,00	27.378.878,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	36.440.725,00	20.589.000,00	(15.851.725,00)	56,50	163.284.148,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	274.056.179,00	45.232.000,00	(228.824.179,00)	16,5	335.165.580,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	485.053.315,00	304.608.914,00	(180.444.401,00)	62,80	570.039.360,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum	969.853.896.329,00	970.916.874.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 senilai Rp969.853.896.329,00 atau 99,76% dari anggaran senilai Rp972.189.180.000,00. Dana Alokasi Umum tersebut tidak mencapai target 100,00% karena terdapat pemotongan dana senilai Rp2.335.283.671,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana DAU dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.062.977.671,00 atau 0,11% dibandingkan realisasi TA 2021.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus	402.941.678.356,00	599.068.685.849,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 senilai Rp402.941.678.356,00 atau 92,78% dari anggaran senilai Rp434.318.800.830,00. Realisasi DAK terdiri dari realisasi DAK Fisik senilai Rp227.297.754.773,00 dan realisasi DAK Non Fisik senilai Rp175.643.923.583,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp196.127.007.493,00 atau 32,74% dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp599.068.685.849,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah	42.863.133.000,00	16.441.664.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah TA 2022 senilai Rp42.863.133.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp26.421.469.000,00 atau 160,70 % dibandingkan realisasi TA 2021.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.062.209.100,00	7.191.926.605,82

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 senilai Rp2.062.209.100,00 atau 153,67% dari anggaran senilai Rp1.342.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp5.129.717.505,82 atau 71,33% dibandingkan realisasi TA 2021. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Hibah	1.342.000.000,00	2.062.209.100,00	720.209.100,00	153,67	7.165.293.605,82
Pendapatan Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.342.000.000,00	2.062.209.100,00	720.209.100,00	153,67	7.191.926.605,82

**TA 2022
(Rp)**

**TA 2021
(Rp)**

2.062.209.100,00

7.165.293.605,82

7.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2022 senilai Rp2.062.209.100,00 atau 153,67% dari anggaran senilai Rp1.342.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp5.103.084.505,82 atau 71,22% dibandingkan realisasi TA 2021. Anggaran dan realisasi pendapatan hibah TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.546.434,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	1.342.000.000,00	347.040.000,00	(994.960.000,00)	25,86	4.045.591.771,82
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	0,00	1.715.169.100,00	1.715.169.100,00	100	958.155.400,00
Jumlah Pendapatan Hibah	1.342.000.000,00	2.062.209.100,00	720.209.100,00	153,67	7.165.293.605,82

**TA 2022
(Rp)**

**TA 2021
(Rp)**

0,00

26.633.000,00

7.5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pada TA 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan Lainnya, sedangkan pada TA 2021 terdapat realisasi senilai Rp26.633.000,00.

**TA 2022
(Rp)**

**TA 2021
(Rp)**

7.5.1.1. Belanja dan Transfer

2.089.718.217.226,29

1.986.339.100.172,19

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja dan Transfer Daerah TA 2022 dianggarkan senilai Rp2.206.584.328.498,00 dengan realisasi senilai Rp2.089.718.217.226,29 atau 94,70% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dibanding TA 2021, realisasi Belanja dan Transfer meningkat senilai Rp103.379.117.054,10 atau 5,2%. Adapun rincian Belanja dan Transfer ditunjukkan pada Tabel 31.

Tabel 31. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.380.479.772.308,00	1.315.943.743.498,29	(64.536.028.809,71)	95,33	1.410.391.991.232,77
Belanja Modal	599.493.986.273,00	547.546.846.841,00	(51.947.139.432,00)	91,33	402.867.597.767,42
Belanja Tak Terduga	1.580.215.924,00	1.323.158.559,00	(257.057.365,00)	83,73	2.647.108.868,00
Transfer	225.030.353.993,00	224.904.468.328,00	(125.885.665,00)	99,94	170.432.402.304,00
Jumlah Belanja dan Transfer	2.206.584.328.498,00	2.089.718.217.226,29	(116.866.111.271,71)	94,70	1.986.339.100.172,19

Dari tabel belanja dan transfer dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada belanja dan transfer mencapai 94,70% dari anggaran.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.1 Belanja Operasi	1.315.943.743.498,29	1.410.391.991.232,77

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah senilai Rp1.315.943.743.498,29 atau 95,33% dari anggaran senilai Rp1.380.479.772.308,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp64.536.028.809,71 atau 4,67% dibandingkan TA 2021. Rincian Belanja Operasi ditunjukkan dalam Tabel 32.

Tabel 32. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	628.157.169.791,00	606.681.872.761,29	(21.475.297.029,71)	96,58	563.347.419.213,13
Belanja Barang dan Jasa	668.024.447.607,00	628.999.130.965,00	(39.025.316.642,00)	94,16	580.768.512.777,64
Belanja Bunga	24.894.625.310,00	24.890.208.737,00	(4.416.573,00)	99,98	13.414.036.710,00
Belanja Hibah	57.769.529.600,00	53.762.531.035,00	(4.006.998.565,00)	93,06	250.372.022.532,00
Belanja Bantuan Sosial	1.634.000.000,00	1.610.000.000,00	(24.000.000,00)	98,53	2.490.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	1.380.479.772.308,00	1.315.943.743.498,29	(64.536.028.809,71)	95,33	1.410.391.991.232,77

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	606.681.872.761,29	563.347.419.213,13

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 senilai Rp606.681.872.761,29 atau 96,58% dari anggaran senilai Rp628.157.169.791,00. Realisasi belanja pegawai TA 2022 tersebut meningkat

Rp43.334.453.548,16 atau 7,69% dibandingkan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 yang senilai Rp563.347.419.213,13 Adapun rincian Belanja Pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	399.592.815.956,00	389.126.758.397,00	(10.466.057.559,00)	97,38	354.732.067.179,30
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	99.695.525.343,00	96.425.259.392,29	(3.270.265.950,71)	96,72	104.926.155.819,83
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.201.600.000,00	1.201.288.050,00	(311.950,00)	99,97	1.201.600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.468.414.628,00	97.953.820.473,00	(7.514.594.155,00)	92,88	75.782.094.005,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.959.193.947,00	21.833.032.404,00	(126.161.543,00)	99,43	21.816.825.762,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	239.619.917,00	141.714.045,00	(97.905.872,00)	59,14	229.662.206,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.014.241,00
Jumlah Belanja Pegawai	628.157.169.791,00	606.681.872.761,29	(21.475.297.029,71)	96,58	563.347.419.213,13

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja pegawai mencapai 96,58% dari anggaran.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	628.999.130.965,00	580.768.512.777,64

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 senilai Rp628.999.130.965,00 sedangkan TA 2021 senilai Rp580.768.512.777,64. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 terjadi peningkatan senilai Rp48.230.618.187,36 atau 8,3%. Adapun rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022				2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	224.761.167.182,00	209.664.048.552,00	(15.097.118.630,00)	93,28	169.410.120.900,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	131.292.447.742,00	123.724.624.563,00	(7.567.823.179,00)	94,24	115.443.051.796,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.485.912.352,00	14.290.746.872,00	(195.165.480,00)	98,65	17.504.269.285,00
Belanja Sewa Tanah	55.500.000,00	51.500.000,00	(4.000.000,00)	92,79	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.535.681.100,00	3.391.081.999,00	(144.599.101,00)	95,91	2.572.794.345
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.949.816.000,00	1.872.049.520,00	(77.766.480,00)	96,01	1.329.631.889,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Uraian	2022				2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	108.500.000,00	107.000.000,00	(1.500.000,00)	98,62	124.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.981.900.000,00	4.799.563.499,00	(182.336.501,00)	96,34	2.535.572.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.115.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	539.110.000,00	532.212.000,00	(6.898.000,00)	98,72	947.910.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.942.251.146,00	3.824.707.493,00	(117.543.653,00)	97,02	2.314.633.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.374.843.101,00	14.203.810.063,00	(171.033.038,00)	98,81	17.168.741.043,24
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.024.103.800,00	6.711.649.496,00	(312.454.304,00)	95,55	7.962.058.363,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.937.005.111,00	1.692.384.957,00	(244.620.154,00)	87,37	4.008.268.199,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	736.460.500,00	585.935.000,00	(150.525.500,00)	79,56	687.509.700,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.032.983.411,00	115.406.392.772,00	(5.626.590.639,00)	95,35	111.253.335.457,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.766.000.000,00	2.734.200.000,00	(31.800.000,00)	98,85	2.212.840.800,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	2.018.797.750,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	83.246.913.559,00	82.154.409.462,00	(1.092.504.097,00)	98,69	105.593.386.190,40
Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.992.852.603,00	42.991.814.717,00	(8.001.037.886,00)	84,31	17.653.976.860,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	668.024.447.607,00	628.999.130.965,00	(39.025.316.642,00)	94,16	580.768.512.777,64

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai 94,16% dari anggaran.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga	24.890.208.737,00	13.414.036.710,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2022 adalah senilai Rp24.890.208.737,00 sedangkan TA 2021 adalah senilai Rp13.414.036.710,00 terjadi kenaikan senilai Rp11.476.172.027,00 atau 85,55%. Belanja Bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas utang pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mendanai pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 35. Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Bunga Pinjaman PIP-RSUD	7.982.917.172,00
2.	Pembayaran Bunga Pinjaman PEN 2021	13.574.159.965,00
3.	Pembayaran Biaya Pengelolaan Rekening Pinjaman PEN Tahun 2021	3.207.438.767,00
4.	Pembayaran Biaya Pengelolaan Rekening Pinjaman PEN Tahun 2020	125.692.833,00
	Jumlah	24.890.208.737,00

7.5.1.2.1.4. Belanja Hibah

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
53.762.531.035,00	250.372.022.532,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah senilai Rp53.762.531.035,00 sedangkan TA2021 adalah senilai Rp250.372.022.532,00 turun senilai Rp196.609.491.497,00 atau 78,53%. Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.249.600,00	1.074.249.600,00	0,00	100,00	1.074.249.600,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	37.656.490.000,00	36.397.136.434,00	-1.259.353.566,00	96,66	247.297.772.932,00
Belanja Hibah Dana BOS	19.038.790.000,00	16.291.145.001,00	-2.747.644.999,00	85,57	0,00
Jumlah Belanja Hibah	57.769.529.600,00	53.762.531.035,00	(4.006.998.565,00)	93,06	250.372.022.532,00

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja hibah mencapai 93,06% dari anggaran.

7.5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.610.000.000,00	2.490.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah senilai Rp1.610.000.000,00 dari pagu anggaran Rp1.634.000.000,00 atau senilai 98,53% sedangkan TA 2021 adalah senilai Rp2.490.000.000,00 terjadi penurunan senilai Rp880.000.000,00 atau 35,34%.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
547.546.846.841,00	402.867.597.767,42

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2022 senilai Rp547.546.846.841,00 atau sebesar 91,33% dari pagu anggaran senilai Rp599.493.986.273,00

Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp144.679.249.073,58 atau 35,91% dari TA 2021 senilai Rp402.867.597.767,42. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah	20.359.144.250,00	17.898.298.672,00	(2.460.845.578,00)	87,91	17.216.728.495,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.772.889.241,00	91.589.673.273,00	(19.183.215.968,00)	82,68	81.862.366.936,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.272.231.755,00	131.955.470.775,00	(9.316.760.980,00)	93,41	117.850.474.145,08
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	291.703.859.630,00	272.994.673.862,00	(18.709.185.768,00)	93,59	142.351.267.113,34
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.385.861.397,00	33.108.730.259,00	(2.277.131.138,00)	93,56	43.586.761.078,00
Jumlah Belanja Modal	599.493.986.273,00	547.546.846.841,00	(51.947.139.432,00)	91,33	402.867.597.767,42

Adapun rincian belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah	17.898.298.672,00	17.216.728.495,00

Realisasi Belanja Modal berupa Tanah TA 2022 adalah senilai Rp17.898.298.672,00 atau 87,91% dari anggaran senilai Rp20.359.144.250,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal – Tanah TA 2021, senilai Rp17.216.728.495,00, terjadi peningkatan senilai Rp681.570.177,00 atau 3,96%. Belanja Modal – Tanah TA 2022 diperuntukkan:

- Belanja Modal Tanah Persil	Rp	17.898.298.672,00
- Belanja Modal Lapangan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	17.898.298.672,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	91.589.673.273,00	81.862.366.936,00

Realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan Mesin TA 2022 senilai Rp91.589.673.273,00 atau 82,68% dari anggaran senilai Rp110.772.889.241,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin TA 2021, yaitu senilai Rp81.862.366.936,00, terjadi peningkatan senilai Rp9.727.306.337,00 atau 11,88%, Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2022 diperuntukkan:

- Belanja Modal Alat Besar Darat	Rp	17.124.402.657,00
- Belanja Modal Alat Bantu	Rp	59.470.000,00
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	11.999.668.048,00
- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	Rp	110.000.000,00
- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Rp	647.975.000,00
- Belanja Modal Alat Ukur	Rp	165.484.500,00

- Belanja Modal Alat Pengolahan	Rp	992.273.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor	Rp	2.623.624.331,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp	3.827.894.774,00
- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp	211.473.195,00
- Belanja Modal Alat Studio	Rp	1.180.669.048,00
- Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp	532.417.380,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp	665.338.200,00
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Rp	464.401.800,00
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	Rp	2.877.455.886,00
- Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah	Rp	40.398.517.626,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	79.255.000,00
- Belanja Modal Komputer Unit	Rp	5.316.766.096,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp	1.276.717.330,00
- Belanja Modal Sumur	Rp	104.450.000,00
- Belanja Modal Alat Pelindung	Rp	104.265.000,00
- Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Rp	11.672.737,00
- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp	197.970.190,00
- Belanja Modal Peralatan Olahraga	Rp	196.900.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp	420.611.475,00
Jumlah	Rp	91.589.673.273,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.2.3. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	131.955.470.775,00	117.850.474.145,08

Realisasi Belanja Modal berupa Gedung dan Bangunan TA 2022 senilai Rp131.955.470.775,00 atau 93,41% dari anggaran senilai Rp141.272.231.755,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2021, yaitu senilai Rp117.850.474.145,08, terjadi kenaikan senilai Rp14.104.996.629,92 atau 11,97%. Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2022 diperuntukan:

- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	120.027.270.451,00
- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	9.717.631.000,00
- Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana	Rp	2.210.569.324,00
Jumlah	Rp	131.955.470.775,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.2.4. Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan	272.994.673.862,00	142.351.267.113,34

Realisasi Belanja Modal berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 senilai Rp272.994.673.862,00 atau 93,59% dari anggaran senilai Rp291.703.859.630,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021, yaitu senilai

Rp142.351.267.113,34, terjadi peningkatan senilai Rp130.643.406.748,66 atau 91,78%. Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 diperuntukkan:

- Belanja Modal Jalan	Rp	245.254.602.973,00
- Belanja Modal Jembatan	Rp	2.021.017.050,00
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp	8.300.415.385,00
- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp	1.376.004.810,00
- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp	1.003.674.100,00
- Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	Rp	28.471.500,00
- Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp	11.905.162.607,00
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp	3.084.285.387,00
- Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp	21.040.050,00
Jumlah	Rp	272.994.673.862,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.2.5. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya	33.108.730.259,00	43.586.761.078,00

Realisasi Belanja Modal berupa Aset Tetap Lainnya TA 2022 senilai Rp33.108.730.259,00 atau 93,56% dari anggaran senilai Rp35.385.861.397,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya TA 2021, yaitu senilai Rp43.586.761.078,00, terjadi penurunan senilai Rp10.478.030.819,00 atau 24,04%. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya TA 2022 diperuntukkan:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp	983.754.000,00
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp	364.694.119,00
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Rp	47.955.700,00
- Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	26.757.088.880,00
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	4.605.420.510,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp	349.817.050,00
Jumlah	Rp	33.108.730.259,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	1.323.158.559,00	2.647.108.868,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 senilai Rp1.323.158.559,00 atau 83,73% dari yang dianggarkan senilai Rp1.580.215.924,00. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 lebih rendah senilai Rp1.323.950.309,00 atau 50,01% dari realisasi TA 2021 senilai Rp2.647.108.868,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.2.4 Transfer	224.904.468.328,00	170.432.402.304,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Transfer TA 2022 senilai Rp224.904.468.328,00 atau sebesar 99,94% dari anggaran senilai Rp225.030.353.993,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp54.472.066.024,00 atau 31,96% dibanding realisasi TA 2021 senilai Rp170.432.402.304,00. Rincian Belanja Transfer ke Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer ke Kabupaten TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	190.619.089.493,00	190.619.089.493,00	0,00	100,00	161.832.402.304,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa	34.411.264.500,00	34.285.378.835,00	(125.885.665,00)	99,63	8.600.000.000,00
Jumlah Belanja Transfer	225.030.353.993,00	224.904.468.328,00	(125.885.665,00)	99,94	170.432.402.304,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.3. Surplus/Defisit	(195.099.421.891,90)	38.331.975.614,22

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada TA 2022 terdapat defisit senilai (195.099.421.891,90) sedangkan TA 2021 terdapat surplus senilai Rp38.331.975.614,22. Perhitungan surplus/defisit TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan	1.896.276.561.452,00	1.894.618.795.334,39	(1.657.766.117,61)	99,91	2.024.671.075.786,41
Belanja Dan Transfer	2.206.584.328.498,00	2.089.718.217.226,29	(116.866.111.271,71)	94,70	1.986.339.100.172,19
Surplus / (Defisit)	(310.307.767.046,00)	(195.099.421.891,90)	115.208.345.154,10	62,87	38.331.975.614,22

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.3.1. Pembiayaan Netto	312.023.875.190,74	131.967.673.987,52

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Pembiayaan netto TA 2022 senilai Rp312.023.875.190,74 sedangkan TA 2021 senilai Rp131.967.673.987,52. Pembiayaan netto TA 2022 mengalami peningkatan senilai Rp180.056.201.203,22 atau 136,44% dibanding pembiayaan

netto TA 2021. Anggaran Pembiayaan netto ditetapkan dalam APBD TA 2022 senilai Rp310.307.767.046,00. Realisasi pembiayaan netto TA 2022 mencapai 100,55% dari anggaran. Rincian dan perhitungan pembiayaan netto TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 40

Tabel 40. Daftar Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	365.969.587.736,00	365.969.587.736,74	0,74	100,00	178.192.697.843,52
Pengeluaran Pembiayaan	55.661.820.690,00	53.945.712.546,00	(1.716.108.144,00)	96,92	46.225.023.856,00
Pembiayaan Netto	310.307.767.046,00	312.023.875.190,74	1.716.108.144,74	100,55	131.967.673.987,52

7.5.1.3.1.1. Penerimaan Pembiayaan

365.969.587.736,74

178.192.697.843,52

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan TA 2022 senilai Rp365.969.587.736,74 sedangkan TA 2021 senilai Rp178.192.697.843,52. Penerimaan Pembiayaan TA 2022 mengalami peningkatan senilai Rp187.776.889.893,22 atau 105,38% dibanding penerimaan pembiayaan TA 2021. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan dalam APBD TA 2022 senilai Rp365.969.587.736,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp365.969.587.736,74 mencapai 100,00%. Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2022 ditunjukkan dalam Tabel 41.

Tabel 41 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022				Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	
Penggunaan SILPA	170.299.649.601,00	170.299.649.601,74	0,74%	100,00%	103.192.697.843,52
Pinjaman Dalam Negeri	195.669.938.135,00	195.669.938.135,00	0,00%	100,00%	75.000.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan	365.969.587.736,00	365.969.587.736,74	0,74%	100,00%	178.192.697.843,52

Penerimaan Pembiayaan berupa Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp195.669.938.135,00 berasal dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-129/SMI/0821 tanggal 15 Tahun 2021 dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

7.5.1.3.1.2. Pengeluaran Pembiayaan

53.945.712.546,00

46.225.023.856,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 senilai Rp53.945.712.546,00 sedangkan TA 2021 senilai Rp46.225.023.856,00, dengan rincian ditunjukkan dalam Tabel 42.

Tabel 42. Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1.	Pembayaran Pokok Pinjaman atas Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	46.225.023.856,00
2.	Pembayaran Pokok PEN	7.720.688.690,00
	Jumlah	53.945.712.546,00

- Pada Tahun 2022 dilakukan pembayaran pokok pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp46.225.023.856,00 sesuai dengan:
 - SP2D Nomor 34.00/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.01/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 senilai Rp11.556.255.964,00;
 - SP2D Nomor 34.00/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.03/05/2022, tanggal 20 Mei 2022 senilai Rp11.556.255.964,00;
 - SP2D Nomor 34.00/04.0/000003/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.07/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 senilai Rp11.556.255.964,00 ;dan
 - SP2D Nomor 34.00/04.0/000004/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.11/11/2022, tanggal 24 November 2022 senilai Rp11.556.255.964,00;
- Terdapat Pemotongan DAU senilai Rp7.720.688.690,00 Sesuai Ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-140/SMI/1020 Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020, bahwa Pembayaran Kembali Pokok dan Bunga dilakukan dengan cara di perhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam PMK Pinjaman PEN Daerah.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	116.924.453.298,84	170.299.649.601,74

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Realisasi SiLPA TA 2022 senilai Rp116.924.453.298,84 mengalami penurunan senilai Rp53.375.196.302,90 atau 31,34% dibanding SiLPA TA 2021. Perhitungan SiLPA TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Rincian SiLPA TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Pendapatan (A)	1.894.618.795.334,39	2.024.671.075.786,41
Belanja dan Transfer (B)	2.089.718.217.226,29	1.986.339.100.172,19
Surplus/(Defisit) (C) = (A - B)	(195.099.421.891,90)	38.331.975.614,22
Pembiayaan Netto (D)	312.023.875.190,74	131.967.673.987,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (E) = (C+D)	116.924.453.298,84	170.299.649.601,74

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tujuan kebijakan akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian LPSAL untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian LPSAL yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual untuk entitas pelaporan.

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Adapun perbandingan LPSAL per 31 Desember 2022 dengan LPSAL tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	170.299.649.601,74	103.192.697.843,52

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 senilai Rp170.299.649.601,74 dan TA 2021 senilai Rp103.192.697.843,52.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	170.299.649.601,74	103.192.697.843,52

Sampai dengan 31 Desember 2022, SAL yang digunakan sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp170.299.649.601,74, sedangkan SAL yang digunakan sebagai penerimaan tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp103.192.697.843,52.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	116.924.453.298,84	170.299.649.601,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 senilai Rp116.924.453.298,8484 sedangkan Tahun 2021 senilai Rp170.299.649.601,74 dapat diuraikan sebagai berikut:

	<u>SiLPA 2022 (Rp)</u>	<u>SiLPA 2021 (Rp)</u>
Surplus/Defisit Anggaran	(195.099.421.891,90)	38.331.975.614,22
Pembiayaan Netto	312.023.875.190,74	131.967.673.987,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	116.924.453.298,84	170.299.649.601,74

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir	116.924.453.298,8484	170.299.649.601,74

Sampai dengan berakhirnya TA 2022 Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah senilai Rp116.924.453.298,8484 sedangkan untuk TA 2021 adalah senilai Rp170.299.649.601,74.

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1. Aset	3.343.152.636.287,71	3.149.095.572.686,31

Saldo Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp3.343.152.636.287,71 dan Rp3.149.095.572.686,31 atau naik 6,16% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 44. Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Aset Lancar	183.457.037.851,26	211.058.179.593,10
2.	Investasi Jangka Panjang	70.274.776.128,00	46.580.712.790,00
3.	Aset Tetap	2.986.112.145.870,31	2.823.955.099.079,73
4.	Aset Lainnya	103.308.676.438,14	67.501.581.223,48
	Jumlah	3.343.152.636.287,71	3.149.095.572.686,31

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1. Aset Lancar	183.457.037.851,26	211.058.179.593,10

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	102.018.271.777,95	149.474.640.597,14
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	961.851.446,89	62.708.240,60
4.	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	121.425.084,00	110.669.495,00
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS	59.530.974,00	767.491.779,00
6.	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	14.439.677.645,00	19.774.314.181,00
7.	Kas Lainnya	2.806.779.137,80	0,00
8.	Beban Dibayar Dimuka	4.351.240.650,83	101.359.954,36
9.	Piutang Lainnya	1.873.372.869,96	2.080.662.653,00
10.	Persediaan	56.824.888.264,83	38.686.305.693,00
	Jumlah	183.457.037.851,26	211.058.179.593,10

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.1. Kas di Kasda	102.018.271.777,95	149.474.640.597,14

Saldo kas tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Per 31 Desember 2022 yang berada di rekening kas daerah sesuai Buku Kas Umum (BKU) Kas Daerah (Kasda) senilai Rp102.018.271.777,95 atau turun senilai Rp47.456.368.819,19 atau 31,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp149.474.640.597,14. Rincian saldo kas di rekening giro kas daerah dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Rincian Kas di Kasda per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	BPD Sulselbar Mamuju	071.001.000008776-6	Rekening Kasda Prov. Sulbar	92.143.299.793,72	143.029.131.634,12
2.	BPD Sulselbar Mamuju	071.001.000010480-6	Pend. Asli Daerah Sulbar	8.338.453.984,23	3.583.707.292,02
3.	BPD Sulselbar Mamuju	071-001-000100103-2	Dana BOS Prov. Sulbar	536.518.000,00	2.861.801.671,00
	Jumlah			102.018.271.777,95	149.474.640.597,14

Adapun rincian penjelasan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp27.000,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47. Rincian Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	BPKPD	0,00	27.000,00
	Jumlah	0,00	27.000,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran	961.851.446,89	62.708.240,60

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp961.851.446,89 atau naik senilai 1.433,85% dibanding saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp62.708.240,60, dengan rincian ditunjukkan dalam Tabel 48.

Tabel 48. Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Sisa Dana DAK Swakelola	19.872.307,89	62.708.240,60
	Dana PFK DAK	687.882.801,98	0,00
2.	Dinas Pencatatan Sipil		
	Sisa UP	130.982.160,00	0,00
	Utang PFK	26.005.611,00	0,00
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Sisa UP	93.280.539,00	0,00
	Utang PFK	159.068,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Utang PFK	914.275,02	0,00
5.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM		
	Utang PFK	1.126.126,00	0,00
6.	Dinas Transmigrasi		
	Utang PFK	1.132.072,00	0,00
7.	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		
	Utang PFK	496.486,00	0,00
	Jumlah	961.851.446,89	62.708.240,60

Adapun rincian penjelasan sisa dana DAK swakelola dan Dana PFK DAK secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.4. Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	121.425.084,00	110.669.495,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas di Bendahara JKN pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp121.425.084,00 dan terjadi kenaikan senilai Rp10.755.589,00 atau 9,72% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp110.669.495,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS	59.530.974,00	767.491.779,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah di Bendahara Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 senilai Rp59.530.974,00 atau turun senilai Rp707.960.805,00 atau 92,24% dibanding saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp767.491.779,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran BOS ditunjukkan pada Tabel 49.

Tabel 49. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Sisa Kas BOS	59.530.974,00	726.013.914,00
2.	PFK Dana BOS	0,00	41.477.865,00
	Jumlah	59.530.974,00	767.491.779,00

Rincian sisa Kas BOS dapat dilihat pada Lampiran 8.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	14.439.677.645,00	19.774.314.181,00

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2020. Saldo kas Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 senilai Rp14.439.677.645,00 atau turun senilai Rp5.334.636.536,00 atau 26,98% dibanding saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp19.774.314.181,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran BLUD senilai Rp14.439.677.645,00 terdiri dari saldo bank senilai Rp13.846.848.098,44 dan saldo kas tunai senilai Rp798.789.929,56.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.7. Kas Lainnya	2.806.779.137,80	0,00

Kas Lainnya merupakan setara kas berupa penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Jaminan Kesungguhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP). Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp2.806.779.137,80, dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 50 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas ESDM	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	1.251.008.469,60	0,00
2.	Dinas PM dan PTSP	Jaminan Kesungguhan	1.555.770.668,20	0,00
	Jumlah		2.806.779.137,80	0,00

Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.8. Beban Dibayar Dimuka	4.351.240.650,83	101.359.954,36

Beban Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang sudah dilakukan perjanjian kerjasama dan melewati batas akhir tahun anggaran (*cut off*) sehingga diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp4.351.240.650,83 atau mengalami

peningkatan sebesar 4.192,86%, dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp101.359.954,36. Secara rinci Beban Dibayar Dimuka dijelaskan dalam Tabel 51.

Tabel 51. Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Inspektorat Daerah	Asuransi Kendaraan	15.709.358,04	13.822.819,95
2.	B P K P D	Sewa Rumah, Gudang/Kantor	87.854.838,71	87.537.634,41
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	DAK Swakelola SMK	4.247.676.454,08	0,00
Jumlah			4.351.240.650,83	101.359.954,36

7.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp1.873.372.869,96. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp2.080.662.653,00, terjadi penurunan senilai Rp207.289.783,04 atau 9,96%. Rincian Piutang Lainnya ditunjukkan dalam Tabel 52.

Tabel 52. Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Uang Muka	1.766.255.800,00	1.766.255.800,00
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	Uang Muka	0,00	254.926.350,00
3.	RSUD BLUD	Jasa Medik	106.643.660,00	58.760.503,00
4.	Dinas Kesehatan Daerah	Jasa Labkesda	0,00	720.000,00
5	BPKPD	Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah	473.409,96	0,00
Jumlah			1.873.372.869,96	2.080.662.653,00

Saldo Piutang Lainnya tersebut merupakan sisa uang muka atas pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutanbung-Urekang Kabupaten Majene, dengan Nomor Perjanjian 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018, tanggal 10 April 2018, atas nama PT SPA, dengan nilai perjanjian senilai Rp8.831.279.000,00. Pada tanggal 5 Juni 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) telah mencairkan uang muka senilai 20%, dengan nilai Rp1.766.255.800,00 dengan SP2D Nomor 01137/SP2D-LS/VI/2018. Namun demikian PT SPA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sehingga pada tanggal 3 September 2018 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas PUPR sesuai dengan surat Nomor 1800-000.001/1656/IX/2018. Atas kejadian tersebut pihak penyedia diwajibkan untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima ke Kas Daerah karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Sampai dengan 31 Desember 2022 PT SPA belum melakukan penyetoran ke kas daerah dan masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Mamuju.

Adapun rincian penjelasan terkait dengan piutang jasa medik pada RSUD BLUD secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.1.10. Persediaan	56.824.888.264,83	38.686.305.693,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp56.824.888.264,83 atau mengalami kenaikan senilai Rp18.138.582.571,83 atau 46,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp38.686.305.693,00. Rincian persediaan terdapat pada Tabel 53.

Tabel 53. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Bahan Kimia	746.743.480,00	613.350.088,00
2.	Bahan Baku	7.784.948.390,00	12.118.634.865,00
3.	Bahan/Bibit Tanaman	857.228.050,00	28.720.000,00
4.	Isi Tabung Gas	0,00	850.000,00
5.	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	239.706.000,00	244.928.915,00
6.	Bahan Lainnya	5.900.000,00	0,00
7.	Alat Tulis Kantor	66.714.930,00	641.374.902,00
8.	Kertas dan Cover	3.799.800,00	129.000,00
9.	Bahan Cetak	699.855.462,00	0,00
10.	Benda Pos	140.000,00	0,00
11.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	29.053.000,00	49.500,00
12.	Obat	25.317.186.660,00	22.005.832.479,80
13.	Obat-obatan Lainnya	9.452.091.916,00	553.217.256,20
14.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	10.570.369.376,83	2.479.218.687,00
15.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berbagai Jaka	1.051.151.200,00	0,00
Total		56.824.888.264,83	38.686.305.693,00

Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 11.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	70.274.776.128,00	46.580.712.790,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp70.274.776.128,00 mengalami kenaikan senilai Rp23.694.063.338,00 atau naik senilai 50,87% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp46.580.712.790,00 dengan rincian pada Tabel 54.

Tabel 54. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00
2.	Penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.274.776.128,00	46.580.712.790,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		70.274.776.128,00	46.580.712.790,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Daerah, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Penjelasan atas mutasi Investasi Non Permanen – Dana Bergulir ditunjukkan pada Tabel 55.

Tabel 55. Mutasi Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2022

No.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.427.575.000,00	0,00	0,00	1.427.575.000,00
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	73.525.000,00	0,00	0,00	73.525.000,00
3.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM	331.349.250,00	0,00	0,00	331.349.250,00
Jumlah		1.832.449.250,00	0,00	0,00	1.832.449.250,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.2.2. Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)

Saldo Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah senilai piutang dana bergulirnya, yaitu senilai (Rp1.832.449.250,00).

Atas ditetapkan kebijakan Akuntansi Nomor 38 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016, maka dilakukan penyesuaian dan perhitungan atas dana bergulir tersebut terhadap nilai yang dapat tertagih dengan kualifikasi lancar, kurang lancar, diragukan tertagih, dan macet. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa dana bergulir dimaksud sudah macet 100% dan telah dibuatkan dalam cadangan penyisihan piutang dana bergulir.

Dari hasil perhitungan dan pengelompokan dana bergulir tersebut dimana sudah 100% masuk dalam kategori macet, dan telah disisihkan 100%, adapun langkah penanganan untuk dana bergulir yang macet tersebut adalah pada tahun 2017 telah dilakukan sidang oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap dana bergulir dan disepakati akan segera dilakukan penghapusan dengan melibatkan semua pihak setelah itu akan diajukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat segera dihapuskan.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.274.776.128,00	46.580.712.790,00

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupa Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar, Perumda Sebuku Energi Malaqbi, dan PT Sulawesi Barat Malaqbi. Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp70.274.776.128,00 mengalami kenaikan Rp23.694.063.338,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp46.580.712.790,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 56. Rincian Investasi Permanen – Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	PT Bank Sulselbar	44.769.000.000,00	44.769.000.000,00
2.	Perumda Sebuku Energi Malaqbi	24.005.776.128,00	311.712.790,00
3.	Perumda Sulawesi Barat Malaqbi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	70.274.776.128,00	46.580.712.790,00

1. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar). Sesuai Perda tersebut ditetapkan nilai penyertaan modal adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada BPD Sulselbar, yang menetapkan besaran nilai penyertaan modal senilai Rp30.000.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun.

Total penyertaan modal ke PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan terhadap investasi permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat) pada Bank Sulselbar. Terdapat deviden lembar sahamnya (RUPS 02 Desember 2021) per tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp4.769.000.000,00 sehingga nilai tersebut diakui sebagai pendapatan dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi. Total investasi per 31 Desember 2022 senilai Rp44.769.000.000,00 atau sebanyak 44.769 lembar saham, dengan nomor rincian sertifikat ditunjukkan dalam Tabel 57 sebagai berikut.

Tabel 57. Rincian Nomor Sertifikat Saham Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Sampai Dengan 31 Desember 2022

No.	Nomor Sertifikat	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Total (Rp)
1.	508.123 s/d 510.122	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	555.435 s/d 557.434	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
3.	604.035 s/d 606.034	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
4.	677.771 s/d 679.770	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
5.	798.671 s/d 800.670	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
6.	874.671 s/d 882.670	8.000	1.000.000,00	8.000.000.000,00
7.	939.661 s/d 949.660	10.000	1.000.000,00	10.000.000.000,00
8.	1.084.411 – 1.096.410	12.000	1.000.000,00	12.000.000.000,00
9.	1.096.410 s/d 1.101.179	4.769	1.000.000,00	4.769.000.000,00
	Jumlah	44.769		44.769.000.000,00

Persentase kepemilikan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar senilai 2,12%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal menggunakan metode biaya.

2. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penyertaan modal tersebut merupakan pemenuhan modal dasar dan modal disetor dalam rangka pendirian Perumda Sebuku Energi Malaqbi untuk memenuhi persyaratan penerimaan penawaran *Participating Interest* 10% (PI) atas Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Pengelola pada Wilayah Kerja Blok Sebuku. Penyertaan Modal kepada Perumda Sebuku Energi Malaqbi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Sebuku Energy Malaqbi, dimana ditetapkan nilai penyertaan modal adalah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetorkan penyertaan modal kepada Perumda Sebuku Energy Malaqbi senilai Rp2.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 03652/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 15 November 2019. Persentase kepemilikan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Perumda Sebuku Energi Malaqbi senilai 100%. Sehingga penyajian nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Tahun 2022 Investasi Permanen Penyertaan Modal-Perumda Sebuku Energy Malaqbi sampai per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp24.005.776.128,00. Nilai tersebut berasal dari penambahan saldo awal senilai Rp311.712.790,00 dengan laba Perumda Sebuku Energy Malaqbi Tahun 2022 senilai Rp27.415.657.284,00 dikurangi koreksi awal ekuitas senilai Rp3.721.593.946,00 sesuai hasil Audit Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3. Pada Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetorkan penyertaan modal kepada Perumda Sulawesi Barat Malaqbi senilai Rp1.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 00818/SP2D-LS/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 ditetapkan bahwa kepengurusan PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) di demisioner. Kemudian atas hasil RUPS tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemegang saham mengeluarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/01/1/2021 tentang Pemberhentian Komisaris PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) pada tanggal 28

Desember 2021, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/02/1/2021 tentang Pemberhentian Direktur Utama dan Direktur Anak-Anak Perusahaan PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) pada tanggal 28 Desember 2021.

Pada tanggal 18 Agustus 2022 dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menetapkan dan mengangkat Komisaris PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) masa jabatan 2022-2026, serta mengangkat Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) masa jabatan 2022-2027.

Hasil RUPS tersebut kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 07 Tanggal 30 September 2022 (Notaris Khadijah Candra Mustafa, SH.).

Pada Tahun 2022 PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) telah menyajikan Laporan Keuangan periode 31 September – 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Masnawaty Sangkala, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CPA.” dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam Laporan Keuangan tersebut menyajikan nilai modal sebesar Rp0,00 dan rugi bersih tahun 2022 senilai Rp3.996.066.441,00. Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Keuangan tersebut.

Terkait pengelolaan dana investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00 oleh manajemen yang lama, saat ini sedang dalam penyidikan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3. Aset Tetap	2.986.112.145.870,31	2.823.955.099.079,73

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap antara lain terdiri dari:

- Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium, mesin dan peralatan persenjataan, dan lain-lain sejenisnya;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi.;
- Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- Aset Tetap Lainnya, meliputi buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya, serta hewan ternak dan tanaman; dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 setelah penyusutan adalah senilai Rp2.986.112.145.870,31 terdiri dari:

*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat T.A 2022*

Tabel 58. Rincian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tanah	485.627.108.776,03	467.504.380.178,30
2.	Peralatan dan Mesin	997.214.943.453,97	919.774.522.490,48
3.	Gedung dan Bangunan	1.615.326.861.288,88	1.555.490.772.712,72
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.664.843.304.609,65	1.308.537.529.344,16
5.	Aset Tetap Lainnya	27.799.312.540,10	25.469.335.515,10
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	59.151.181.184,91	193.108.684.647,77
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.863.850.565.983,23)	(1.645.930.125.608,80)
	Jumlah	2.986.112.145.870,31	2.823.955.099.079,73

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.1. Tanah	485.627.108.776,03	467.504.380.178,30

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp485.627.108.776,03. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.122.728.597,73 atau 3,88% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp467.504.380.178,30.

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	467.504.380.178,30
Penambahan		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	17.898.298.672,00
2. Mutasi Masuk	Rp	630.352.558,73
3. Aset Baru Tercatat	Rp	126.700.000,00
4. Reklasifikasi KIB	Rp	1.080.897.914,73
5. Reklasifikasi dari Barjas	Rp	107.017.376,00
Jumlah	Rp	19.843.266.521,46
Pengurangan		
1. Mutasi Keluar	Rp	630.352.558,73
2. Hibah	Rp	227.891.465,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	732.133.900,00
4. Koreksi	Rp	130.160.000,00
Jumlah	Rp	1.720.537.923,73
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	485.627.108.776,03

Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap tanah adalah sebagai berikut:

1. Penambahan senilai Rp19.843.266.521,46 yang terdiri dari:
 - a) Penambahan dari realisasi Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp17.898.298.672,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
 - b) Mutasi masuk ke Biro Umum senilai Rp630.352.558,73 yang berasal dari:
 - 1) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat senilai Rp455.852.558,73; dan
 - 2) Badan Penghubung Daerah senilai Rp174.500.000,00;
 - c) Aset baru tercatat senilai Rp126.700.000,00 di Dinas Perhubungan Daerah;

- d) Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Tanah senilai Rp1.080.897.914,73 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp455.852.558,73;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp572.715.356,00; dan
 - 3) Dinas Sosial Daerah senilai Rp52.330.000,00.
 - e) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp107.017.376,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
2. Pengurangan senilai Rp1.720.537.923,73 terdiri dari:
- a) Mutasi Keluar dari Badan Penghubung senilai Rp630.352.558,73 terdiri dari :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp455.852.558,73; dan
 - 2) Badan Penghubung Provinsi Rp174.500.000,00;
 - b) Hibah keluar ke Pool Damri Cabang Mamuju senilai Rp227.891.465,00 dari Dinas Perhubungan Daerah;
 - c) Reklasifikasi KIB dari Tanah ke Konstruksi dalam pengerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah berupa Belanja ganti rugi Bangunan di lokasi Kawasan Bandara Tampa Padang pada Dinas Perhubungan Daerah senilai Rp732.133.900,00;
 - d) Koreksi Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp130.160.000,00.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Barat. Sesuai SK tersebut terdapat 28 ruas jalan yang merupakan jalan Provinsi. Dari 28 ruas jalan tersebut, baru enam ruas jalan yang telah dilakukan penilaian tanah di bawah jalan, sedangkan 22 ruas jalan lainnya belum dilakukan penilaian tanah di bawah jalannya. Ruas jalan provinsi yang telah dilakukan penilaian tanah di bawah jalan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 59 Rincian Tanah di Bawah Jalan yang Telah Dinilai

No.	Nama Ruas	KIB A – Tanah (m ²)
1.	Ruas Jalan Batuisi - Batas Toraja	491.040
2.	Lampa (Mapili) - Matangnga	502.480
3.	Matangnga - Keppe	342.100
4.	Salutambung – Urekang	401.060
5.	Urekang - Mambi	204.380
6.	Tikke - Bts Sulteng	104.500
	Jumlah	2.045.560

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	997.214.943.453,97	919.774.522.490,48

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp997.214.943.453,97 tersebut mengalami kenaikan senilai Rp77.440.420.963,49 atau 8,42% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp919.774.522.490,48. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Awal per : 1 Januari 2022 **Rp 919.774.522.490,48**

PENAMBAHAN

1.	Realisasi Belanja Modal	Rp	92.060.154.073,00
2.	Mutasi Masuk SKPD	Rp	1.326.119.459,00
3.	Hibah	Rp	1.923.666.735,00
4.	BOS Reguler	Rp	7.148.522.187,00
5.	Reklasifikasi KIB	Rp	5.265.495.053,00
6.	Reklasifikasi dari Barjas	Rp	259.383.000,00
7.	Banpem	Rp	633.570.000,00
8.	Pembulatan	Rp	0,02

J u m l a h **Rp 108.616.860.507,02**

PENGURANGAN

1.	Mutasi Keluar SKPD	Rp	1.326.119.459,00
2.	Hibah	Rp	5.262.230.000,00
3.	Pembayaran Utang	Rp	121.010.670,00
4.	Penghapusan atas Penjualan	Rp	3.224.063.362,00
5.	Penghapusan Rusak Berat	Rp	1.097.666.299,00
6.	Penghapusan Pasca Gempa	Rp	3.084.732.530,03
7.	Reklasifikasi KIB	Rp	58.888.798,00
8.	Reklasifikasi dari Barjas	Rp	139.167.974,00
9.	Ubah Kondisi	Rp	5.747.730.586,76
10.	Ekstrakomtabel	Rp	4.307.003.366,00
11.	Koreksi Saldo	Rp	6.755.694.123,74
12.	Koreksi Peralatan dan Mesin	Rp	37.150.000,00
13.	Penghapusan	Rp	14.982.375,00

J u m l a h **Rp 31.176.439.543,53**

Saldo per 31 Desember 2022 **Rp 997.214.943.453,97**

Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp997.214.943.453,97 bersumber dari penambahan saldo awal 2022 senilai Rp919.774.522.490,48 ditambah penambahan realisasi peralatan dan mesin tahun 2022 senilai Rp108.616.860.507,02 dikurangi pengurangan peralatan dan mesin senilai Rp31.176.439.543,53 adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

1. Penambahan yang berasal dari Peralatan dan Mesin senilai Rp108.616.860.507,02 terdiri dari:
 - a. Penambahan dari realisasi belanja modal TA 2022 senilai Rp92.060.154.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	NILAI
1	Sekretariat DPRD	3.882.085.200,00
2	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	93.642.930,00
3	Biro Hukum	50.871.300,00
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	91.513.580,00
5	Biro Organisasi	304.499.070,00
6	Biro Umum	6.816.700.784,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	15.416.491.950,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah	859.140.460,00
9	Dinas Perhubungan Daerah	246.699.190,00

NO	NAMA SKPD	NILAI
10	Dinas Kesehatan Daerah	3.586.344.521,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	41.574.377.155,00
12	Dinas Sosial Daerah	657.591.750,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.124.709.200,00
14	Dinas Transmigrasi Daerah	168.258.800,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	640.461.499,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	57.873.440,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah	649.282.200,00
18	Dinas Tenaga Kerja Daerah	394.790.480,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	4.950.860.530,00
20	Dinas Perkebunan Daerah	593.520.268,00
21	Dinas Kehutanan Daerah	395.239.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	543.945.960,00
23	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	62.462.000,00
24	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah	180.497.280,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	115.255.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.316.982.250,00
27	Inspektorat Daerah	984.675.018,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.889.500,00
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	546.800.140,00
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	250.460.200,00
31	Dinas Pariwisata Daerah	215.710.100,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	173.359.800,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	97.076.200,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	93.539.200,00
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	97.378.200,00
36	Badan Penghubung	539.872.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	582.379.420,00
38	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah	470.828.000,00
39	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	368.499.178,00
40	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	891.092.275,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah	1.637.499.045,00
Jumlah		92.060.154.073,00

b. Penambahan dari Mutasi Masuk SKPD senilai Rp1.326.119.459,00 terdiri dari:

- 1) Mutasi Masuk ke Biro Hukum senilai Rp489.329.159,00 yang bersumber dari Biro Organisasi;
- 2) Mutasi masuk ke Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan senilai Rp29.995.000,00 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

- 3) Mutasi masuk ke Biro Organisasi senilai Rp282.000.000,00 dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kendaraan Dinas Roda Empat;
- 4) Mutasi masuk ke Biro Umum senilai Rp66.795.300,00 dari Badan Penghubung Daerah;
- 5) Mutasi masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp135.000.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD);
- 6) Mutasi masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp275.000.000,00 bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- 7) Mutasi masuk ke Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp48.000.000,00 bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- c. Penambahan Hibah dari Pemerintah pusat (BNPB) senilai Rp1.923.666.735,00 terdiri dari:
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp905.850.000,00; dan
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.017.816.735,00;
- d. Penambahan Bos Reguler dan Afiriasi Kinerja senilai Rp7.148.522.187,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dengan rincian Bos Afiriasi Kinerja senilai Rp129.488.000,00 dan Bos Reguler senilai Rp7.019.034.187,00;
- e. Penambahan reklasifikasi KIB ke peralatan mesin dari aset tetap lainnya senilai Rp5.265.495.053,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD senilai Rp199.023.000,00;
 - 2) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat senilai Rp199.776.690,00;
 - 3) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya pada Biro Hukum senilai Rp5.849.700,00;
 - 4) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya pada Biro Organisasi senilai Rp91.735.950,00 ;
 - 5) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya senilai Rp49.905.600,00 pada Biro Umum;
 - 6) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya senilai Rp5.849.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - 7) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin dari aset tetap lainnya senilai Rp98.645.700,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 8) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp4.424.585.631,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah bersumber dari Gedung dan Bangunan senilai Rp3.820.295.074,00 ditambah reklasifikasi dari aset tetap lainnya senilai Rp604.290.557,00;
 - 9) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp5.842.300,00 pada Dinas Sosial Daerah;
 - 10) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp5.801.999,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
 - 11) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp49.950.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
 - 12) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp8.369.400,00 pada Dinas Perkebunan Daerah;
 - 13) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin senilai Rp24.832.500,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 14) Reklasifikasi dari Gedung Bangunan ke peralatan dan mesin senilai Rp90.269.413,00 pada Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - 15) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin senilai Rp5.057.470,00 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

- f. Penambahan reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke peralatan dan mesin senilai Rp259.333.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan rincian pekerjaan partisi BPKPD senilai Rp201.633.000,02 ditambah meja resepsionis Samsat Mamuju Utara senilai Rp57.700.000,00;
 - g. Penambahan Bantuan Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp633.570.000,00; dan
 - h. Penambahan Pembulatan senilai Rp0,02.
2. Pengurangan dari peralatan dan mesin senilai Rp 31.176.439.543,53 terdiri dari :
- a. Pengurangan dari Mutasi Keluar SKPD senilai Rp1.326.119.459,00 terdiri dari:
 - 1) Peralatan dan mesin dari Biro Organisasi senilai Rp489.329.159,00 dimutasikan ke Biro Hukum;
 - 2) Peralatan dan mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah senilai Rp77.995.000,00 dimutasikan ke SKPD sebagai berikut:
 - a) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berupa AC Split Tahun 2016 senilai Rp29.995.000,00; dan
 - b) Badan Kepegawaian Daerah berupa AC Split Tahun 2017 senilai Rp48.000.000,00;
 - 3) Peralatan mesin dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp410.000.000,00 dimutasikan ke SKPD sebagai berikut:
 - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp275.000.000,00; dan
 - b) Rumah Sakit Umum daerah senilai Rp135.000.000,00;
 - 4) Peralatan mesin dari Badan Penghubung Daerah senilai Rp66.795.300,00 yang dimutasikan ke Biro Umum; dan
 - 5) Peralatan mesin dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp282.000.000,00 yang dimutasikan ke Biro Umum;
 - b. Pengurangan Mutasi dari hibah senilai Rp 5.262.230.000,00 terdiri dari :
 - 1) Dinas Kesehatan Daerah senilai Rp5.182.310.000,00; dan
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp79.920.000,00;
 - c. Pengurangan pembayaran utang senilai Rp121.010.670,00 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Pengurangan Penghapusan atas Penjualan senilai Rp3.224.063.362,00 terdiri dari:
 - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp1.059.021.000,00;
 - 2) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat senilai Rp179.120.000,00;
 - 3) Sekretariat Daerah senilai Rp178.717.362,00;
 - 4) Biro Umum senilai Rp1.054.830.000,00;
 - 5) Dinas Transmigrasi Daerah senilai Rp135.000.000,00;
 - 6) Inspektorat Daerah senilai Rp287.375.000,00;
 - 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp190.000.000,00; dan
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup Daerah senilai Rp140.000.000,00;
 - e. Pengurangan Penghapusan Barang Rusak Berat senilai Rp1.097.666.299,00 terdiri dari:
 - 1) Biro Umum senilai Rp424.499.999,00; dan
 - 2) Dinas Kehutanan Daerah senilai Rp673.166.300,00;
 - f. Pengurangan Penghapusan Pasca Gempa senilai Rp3.084.732.530,03 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp1.924.842.059,03;
 - 2) Dinas Transmigrasi Daerah senilai Rp158.092.500,00;
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp 98.535.200,00; dan
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp 903.262.771,00;
 - g. Pengurangan Penghapusan Pasca Gempa senilai Rp14.982.375,00 pada Sekretariat DPRD;

- h. Pengurangan peralatan mesin dari reklasifikasi KIB senilai Rp58.888.798,00 terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah senilai Rp5.000.000,00 dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp53.888.798,00;
- i. Pengurangan reklasifikasi dari peralatan mesin ke barang dan jasa senilai Rp139.167.974,00 terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp37.500.000,00;
 - 2) Biro Organisasi terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp2.386.500,00;
 - 3) Biro Umum terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp30.414.000,00 berupa pipa air dan pembuatan sumur bor;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp2.796.500,00 berupa Alat Tulis Kantor;
 - 5) Dinas Perhubungan Daerah terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp7.193.000,00 berupa perjalanan dinas;
 - 6) Dinas Kesehatan Daerah terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp7.663.800,00 berupa pembelian kabel;
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp8.788.500,00 terdiri dari BLUD senilai Rp355.000,00 berupa Belanja Perkakas dan APBD senilai Rp8.433.500,00;
 - 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp24.326.500,00 berupa Reklas dana Bos ke Barang dan Jasa;
 - 9) Dinas Transmigrasi Daerah terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp3.774.000,00 berupa pembelian kabel UTP;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp3.341.000,00;
 - 11) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp3.584.570,00;
 - 12) Dinas Perkebunan Daerah terdapat pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp3.792.104,00 dengan rincian pembelian kabel UTP senilai Rp3.726.104,00 ditambah *aluminium foil* senilai Rp66.000; dan
 - 13) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp3.607.500,00 berupa pembelian kabel UTP;
- j. Pengurangan dari peralatan mesin dengan adanya ubah kondisi senilai Rp5.747.730.586,76 dari beberapa SKPD antara lain:
- 1) Biro Hukum terdapat pengurangan dari ubah kondisi dengan nilai sebelumnya Rp120.709.561 dikurangi ekstra senilai Rp5.207.380,00 sehingga berkurang senilai Rp115.502.181,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp50.802.500,00;
 - 3) Dinas Kesehatan Daerah senilai Rp607.585.974,00;
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp39.820.000,00;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah senilai Rp304.190.185,00;
 - 6) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Daerah senilai Rp37.418.266,00;
 - 7) Dinas Kehutanan Daerah senilai Rp20.075.000,00;
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah senilai Rp246.600.000,00;
 - 9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah senilai Rp344.267.735,00;
 - 10) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp829.462.242,55;
 - 11) Inspektorat Daerah senilai Rp1.144.902.020,19;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup Daerah senilai Rp69.881.049,00;
 - 13) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp565.273.434,02;
 - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah senilai Rp327.500.000,00; dan
 - 15) Sekretariat DPRD senilai Rp1.044.450.000,00;

k. Pengurangan dari peralatan mesin dengan adanya Ekstrakomtabel senilai Rp4.307.003.366,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat DPRD senilai Rp48.900.000,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp1.745.420,00;
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp3.470.800,00;
- 4) Dinas Kesehatan Daerah senilai Rp16.098.000,00;
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp6.113.430,00;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp17.465.000,00;
- 7) Dinas Transmigrasi Daerah senilai Rp999.000,00 berupa kursi staf;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah senilai Rp1.350.000,00;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah senilai Rp455.100,00;
- 10) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Daerah senilai Rp1.517.660,00;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah senilai Rp3.771.780,00;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup Daerah senilai Rp1.765.400,00;
- 13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah senilai Rp22.254.390,00; dan
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah senilai Rp932.400,00; dan
- 15) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.180.164.986,00;

l. Adanya koreksi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp37.150.000,00 terdiri dari:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah senilai Rp13.900.000,00 berupa koreksi Pembelian;
- 2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah senilai Rp9.750.000,00; dan
- 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp13.500.000,00;

m. Adanya koreksi saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp6.755.694.123,74 terdiri dari:

- 1) Sekretariat DPRD senilai Rp74.070.000,00 berupa koreksi kurang Intra ke Ekstra dari Peralatan dan Mesin;
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp450.000,00 berupa Koreksi Intra ke Ekstra dari Peralatan dan Mesin;
- 3) Dinas Kesehatan Daerah senilai Rp10.375.000,00 berupa koreksi kurang Intra ke Ekstra dari Peralatan dan Mesin;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.200.000,00 berupa koreksi kurang Intra ke Ekstra dari Peralatan dan Mesin;
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp6.604.660.067,74 berupa Koreksi Utang TA2021 karena fisik tidak ada senilai Rp749.607.010,00, koreksi penyesuaian koma 0,02 ditambah adanya intra ke ekstra senilai Rp66.285.084,00 dan ubah kondisi senilai Rp5.788.767.973,72;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.680.000,00;
- 7) Dinas Tenaga Kerja Daerah senilai Rp24.915.000,00;
- 8) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah senilai Rp16.242.188,00;
- 9) Dinas Perkebunan Daerah senilai Rp1.524.500,00;
- 10) Dinas Kehutanan Daerah senilai Rp15.262.568,00;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah senilai Rp420.000,00;
- 12) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Daerah senilai Rp739.800,00;
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp1.600.000,00; dan
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah senilai Rp2.555.000,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	1.615.326.861.288,88	1.555.490.772.712,72

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.615.326.861.288,88. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp59.836.088.576,16 atau 3,85% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp1.555.490.772.712,72. Rincian mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	1.555.490.772.712,72
PENAMBAHAN		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	131.955.470.775,00
2. Mutasi Masuk SKPD	Rp	2.945.611.350,00
3. Reklasifikasi masuk KIB	Rp	79.264.312.315,60
4. Utang	Rp	245.435.231,00
J u m l a h	Rp	214.410.829.671,60
PENGURANGAN		
1. Mutasi Keluar SKPD	Rp	2.595.794.300,00
2. Pembayaran Utang	Rp	4.179.273.567,60
3. Penghapusan Pasca Gempa	Rp	22.102.794.315,00
4. Penghapusan	Rp	2.996.159.069,02
5. Reklasifikasi Keluar KIB	Rp	33.768.228.702,65
6. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	7.583.958.963,00
7. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Rp	4.247.676.453,08
8. Koreksi Saldo	Rp	257.184.213,16
9. Ubah Kondisi	Rp	75.192.294.510,98
10. Koreksi Saldo Gedung dan Bangunan	Rp	1.651.377.000,00
11. Koreksi Pembufatan	Rp	0,95
J u m l a h	Rp	154.574.741.095,44
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.615.326.861.288,88

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.615.326.861.288,88 bersumber dari penambahan saldo awal 2022 senilai Rp1.555.490.772.712,72 ditambah penambahan realisasi gedung dan bangunan tahun 2022 senilai Rp214.410.829.671,60 dikurangi pengurangan gedung dan bangunan senilai Rp154.574.741.095,44 adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp214.410.829.671,60 berasal dari:

a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp131.955.470.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai
1.	Sekretariat DPRD	506.651.159,00
2.	Biro Umum	438.908.313,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	16.809.229.448,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah	103.350.000,00

No	Nama SKPD	Nilai
5.	Dinas Perhubungan Daerah	948.832.717,00
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	572.715.356,00
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	107.096.145.268,00
8.	Dinas Sosial Daerah	123.716.410,00
9.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	10.776.000,00
10.	Dinas Kehutanan Daerah	220.499.999,00
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	1.274.235.365,00
12.	Inspektorat Daerah	216.550.500,00
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	154.976.535,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	242.111.100,00
15.	Dinas Pariwisata Daerah	166.600.700,00
16.	Badan Kepegawaian Daerah	98.840.000,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.725.905.658,00
18.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	245.426.247,00
Jumlah		131.955.470.775,00

- b. Penambahan Mutasi masuk gedung dan bangunan SKPD senilai Rp2.945.611.350,00 terdiri dari:
- 1) Biro Umum senilai Rp2.425.864.300,00 mutasi dari Badan Penghubung;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp349.817.050,00; dan
 - 3) Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah berupa Rehab Gedung Samsat Majene Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp169.930.000,00;
- c. Penambahan reklasifikasi KIB ke gedung dan bangunan senilai Rp79.264.312.315,60 terdiri dari:
- 1) Adanya penambahan reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan senilai Rp118.805.561,00 pada Biro Umum;
 - 2) Adanya penambahan reklasifikasi KIB ke gedung dan bangunan senilai Rp60.620.354.632,00;
 - 3) Adanya penambahan reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan senilai Rp110.807.900,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
 - 4) Adanya penambahan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan senilai Rp829.746.351,43 pada Dinas Sosial Daerah;
 - 5) Adanya penambahan reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan senilai Rp636.000.158,00 pada Badan Penghubung;
 - 6) Adanya penambahan reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan senilai Rp53.888.798,00 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 7) Adanya penambahan reklasifikasi senilai Rp16.894.708.915,17 dari aset tetap lainnya senilai Rp12.257.106.300,40 ditambah reklasifikasi dari konstruksi dalam pekerjaan senilai Rp4.637.602.614,77;
- d. Penambahan utang di peralatan dan mesin terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp245.435.231,00.
2. Pengurangan yang berasal mutasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp154.574.741.095,44 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat adanya mutasi keluar gedung dan bangunan senilai Rp2.595.794.300,00 bersumber dari :
 - 1) Mutasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa Rehab Gedung Samsat Majene senilai Rp169.930.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah; dan
 - 2) Badan Penghubung Provinsi ke Biro Umum senilai Rp 2.425.864.300,00;
- b. Pengurangan akibat adanya pembayaran utang senilai Rp4.179.273.567,60 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp1.387.529.107,00;
 - 2) Pembayaran utang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp1.220.273.825,17;
 - 3) Pembayaran utang pada Dinas Sosial Daerah senilai Rp37.336.661,43; dan
 - 4) Pembayaran utang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah senilai Rp1.534.133.974,00;
- c. Pengurangan akibat adanya Penghapusan Pasca Gempa senilai Rp22.102.794.315,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- d. Pengurangan akibat adanya Penghapusan Gedung dan Bangunan senilai Rp2.996.159.069,02 terdiri dari Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp416.162.000,00 dan Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp2.579.997.069,02;
- e. Pengurangan reklasifikasi KIB dari gedung dan bangunan senilai Rp33.768.228.702,65 terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi keluar dari Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp2.165.013.879,73 yang direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp250.945.300,00, direklasifikasikan ke Konstruksi dalam pekerjaan senilai Rp1.816.357.101,00, direklasifikasikan ke Tanah senilai Rp97.711.478,73 berupa Utang Pekerjaan Pematangan Lahan Tahun 2022;
 - 2) Dinas perhubungan Daerah senilai Rp934.416.717,00 dengan rincian reklasifikasi sebagai berikut:
 - a) termin 40% senilai Rp352.149.487,00;
 - b) termin pengawasan 50% senilai Rp24.959.000,00;
 - c) termin 80% senilai Rp344.759.487,00;
 - d) perjalanan dinas November senilai Rp3.930.000,00;
 - e) pengawasan terminal senilai Rp24.959.000,00;
 - f) pembangunan terminal senilai Rp172.379.743,00; dan
 - g) honor PPK senilai Rp11.270.000,00;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp572.715.356,00 terdapat reklasifikasi ke tanah berupa Pematangan Lahan;
 - 4) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp28.736.756.077,93 nilai tersebut diperoleh karena adanya Reklas kurang dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp3.820.295.074,00 ditambah Reklas Kurang dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.114.696.052,00 adanya Reklas Kurang dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp17.149.351.120,08 dikurangi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.038.379.304,50, nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan berkurang menjadi Rp16.110.971.815,58, dari total tersebut berubah lagi disebabkan adanya penambahan Konstruksi Dalam Pekerjaan Baru senilai

- Rp7.681.354.731 ditambah selisih nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp9.438.405,35, sehingga total nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan bertambah menjadi Rp23.801.764.951,93;
- 5) Dinas sosial terdapat reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Tanah senilai Rp52.330.000,00;
 - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah terdapat reklasifikasi dari Gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp24.955.575,00;
 - 7) Badan Kepegawaian Daerah terdapat reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp90.269.413,00;
 - 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdapat reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1.191.771.684,00 dengan rincian Reklas Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa pembayaran fisik senilai Rp1.092.828.184,00 ditambahkan Honor Tim Teknis senilai Rp10.800.000,00 ditambahkan Transpor Peserta senilai Rp1.050.000,00 ditambahkan Lanjutan Pembayaran Pengawasan senilai Rp27.100.500,00 ditambahkan Jasa Konsultan Pekerjaan *Review Design* Gedung senilai Rp59.993.000,00;
 - f. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke barang dan jasa senilai Rp7.583.958.963,00 yang bersumber dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp600.569.936,00;
 - 2) Dinas Perhubungan senilai Rp14.416.000,00;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.960.402.440,00; dan
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp8.570.587,00;
 - g. Pengurangan akibat adanya Kas yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.247.676.453,08 bersumber dari Reklas Gedung dan Bangunan ke kas yang dibatasi penggunaannya sebelum koreksi, senilai Rp3.298.683.598,92 dikurangi koreksi menjadi Aset senilai Rp117.652.837,50 lalu dikurangi selisih antara kas lama dengan baru senilai Rp9.438.405,34 ditambah penambahan kas dibatasi penggunaannya senilai Rp1.076.084.097,00;
 - h. Pengurangan akibat adanya Koreksi Saldo dari Gedung dan Bangunan senilai Rp257.184.213,16 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp39.181.029,16 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp218.003.184,00 bersumber dari adanya Koreksi kurang pembayaran Hutang Pengawasan Tahun 2021 senilai Rp186.503.206,31 dan Pengurangan Nilai Hutang SMKN Tapango Rp31.499.977,69;
 - i. Pengurangan akibat adanya ubah kondisi senilai Rp75.192.294.510,98 terdiri dari:
 - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp2.142.335.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp70.182.431.455,00;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp186.610.000,00;
 - 4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah senilai Rp1.860.351.336,00;
 - 5) Dinas Kehutanan Daerah senilai Rp32.000.000,00; dan
 - 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah senilai Rp788.566.719,98;
 - j. Pengurangan akibat adanya koreksi gedung dan bangunan senilai Rp1.651.377.000,00 pada Dinas Kehutanan Daerah; dan
 - k. Pengurangan adanya Koreksi Pembulatan senilai Rp0,95.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.664.843.304.609,65	1.308.537.529.344,16

Jalan, irigasi, dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.664.843.304.609,65. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp356.305.775.265,49 atau 27,23% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp1.308.537.529.344,16, Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	1.308.537.529.344,16
PENAMBAHAN		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	272.994.673.862,00
2. Utang	Rp	1.238.587.422,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	116.399.729.369,59
4. Reklasifikasi dari Barjas	Rp	4.055.404.124,00
5. Koreksi Saldo Tambah	Rp	1,20
J u m l a h	Rp	394.688.394.778,79
PENGURANGAN		
1. Pembayaran Utang	Rp	29.518.861.440,00
2. Penghapusan Pasca Gempa	Rp	1.500.000,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	8.407.820.772,00
4. Reklasifikasi ke Barjas	Rp	60.000.000,00
5. Koreksi Saldo Kurang	Rp	1,30
6. Ubah Kondisi	Rp	394.437.300,00
J u m l a h	Rp	38.382.619.513,30
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.664.843.304.609,65

Penjelasan atas Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.664.843.304.609,65 bersumber dari saldo awal tahun 2022 senilai Rp1.308.537.529.344,16 ditambah penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 senilai Rp394.688.394.778,79 dikurangi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp38.382.619.513,30 adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp394.688.394.778,79 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari realisasi belanja modal di Tahun 2022 senilai Rp272.994.673.862,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp244.041.827.150,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp23.710.145.442,00;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp1.316.034.840,00;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah senilai Rp3.769.779.430,00; dan
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp156.887.000,00;

- b. Penambahan Utang senilai Rp1.238.587.422,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp1.226.597.422,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp11.990.000,00
 - c. Penambahan reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp 116.399.729.369,59 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp115.280.033.317,59 karena adanya Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp115.029.088.017,59 dan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp250.945.300,00;
 - 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp1.114.696.052,00; dan
 - 3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah senilai Rp5.000.000,00;
 - d. Penambahan reklasifikasi dari Barang dan Jasa pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp4.055.404.124,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan senilai Rp2.602.798.674,00
 - 2) Pengawasan senilai Rp1.452.605.450,00
 - e. Penambahan Koreksi Saldo Tambah senilai Rp1,20
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Senilai Rp38.382.619.513,30 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan dari Pembayaran Utang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp29.518.861.440,00 antara lain:
 - 1) Pengurangan akibat adanya Pembayaran Utang Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp29.496.531.440,00; dan
 - 2) Pengurangan akibat adanya Pembayaran Utang Pengawasan dermaga pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp22.330.000,00;
 - b. Pengurangan akibat adanya Penghapusan Pasca Gempa senilai Rp1.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - c. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi KIB pada jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp8.407.820.772,00 terdiri dari:
 - 1) Adanya Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp6.313.990.878,00 dan Reklasifikasi ke Aset tak Berwujud senilai Rp1.076.402.000,00 sehingga terjadi Pengurangan di Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp7.390.392.878,00;
 - 2) Adanya Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp907.946.374,00; dan
 - 3) Adanya Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah senilai Rp109.481.520,00;
 - d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp60.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Pengurangan akibat adanya Ubah Kondisi senilai Rp394.437.300,00 terdiri dari:
 - 1) Biro Umum senilai Rp120.222.300,00; dan
 - 2) Dinas Kesehatan Daerah senilai Rp274.215.000,00;
 - f. Pengurangan akibat adanya Koreksi Saldo Kurang senilai Rp1,30.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	27.799.312.540,10	25.469.335.515,10

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp27.799.312.540,10. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.329.977.025,00 atau 9,15% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp25.469.335.515,10, Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	25.469.335.515,10
Penambahan		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	33.108.730.259,00
2. BOS Reguler	Rp	4.081.495.425,00
J u m l a h	Rp	37.190.225.684,00
Pengurangan		
1. Mutasi Keluar	Rp	349.817.050,00
2. Pembayaran Utang	Rp	1.094.673.381,60
3. Penghapusan Pasca Gempa	Rp	217.845.175,00
4. Reklasifikasi KIB	Rp	30.609.035.827,40
5. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	64.624.000,00
6. Ekstra	Rp	2.524.253.225,00
J u m l a h	Rp	34.860.248.659,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	27.799.312.540,10

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp27.799.312.540,10 bersumber dari Saldo Awal 2022 senilai Rp25.469.335.515,10 ditambah Penambahan Realisasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 senilai Rp37.190.225.684,00 dikurangi Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp34.860.248.659,00, dengan rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp37.190.225.684,00 di Tahun 2022 berasal dari:
 - a. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp33.108.730.259,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai
1	Sekretariat DPRD	199.023.000,00
2	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	209.776.690,00
3	Biro Hukum	5.849.700,00
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	50.000.000,00
5	Biro Organisasi	91.735.950,00
6	Biro Umum	168.711.161,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	11.690.460.232,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah	110.807.900,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah	497.635.750,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	14.939.824.239,00
11	Dinas Sosial Daerah	5.842.300,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.178.920.109,00
13	Dinas P3AP2KB	49.950.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja Daerah	149.483.700,00

No	SKPD	Nilai
15	Dinas Perkebunan Daerah	8.369.400,00
16	BPKPD	75.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.832.500,00
18	Badan Penghubung Provinsi	647.450.158,00
19	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	5.057.470,00
	JUMLAH	33.108.730.259,00

- b. BOS Reguler senilai Rp4.081.495.425,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya di Tahun Anggaran 2022 senilai Rp34.860.248.659,00 berasal dari:
- Mutasi keluar SKPD senilai Rp349.817.050,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD);
 - Pembayaran utang SKPD senilai Rp1.094.673.381,60 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - Penghapusan Pasca Gempa senilai Rp217.845.175,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya senilai Rp30.609.035.827,40 dengan rincian:
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp199.023.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat senilai Rp209.776.690,00 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa partisi senilai Rp199.776.690,00 dan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp10.000.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Hukum senilai Rp5.849.700,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Organisasi senilai Rp91.735.950,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Biro Organisasi senilai Rp168.711.161,00 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp49.905.600,00 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp118.805.561,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas PUPR senilai Rp11.690.460.232,00 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp11.662.116.532,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp22.494.000,00 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp5.849.700,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp110.807.900,00 berupa Pekerjaan Rehab Rusunawa;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp 147.818.700,00 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp98.645.700,00 dan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp49.173.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp12.861.396.857,40 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp12.257.106.300,40 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp604.290.557,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Daerah senilai Rp5.842.300,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah senilai Rp4.178.920.109,00 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan

- dan Mesin senilai Rp5.801.999,00 dan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp4.173.118.110,00;
- 12) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas P3AP2KB senilai Rp49.950.000,00;
 - 13) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Tenaga Kerja Daerah senilai Rp149.483.700,00;
 - 14) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perkebunan Daerah senilai Rp8.369.400,00;
 - 15) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp75.000.000,00;
 - 16) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp24.832.500,00;
 - 17) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Penghubung Provinsi senilai Rp636.000.158,00; dan
 - 18) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp5.057.470,00;
- e. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Barang dan Jasa senilai Rp64.624.000,00 terdiri dari:
- 1) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat senilai Rp10.000.000,00;
 - 2) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan senilai Rp50.000.000,00 berupa kegiatan Tes Psikologi Komisaris Perseroda; dan
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp4.624.000,00 yang direklas adalah Dana BOS.
- f. Pengurangan dari Ekstra dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.524.253.225,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah senilai Rp2.523.273.225,00; dan
 - 2) Badan Penghubung senilai Rp980.000,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.151.181.184,91	193.108.684.647,77

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp59.151.181.184,91. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp133.957.503.462,86 atau 69,37% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp193.108.684.647,77 Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	193.108.684.647,77
Penambahan		
1. Reklasifikasi KIB	Rp	35.855.312.700,93
J u m l a h	Rp	35.855.312.700,93
Pengurangan		
1. Reklasifikasi KIB	Rp	169.812.816.163,79
J u m l a h	Rp	169.812.816.163,79
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	59.151.181.184,91

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

1. Penjelasan atas penambahan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp35.855.312.700,93 adalah sebagai berikut:
 - a. Penambahan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp8.152.841.979,00 karena adanya Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp6.313.990.878,00 ditambah dari Gedung dan Bangunan senilai Rp1.816.357.101,00 ditambah dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp22.494.000,00;
 - b. Penambahan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah senilai Rp 1.640.080.274,00 bersumber dari Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp907.946.374,00 dan dari Tanah senilai Rp732.133.900,00;
 - c. Penambahan reklasifikasi ke konstruksi dalam pekerjaan senilai Rp934.416.717,00 terdiri dari pembayaran termin 40% senilai Rp352.159.487,00 ditambah pembayaran termin pengawasan 50% senilai Rp24.959.000,00 ditambah pembayaran termin 80% senilai Rp344.759.487 ditambah perjalanan dinas November senilai Rp 3.930.000,00 ditambah pengawasan terminal senilai Rp24.959.000 ditambah pembangunan terminal senilai Rp172.379.743,00 ditambah honor PPK senilai Rp11.270.000,00;
 - d. Penambahan Reklasifikasi Kurang dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp17.149.351.120,08 dikurangi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.038.379.304,50, nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan berkurang menjadi Rp16.110.971.815,58, dari total tersebut berubah lagi disebabkan adanya penambahan Konstruksi Dalam Pekerjaan Baru senilai Rp7.681.354.731,00 ditambah selisih nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp9.438.405,35, sehingga total nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan bertambah menjadi Rp23.801.764.951,93;
 - e. Penambahan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp134.437.095,00 dari Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp109.481.520,00 dan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp24.955.575,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah; dan
 - f. Penambahan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp 1.191.771.684,00 bersumber dari Gedung dan Bangunan berupa pembayaran fisik senilai Rp1.092.828.184,00 ditambahkan Honor tim teknis senilai Rp10.800.000, Transport Peserta 1.050.000,00 Lanjutan Pembayaran Pengawasan senilai Rp27.100.500,00 dan Jasa Konsultan Pekerjaan *Review Design* Gedung senilai Rp 59.993.000,00;
2. Penjelasan atas pengurangan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp169.812.816.163,79 terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah senilai Rp164.345.467.197,59 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan senilai Rp48.958.238.100,00, direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp115.029.088.017,59 dan direklasifikasikan ke Tanah senilai Rp358.141.080,00;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.637.602.614,77 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Dinas Sosial senilai Rp829.746.351,43 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.863.850.565.983,23)	(1.645.930.125.808,80)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai (1.863.850.565.983,23). Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp(217.920.440.174,42) atau 13,24% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai (1.645.930.125.808,80). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 60. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	485.627.108.776,03	-	485.627.108.776,03
2.	Peralatan dan Mesin	997.214.943.453,97	667.359.195.215,99	329.855.748.237,98
3.	Gedung dan Bangunan	1.615.326.861.288,88	528.935.871.462,24	1.086.390.989.826,64
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.664.843.304.609,65	667.555.499.305,00	997.287.805.304,65
5.	Aset Tetap Lainnya	27.799.312.540,10	-	27.799.312.540,10
6.	KDP	59.151.181.184,91	-	59.151.181.184,91
Jumlah		4.849.962.711.853,54	1.863.850.565.983,23	2.986.112.145.870,31

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4. Aset Lainnya	103.308.676.438,14	67.501.581.223,48

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp103.308.676.438,14. Nilai Aset Lainnya mengalami kenaikan senilai Rp35.807.095.214,66 atau 53,05% di bandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp67.501.581.223,48. Adapun rincian aset lainnya dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61. Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tuntutan Perbendaharaan	174.000.000,00	180.000.000,00
2.	Tuntutan Ganti Rugi	673.139.155,00	723.139.155,00
3.	Aset Tidak Berwujud	62.053.526.412,00	56.472.429.602,00
4.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	2.369.848.175,60
5.	Aset Lain-lain	84.818.025.374,77	49.669.189.052,08
6.	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.951.961.206,00	0,00
7.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(46.361.975.709,63)	(41.913.024.761,20)
Jumlah		103.308.676.438,140	67.501.581.223,48

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4.1 Tuntutan Perbendaharaan	174.000.000,00	180.000.000,00

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2022 senilai Rp174.000.000,00 yang merupakan saldo Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2006 yang masih tertunggak dan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp6.000.000,00, dengan rincian penyetoran s.d tahun 2021 senilai Rp5.000.000,00 dan penyetoran tahun 2022 senilai Rp1.000.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 62.

Tabel 62. Tuntutan Perbendaharaan

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa Pinjaman (Rp)	Setor 2019 s/d 2022 (Rp)	Sisa s/d Thn 2019 (Rp)	Ket
1.	MTR	2006	Bendahara	130.000.000,00	6.000.000,00	124.000.000,00	Barang Jaminan dalam proses
2.	ADF	2006	Bendahara	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Barang Jaminan dalam proses
JUMLAH				180.000.000,00	6.000.000,00	174.000.000,00	

Dari Tabel 62 di atas dapat dijelaskan bahwa saldo piutang telah dilengkapi dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), namun dalam SKTJM tersebut tidak dijelaskan batas akhir penyetoran dan pelunasan piutang dimaksud sehingga sampai sekarang belum diketahui kapan dapat terselesaikan. Tim Tindak Lanjut Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya penagihan dari hasil tersebut mendapatkan penyelesaian senilai Rp6.000.000,00 namun belum optimal sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022 belum dapat terselesaikan secara 100%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Rugi	673.139.155,00	723.139.155,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 senilai Rp673.139.155,00 yang merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang masih tertunggak dan terdapat penyetoran di tahun sebelumnya ke Kas Umum Daerah.

Tabel 63. Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

No.	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa TGR 2021 (Rp)	Penyetoran Tahun 2022 (Rp)	Sisa TGR 2022 (Rp)	Ket.
1.	SM	2006	Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	5.000.000,00		5.000.000,00	Tidak ada Jaminan
2.	DJB	2006	Sekretaris Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	106.109.143,00		106.109.143,00	Ada Jaminan
3.	YR	2006	Staf Ahli Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Barat	60.000.000,00		60.000.000,00	Ada Jaminan
4.	IM	2006	Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	445.716.625,00	50.000.000,00	395.716.625,00	Ada Jaminan
5.	DD	2006	Pihak ke III	37.000.000,00		37.000.000,00	Tidak ada Jaminan
6.	FG	2008	Pihak ke III	60.000.000,00		60.000.000,00	Tidak ada Jaminan
7.	FH	2009	Pihak ke III	9.313.387,00		9.313.387,00	Tidak ada Jaminan
Jumlah				723.139.155,00	50.000.000,00	673.139.155,00	

Tabel 63 di atas dapat dijelaskan bahwa saldo piutang telah dilengkapi dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani pada Tahun 2011 akan tetapi dalam SKTJM tersebut tidak dijelaskan batas akhir penyetoran dan pelunasan piutang dimaksud sehingga sampai sekarang belum diketahui kapan dapat terselesaikan. Tim Tindak Lanjut Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya penagihan dan telah dilakukan sidang TP-TGR dari hasil tersebut mendapatkan pengembalian Rp50.000.000,00, namun belum optimal sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022 belum dapat terselesaikan 100%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud	15.691.550.702,37	14.559.404.840,80

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp15.691.550.702,37 dan Rp14.559.404.840,80 terdapat kenaikan senilai Rp1.132.145.861,57 atau 7,22%, dengan rincian pada Tabel 64.

Tabel 64. Daftar Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	62.053.526.412,00	56.472.429.602,00
	Jumlah	62.053.526.412,00	56.472.429.602,00
	Amortisasi	(46.361.975.709,63)	(41.913.024.761,20)
	Nilai Buku	15.691.550.702,37	14.559.404.840,80

Penjelasan penambahan Aset Tak Berwujud di tahun 2022 senilai Rp62.053.526.412,00 berasal dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp56.472.429.602,00 ditambahkan penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp5.883.176.810,00 dikurangi pengurangan senilai Rp302.080.000,00, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	56.472.429.602,00
Penambahan		
1. Utang	Rp	72.000.000,00
2. Reklasifikasi Masuk KIB	Rp	5.523.176.810,00
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	288.000.000,00
J u m l a h	Rp	5.883.176.810,00
Pengurangan		
1. Koreksi Saldo Kurang ATB	Rp	302.080.000,00
J u m l a h	Rp	302.080.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	62.053.526.412,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp5.883.176.810,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan Utang ke Aset Tak Berwujud senilai Rp72.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;
 - b. Penambahan dari reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp5.523.176.810,00 bersumber

dari SKPD berikut:

- 1) Adanya reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, Jaringan ke Aset Tak Berwujud pada Dinas PUPR senilai Rp1.076.402.000,00;
- 2) Adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp49.173.000,00;
- 3) Adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp4.173.118.110,00;
- 4) Adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Tenaga Kerja senilai Rp149.483.700,00; dan
- 5) Adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp75.000.000,00;
- c. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp288.000.000,00 yang direklasifikasikan ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Perhubungan.
2. Pengurangan dari Aset Tak Berwujud senilai Rp302.080.000,00 berasal dari koreksi kurang saldo Aset Tak Berwujud pada Sekretariat DPRD akibat belum dikeluarkan dari kertas kerja aset ketika saat Penghapusan Pasca Gempa tahun 2021.

Penjelasan saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud di Tahun 2022 senilai (46.361.975.709,63) berasal dari saldo awal Amortisasi Aset Tak Berwujud senilai (41.913.024.761,20) ditambahkan beban tahun berjalan senilai Rp4.824.710.948,43 dikurangi koreksi saldo kurang ATB senilai Rp375.760.000,00.

Rincian Amortisasi:

Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp	41.913.024.761,20
Penambahan		
1. Beban Tahun Berjalan	Rp	4.719.674.948,43
2. Penghapusan	Rp	105.036.000,00
J u m l a h	Rp	4.824.710.948,43
Pengurangan		
1. Koreksi Saldo Kurang ATB	Rp	270.724.000,00
2. Penghapusan	Rp	105.036.000,00
J u m l a h	Rp	375.760.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	46.361.975.709,63

Saldo amortisasi per 31 Desember 2022 senilai Rp46.361.975.709,63, dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal Amortisasi TA2022 senilai Rp41.913.024.761,20;
2. Penambahan Penghapusan senilai Rp105.036.000,00;
3. Penambahan Beban Tahun Berjalan senilai Rp4.719.674.948,43 terdiri dari beberapa SKPD berikut :
 - a. Biro Tata Pemerintahan dan Kesra senilai Rp267.990.000,00;
 - b. Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp79.822.000,00;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.957.141.499,13;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp208.320.000,00;
 - e. Dinas Perhubungan senilai Rp120.005.440,00;
 - f. Dinas Kesehatan senilai Rp12.735.995,00;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp176.022.200,00;

- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp82.688.000,00;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp77.657.968,50;
 - j. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura senilai Rp147.852.000,00;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp146.641.552,20;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp56.897.000,00;
 - m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp126.784.936,00;
 - n. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp150.548.117,60;
 - o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp226.406.000,00;
 - p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp94.165.800,00;
 - q. Dinas Pariwisata senilai Rp17.100.000,00;
 - r. Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp128.461.000,00;
 - s. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp313.207.000,00;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan PTSP senilai Rp199.827.560,00;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp39.198.000,00;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senilai Rp81.237.300,00;
 - w. Dinas Tenaga Kerja senilai Rp9.965.580,00
4. Pengurangan dari Amortisasi senilai Rp270.724.000,00 berasal dari Koreksi kurang saldo Amortisasi pada Sekretariat DPRD.
 5. Pengurangan akibat adanya Penghapusan senilai Rp105.036.000,00;

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4.4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	2.369.848.175,60

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp2.369.848.175,60. Kas yang Dibatasi Penggunaannya berupa Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Jaminan tersebut telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seiring dengan pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4.5. Aset Lain-Lain	84.818.025.374,77	49.669.189.052,08

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp84.818.025.374,77. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp35.148.836.322,69 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp49.669.189.052,08. Rincian Aset Lain-Lain tersebut dapat dilihat pada Tabel 65.

Tabel 65. Rincian Saldo Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Aset Lain-Lain	81.667.163.094,77	46.517.826.772,08
2.	UU DP	316.998.120,00	316.998.120,00
3.	TKI DPRD	2.833.864.160,00	2.834.364.160,00
	Jumlah	84.818.025.374,77	49.669.189.052,08

1. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 senilai Rp81.667.163.094,77 terdiri dari aset rusak berat senilai Rp137.648.756.095,73 dikurangi akumulasi penyusutan barang rusak berat senilai Rp90.483.318.780,78 dan aset yang rencana akan diserahkan ke pihak lainnya senilai Rp34.501.725.779,82.
- a. Aset rusak berat senilai Rp137.648.756.095,73 berasal dari penambahan dan pengurangan saldo awal aset rusak berat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-Lain:			
Saldo Awal per : 1 Januari 2022	Rp		64.700.174.579,98
Penambahan			
1. Aset Baru Tercatat	Rp	120.450.000,00	
2. Ubah kondisi	Rp	77.987.635.097,74	
3. Pembulatan	Rp	0,02	
4. Reklas Kib	Rp	3.307.007.300,00	
J u m l a h	Rp		81.415.092.397,76
Pengurangan			
1. Penghapusan penjualan	Rp	2.209.474.939,00	
2. Penghapusan rusak berat	Rp	4.523.336.773,01	
3. Penghapusan pasca gempa	Rp	189.645.392,00	
4. Penghapusan	Rp	1.397.935.778,00	
5. Koreksi	Rp	146.118.000,00	
J u m l a h	Rp		8.466.510.882,01
Saldo per 31 Desember 2022	Rp		137.648.756.095,73

Penjelasan atas rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Rusak Berat sebagai berikut

- 1) Saldo awal Aset Rusak Berat per 1 Januari 2022 senilai Rp64.700.174.579,98;
- 2) Penambahan Aset Rusak Berat senilai Rp81.415.092.397,76 bersumber dari:
 - a) penambahan aset baru tercatat pada Biro Umum Sekretariat Daerah senilai Rp120.450.000,00 berupa kendaraan dinas roda dua dari Badan Pertanahan Nasional;
 - b) penambahan yang berasal dari pembulatan senilai Rp0,02;
 - c) penambahan dari reklasifikasi KIB senilai Rp3.307.007.300,00 terdiri dari dua SKPD, yaitu:
 - (1) Sekretariat DPRD senilai Rp3.186.785.000,00 dengan rincian reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp1.044.450.000,00 dan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp2.142.335.000,00; dan
 - (2) Biro Umum senilai Rp120.222.300,00;
 - d) penambahan aset ke kondisi rusak berat yang disebabkan adanya ubah kondisi senilai Rp77.987.635.097,74, yang terdiri dari:
 - (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah senilai Rp115.502.181,00;
 - (2) Dinas Kesehatan senilai Rp558.925.664,00;
 - (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp304.190.185,00;
 - (4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp344.267.735,00;
 - (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp829.462.242,55;
 - (6) Inspektorat Daerah senilai Rp1.144.902.020,19;
 - (7) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp69.881.049,00; dan
 - (8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp565.273.434,02;
- 3) Pengurangan Aset Rusak Berat senilai Rp8.466.510.882,01 terdiri dari:

- a) Pengurangan karena penghapusan penjualan senilai Rp2.209.474.939,00, dengan rincian:
- (1) Sekretariat DPRD senilai Rp24.810.000,00;
 - (2) Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah senilai Rp16.100.000,00;
 - (3) Biro Hukum Sekretariat Daerah senilai Rp 26.400.000,00;
 - (4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah senilai Rp64.100.000,00;
 - (5) Sekretariat Daerah senilai Rp889.300.000,00;
 - (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp24.000.000,00;
 - (7) Dinas Transmigrasi senilai Rp16.375.000,00;
 - (8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp24.160.000,00;
 - (9) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp31.400.000,00;
 - (10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp473.972.966,00;
 - (11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp329.287.500,00;
 - (12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp9.750.000,00;
 - (13) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp14.200.000,00;
 - (14) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp13.350.000,00;
 - (15) Dinas Pariwisata senilai Rp40.050.000,00;
 - (16) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp8.500.000,00;
 - (17) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp27.300.000,00;
 - (18) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp 13.800.000,00; dan
 - (19) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik senilai Rp162.619.473,00.
- b) Pengurangan penghapusan barang rusak berat senilai Rp4.523.336.773,01, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah senilai Rp36.293.406,35;
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp895.163.135,00;
 - (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp440.569.917,00;
 - (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp99.496.422,60;
 - (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana senilai Rp316.941.201,32;
 - (6) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp9.999.400,00;
 - (7) Dinas Kehutanan senilai Rp85.901.220,00;
 - (8) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp142.978.196,00;
 - (9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp528.073.580,80;
 - (10) Inspektorat Daerah senilai Rp738.053.553,63;
 - (11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp296.195.629,00;
 - (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp362.132.458,00; dan
 - (13) Badan Penghubung senilai Rp571.538.653,32.
- c) Pengurangan penghapusan pasca gempa senilai Rp189.645.392,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pengurangan penghapusan senilai Rp1.397.935.778,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e) Pengurangan adanya koreksi pada Aset Lain-lain senilai Rp146.118.000,00.
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 senilai Rp90.483.318.780,78 berasal dari penambahan dan pengurangan saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset**Saldo Awal per : 1 Januari 2022****Rp 52.684.073.587,72****Penambahan**

- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| 1. Ubah Kondisi | Rp | 44.953.939.226,12 |
| 2. Koreksi Saldo Tambah | Rp | 108.334,00 |
| 3. Reklasifikasi KIB | Rp | 1.771.824.475,00 |

J u m l a h**Rp 46.725.872.035,12****Pengurangan**

- | | | |
|---------------------------------|----|------------------|
| 1. Penghapusan karena Penjualan | Rp | 2.180.674.939,00 |
| 2. Penghapusan Aset Rusak Berat | Rp | 4.177.330.902,64 |
| 3. Penghapusan Pasca Gempa | Rp | 142.060.988,00 |
| 4. Penghapusan | Rp | 1.292.899.778,00 |
| 5. Koreksi Saldo Kurang | Rp | 987.542.234,42 |
| 6. Koreksi Kurang | Rp | 146.118.000,00 |
| 7. Pembulatan | Rp | 0,02 |

J u m l a h**Rp 8.926.626.842,06****Saldo per 31 Desember 2022****Rp 90.483.318.780,78**

Penjelasan atas rincian mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebagai berikut

- 1) Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat senilai Rp52.684.073.587,72;
- 2) Penambahan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat senilai Rp46.725.872.035,12 bersumber dari:
 - a) Penambahan koreksi saldo tambah senilai Rp108.334,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b) Penambahan Reklasifikasi KIB senilai Rp1.771.824.475,00 terdiri dari:
 - (1) Sekretariat DPRD senilai Rp1.703.573.272,00 dengan rincian penyusutan ubah kondisi peralatan dan mesin senilai Rp957.412.500,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp746.160.772,00; dan
 - (2) Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp 68.251.203,00;
 - c) Penambahan dari ubah kondisi senilai Rp44.953.939.226,12 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah senilai Rp115.502.181,00;
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp38.892.764.096,00;
 - (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp50.802.500,00;
 - (4) Dinas Kesehatan senilai Rp850.367.852,00;
 - (5) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp66.868.583,00;
 - (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp 304.190.185,00;
 - (7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp798.274.696,00;
 - (8) Dinas Kehutanan senilai Rp41.008.333,00;
 - (9) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp594.064.798,00;
 - (10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp 344.267.735,00;
 - (11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp789.145.765,55;
 - (12) Inspektorat Daerah senilai Rp1.144.028.018,55;
 - (13) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp 69.881.049,00;
 - (14) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp 565.273.434,02; dan

- (15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp327.500.000,00;
- 3) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat senilai Rp8.926.626.842,06 yang bersumber dari:
- a) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Penghapusan Penjualan senilai Rp2.180.674.939,00 yang terdiri dari:
 - (1) Sekretariat DPRD senilai Rp24.810.000,00;
 - (2) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah senilai Rp16.100.000,00;
 - (3) Biro Hukum Sekretariat Daerah senilai Rp26.400.000,00;
 - (4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan senilai Rp64.100.000,00;
 - (5) Sekretariat Daerah senilai Rp889.300.000,00;
 - (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp24.000.000,00;
 - (7) Dinas Transmigrasi senilai Rp16.375.000,00;
 - (8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp24.160.000,00;
 - (9) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp31.400.000,00;
 - (10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp473.972.966,00;
 - (11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp322.787.500,00;
 - (12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp9.750.000,00;
 - (13) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp14.200.000,00;
 - (14) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp13.350.000,00;
 - (15) Dinas Pariwisata senilai Rp40.050.000,00;
 - (16) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp13.500.000,00;
 - (17) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp13.800.000,00; dan
 - (18) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik senilai Rp162.619.473,00;
 - b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Penghapusan Barang Rusak Berat senilai Rp4.177.330.902,64 yang terdiri dari:
 - (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah senilai Rp30.293.406,35;
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp866.828.135,00;
 - (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp440.169.917,00;
 - (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp99.036.565,00;
 - (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana senilai Rp184.632.114,32;
 - (6) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp9.999.400,00;
 - (7) Dinas Kehutanan senilai Rp85.901.220,00;
 - (8) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp142.978.195,87;
 - (9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp505.288.580,80;
 - (10) Inspektorat Daerah senilai Rp737.179.551,99;
 - (11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp284.295.629,00;
 - (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp 360.451.833,00; dan
 - (13) Badan Penghubung senilai Rp428.776.354,32;
 - c) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Penghapusan Pasca Gempa senilai Rp142.060.988,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Penghapusan senilai Rp1.292.899.778,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e) Pengurangan adanya Koreksi Akumulasi Penyusutan barang rusak berat senilai Rp146.118.000,00; dan
 - f) Pembulatan senilai Rp0,02.

- c. Saldo aset yang rencana akan diserahkan ke pihak lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp34.501.725.779,82. Aset tersebut merupakan aset-aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten namun belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima, dengan rincian ditunjukkan pada Lampiran 12.
2. UUDP tahun sebelumnya senilai Rp316.998.120,00 yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022, namun selama tahun 2022 tidak terjadi penyetoran dan tindak lanjut sehingga saldo tersebut tidak mengalami perubahan. Rincian UUDP dapat dilihat pada Tabel 66.

Tabel 66. Rincian UUDP

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)		Sisa (Rp)	Keterangan
			Bertambah	Berkurang		
1.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	162.513.834,00	-	-	162.513.834,00	Sisa Kas TA 2009. Penanggung jawab adalah Saudara MS, AR, dan FP
2.	Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah	154.484.286,00	-	-	154.484.286,00	Sisa Kas TA 2011 yang sampai saat ini masih dalam proses Tim Tindak Lanjut
JUMLAH		316.998.120,00	-	-	316.998.120,00	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 masih terdapat sisa UUDP yang belum disetor atau belum selesai ditindaklanjuti senilai Rp316.998.120,00, yaitu pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah senilai Rp154.484.286,00 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp162.513.834,00.

3. Saldo Aset Lain-Lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp2.833.864.160,00 terdiri dari:
- Piutang Potongan PPh 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Operasional Anggota DPRD Tahun Anggaran 2006 yang telah disetor ke Kas Negara dan belum dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp617.490.000,00; dan
 - Piutang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Operasional Anggota DPRD Tahun Anggaran 2008 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp2.216.874.160,00, dilakukan pembayaran senilai Rp500.000,00 sehingga mengalami perubahan menjadi Rp2.216.374.160,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.4.6. Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.951.961.206,00	0,00

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia. Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.951.961.206,00. Dana tersebut disimpan dalam rekening di Kantor Pusat Bank Indonesia Nomor 519000685980.

Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-247/WPB.26/2023, tanggal 9 Maret 2023 perihal Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) senilai Rp. 1.951.961.206,00 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Bank Indonesia (BI) telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Akun Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (Akun Laporan Operasional).
- b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Akun Neraca) dan Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis pada LRA, dan di sisi lain mencatat pengurangan/pelunasan Piutang atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2. Kewajiban	355.349.599.078,80	241.015.054.001,06

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp355.349.599.078,80 sedangkan 31 Desember 2021 senilai Rp241.015.054.001,06. Terdapat kenaikan senilai Rp114.334.545.077,74 atau 47,44%. Adapun rincian Kewajiban adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	91.873.524.599,00	112.910.230.130,46
2.	Kewajiban Jangka Panjang	263.476.074.479,80	128.104.823.870,60
	Jumlah	355.349.599.078,80	241.015.054.001,06

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	91.873.524.599,00	112.910.230.130,46

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp91.873.524.599,00 turun senilai Rp21.036.705.531,46 atau 18,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp112.910.230.130,46. Adapun rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang PFK	924.609.879,00	145.408.641,00
2.	Utang Bunga	429.202.556,00	813.127.061,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	62.451.777.632,00	55.661.791.690,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	28.067.934.532,00	56.289.902.738,46
	Jumlah	91.873.524.599,00	112.910.230.130,46

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	924.609.879,00	145.408.641,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) timbul disebabkan atas pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 senilai Rp924.609.879,00 meningkat senilai Rp779.201.238,00 atau 535,87% dibandingkan saldo tahun 2021 senilai Rp145.408.641,00. Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 13.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.1.2. Utang Bunga	429.202.556,00	813.127.061,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp429.202.556,00. Utang bunga tersebut merupakan utang pembayaran bunga pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Pusat Investasi Pemerintah bulan Desember 2022 yang baru akan dibayar pada saat tanggal jatuh tempo 27 Februari 2023 sesuai Surat dari PT SMI (Persero) Nomor S-108/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223 tanggal 10 Februari 2023.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	62.451.777.632,00	55.661.791.690,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp62.451.777.632,00 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp55.661.791.690,00. Utang tersebut merupakan sisa utang jangka panjang pinjaman yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu Pusat Investasi Pemerintahan (PIP) yang akan jatuh tempo tahun 2023. Rincian perhitungan Utang Jangka Panjang dan Bagian lancar Utang Jangka Panjang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 69 Daftar Rincian Perhitungan Utang Jangka Panjang dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tahapan Pencairan	Nominal Pencairan	Dana telah ditransfer ke pelaksana kegiatan	Dana yang telah dibayarkan	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Sisa
Pinjaman ke PIP berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 34 Tanggal 28 Januari 2015 untuk Pembanguna RSUD Provinsi Sulawesi Barat					
2016	84.202.633.618,00	84.202.633.618,00			
2016	29.362.086.300,00	29.362.086.300,00			
2016	15.800.717.374,00	15.800.717.374,00			
2016	20.420.352.285,00	20.420.352.285,00			
2016	18.619.477.659,00	18.619.477.659,00			
2017	98.741.561.162,00	98.741.561.162,00	-		
2017	14.594.914.364,00	14.594.914.364,00			
2017	15.706.758.698,00	15.706.758.698,00			
2017	20.999.764.122,00	20.999.764.122,00			
2017	21.286.574.455,00	21.286.574.455,00			

Tahapan Pencairan	Nominal Pencairan	Dana telah ditransfer ke pelaksana kegiatan	Dana yang telah dibayarkan	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Sisa
2017	26.153.549.523,00	26.153.549.523,00			
2018	46.202.378.525,00	46.202.378.525,00	21.133.965.964,00		
2018	8.610.005.220,00	8.610.005.220,00			
2018	37.592.373.305,00	37.592.373.305,00			
2019			46.225.023.856,00		
2020			46.225.023.856,00		
2021			46.225.023.856,00		
2022			46.225.023.856,00	23.112.511.917,00	
Jumlah I	229.146.573.305,00	229.146.573.305,00	206.034.061.388,00	23.112.511.917,00	-
Pinjaman ke PT SMI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Nomor : PERJ-140/SMI/1020 Tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)					
2020	37.059.311.612,00	37.059.311.612,00			
2021					
2022			7.720.688.690,00	9.264.827.903,00	
Jumlah II	37.059.311.612,00	37.059.311.612,00	7.720.688.690,00	9.264.827.903,00	19.971.145.422,00
Pinjaman ke PT SMI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Nomor : PERJ-129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)					
2021	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-		75.000.000.000,00
2021					
2022	195.669.938.135,00	195.669.938.135,00		30.074.437.812,00	
Jumlah III	270.669.938.135,00	270.669.938.135,00		30.074.437.812,00	44.925.562.188,00
Total	536.875.823.052,00	536.875.823.052,00	213.754.750.078,00	62.451.777.632,00	260.566.645.745,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	28.067.934.532,00	56.289.902.738,46

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang kepada pihak ketiga. Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp28.067.934.532,00 sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp56.289.902.738,46 atau terjadi penurunan senilai Rp28.221.968.206,46 atau 50,14%. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 70. Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban	25.788.991.317,00
2.	Utang Pengadaan Aset	2.238.816.711,00
3.	Utang Pengembalian Jasa Giro	40.126.504,00
	Jumlah	28.067.934.532,00

1. Utang Beban senilai Rp25.788.991.317,00 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Barang dan Jasa. Utang Beban Pegawai merupakan utang pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Utang Beban Barang dan Jasa merupakan utang pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan barang dan jasa. Saldo Utang Beban Pegawai

dan Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp8.081.495.546,00 dan Rp17.707.495.771,00 Rincian utang beban per tahun ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 71. Daftar Utang Beban Per Tahun

No	Tahun	Utang Beban Pegawai (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	s.d 2021	24.668.283,00	274.870.500,00	299.538.783,00
2	2022	8.056.827.263,00	17.432.625.271,00	25.489.452.534,00
	Jumlah	8.081.495.546,00	17.707.495.771,00	25.788.991.317,00

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 14

2. Utang Pengadaan Aset Tetap merupakan utang pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan aset tetap. Saldo Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp2.238.816.711,00. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per tahun disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 72. Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap Per Tahun

No	Tahun	Nilai Utang Pengadaan Aset Tetap (Rp)
1.	2015	233.173.227,00
2.	2016	99.955.100,00
3.	2017	0,00
4.	2018	408.580.074,00
5.	2019	0,00
6.	2020	0,00
7.	2021	25.075.657,00
8.	2022	1.472.032.653,00
	Jumlah	2.238.816.711,00

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 15

3. Utang Pengembalian Jasa Giro senilai Rp40.126.504,00 terdiri dari:
 - a. Kesalahan transfer jasa giro rekening sekolah di Kabupaten Mamasa oleh Bank Sulselbar senilai Rp10.804.004,00 yang belum di lakukan pengembalian jasa giro ke Pemerintah Kabupaten Mamasa.
 - b. Kelebihan bayar sisa penyetoran uang pengganti senilai Rp29.322.500,00 yang wajib di kembalikan kepada terdakwa (CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA an Hasanuddin), berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid. Sus Tpk/2016/PN.Mam tanggal 13 Juni 2016.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	263.476.074.479,80	128.104.823.870,60

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp263.476.074.479,80. Nilai saldo Kewajiban Jangka Panjang tersebut naik sebesar Rp135.371.250.609,20 atau 105,67%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp128.104.823.870,60. Rincian kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dalam berikut:

Tabel 73. Rincian Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	260.669.295.342,00	126.779.310.192,10
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	2.806.779.137,80	1.325.513.678,50
	Jumlah	263.476.074.479,80	128.104.823.870,60

**7.5.3.2.2.1. Utang Dalam Negeri –
Lembaga Keuangan
Bukan Bank**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
260.669.295.342,00	126.779.310.192,10

Saldo Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2022 senilai Rp260.566.645.745,00 merupakan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP)/PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dilakukan pada tahun 2015, 2020, 2021, dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Rekap Utang Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

No	Tahun Pemijaman	Peruntukan Utang	Nilai Utang (Rp)	Pembayaran	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Rp)	Utang per 31 Desember 2022 (Rp)	Nomor Perjanjian
				(Rp)		(Rp)	
1.	2015	Pembangunan RSUD	229.146.573.305,00	206.034.061.388,00	23.112.511.917,00	0,00	Nomor : 34 Tanggal 28 Januari 2015
2.	2020	PEN	37.059.311.612,00	7.720.688.690,00	9.264.827.903,00	20.073.795.019,00	Nomor : PERJ- 140/SMI/1020 Tanggal 27 Oktober 2020
3.	2021	PEN	75.000.000.000,00	0,00	30.074.437.812,00	44.925.562.188,00	Nomor : PERJ- 129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021
4	2022	PEN	195.669.938.135,00	0,00	0,00	195.669.938.135,00	Nomor : PERJ- 129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021
Jumlah			536.875.823.052,00	213.754.750.078,00	62.451.777.632,00	260.669.295.342,00	

a. Utang kepada PIP pada tahun 2015 digunakan untuk pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pinjaman Daerah dari Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kelas B. Jumlah pinjaman tersebut senilai Rp229.146.573.305,00.

Jangka waktu pinjaman adalah 7 (tujuh) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan ketentuan apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi

pinjaman. Besaran bunga pinjaman senilai 9,75% pertahun yang dibayarkan setiap tiga bulan yaitu terhitung sejak tanggal dan bulan pencairan tahap I dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 bulan jatuh tempo, serta perhitungan bunga berdasarkan hari kalender dengan ketentuan satu tahun dihitung 360 hari sebagai faktor pembagi tetap.

Jumlah pinjaman (Kewajiban Jangka Panjang) yang sudah terima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp229.146.573.305,00, yang ditransfer dalam 11 tahap melalui nomor rekening 071.001.000008776.6 an. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

Tabel 75. Tahapan Transfer Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah

No	Tanggal Transfer	Nomor Bukti	Nilai (Rp)
I.	Tahun 2016		
1.	17 Juni 2016	00376/STS/1.20.00.00/2016	29.362.086.300,00
2.	17 Juni 2016	00377/STS/1.20.00.00/2016	15.800.717.374,00
3.	23 November 2016	00377/STS/1.20.00.00/2016	20.420.352.285,00
4.	16 Desember 2016	00890/STS/1.20.00.00/2016	18.619.477.659,00
II.	Tahun 2017		
5.	07 Februari 2017	0034/STS/4.4.0.1/2017	14.594.914.364,00
6.	31 Maret 2017	0039/STS/4.4.0.1/2017	15.706.758.698,00
7.	09 Juni 2017	0035/STS/4.4.0.1/2017	20.999.764.122,00
8.	24 Agustus 2017	0036/STS/4.4.0.1/2017	21.286.574.455,00
9.	14 Desember 2017	0037/STS/4.4.0.1/2017	26.153.549.523,00
III.	Tahun 2018		
10.	4 Juni 2018	360/STS/4.04.00.01/2018	8.610.005.220,00
11.	19 Oktober 2018	00671/STS/4.04.00.01/2018	37.592.373.305,00
	Jumlah		229.146.573.305,00

Pada Tahun 2022, sisa pinjaman ke PIP senilai Rp23.112.511.917,00 dan telah direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sehingga saldo Utang Jangka Panjang ke PIP senilai Rp0,00.

- b. Tahun 2020 terdapat penambahan utang untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp37.059.311.612,00 berdasarkan Surat Perjanjian Utang Nomor PERJ-140/SMI/1020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu pinjaman selama enam tahun dan Grace Periode selama dua tahun. Utang tersebut dipergunakan untuk pembangunan empat ruas jalan Provinsi sebagai berikut:

Tabel 76. Daftar Proyek PEN yang Dibiayai Utang Tahun 2020

No	Nama Proyek dan Kegiatan	Nilai Proyek dan Kegiatan (Rp)
1.	Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	11.959.871.695,00
B	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	90.129.050,00

No	Nama Proyek dan Kegiatan	Nilai Proyek dan Kegiatan (Rp)
2.	Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	4.081.423.600,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	60.133.150,00
3.	Jalan Ruas Salutambung-Urekang	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang	8.898.864.765,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang	72.740.800,00
4.	Jalan Ruas Mapilli-Piriang	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Mapilli-Piriang	11.804.258.402,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Mapilli-Piriang	91.890.150,00
	Total	37.059.311.61200

Pada tahun 2022 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp7.720.688.690,00 sehingga sisa utang per 31 Desember 2022 senilai Rp29.338.622.922,00. Senilai Rp9.264.827.903,00 jatuh tempo pada tahun 2023 sehingga direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Dengan demikian saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp20.073.795.019,00.

- c. Tahun 2021 terjadi penambahan utang untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp75.000.000,00 berdasarkan Nomor PERJ-129/SMT/0821 tanggal 26 Oktober 2021. Jangka waktu pinjaman lima tahun dengan Grace Periode dua tahun. Tahun 2022 terjadi penambahan utang untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp195.669.938.135,00, sehingga total utang senilai Rp270.669.938.135,00. Utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 senilai Rp30.074.437.812,00 sehingga direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Dengan demikian saldo utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp 240.595.500.323,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.2.2. Utang Jangka Panjang Lainnya	2.806.779.137,80	1.325.513.678,50

Utang jangka panjang lainnya merupakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dari 25 Pemegang IUP senilai Rp2.806.779.137,80, dengan rincian dapat dilihat pada bagian 7.5.3.1.4.4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.3. Ekuitas	2.987.803.037.208,91	2.908.080.518.685,25

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp2.987.803.037.208,91 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp2.908.080.518.685,25 terjadi peningkatan senilai Rp79.722.518.523,66 atau 2,74%. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp 2.908.080.518.685,25
Surplus Defisit-LO	Rp 49.796.832.684,78
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 29.925.685.838,88
Ekuitas Akhir	Rp 2.987.803.037.208,91

7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2022. Laporan Operasional (LO) Tahun 2022 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Adapun kegiatan operasional pendapatan dan belanja sebagai berikut.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.1. Pendapatan – LO	1.953.809.056.978,35	2.076.058.253.158,68

Pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.953.809.056.978,35 sedangkan tahun 2021 senilai Rp2.076.058.253.158,68. Terjadi penurunan senilai Rp122.249.196.180,33 atau 5,89%. Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat Tabel 77.

Tabel 77. Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	457.704.495.917,35	412.824.995.243,59
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.436.545.261.740,00	1.609.482.634.440,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	59.559.299.321,00	53.750.623.475,09
	Jumlah	1.953.809.056.978,35	2.076.058.253.158,68

Adapun rincian dari masing-masing jenis Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO	457.704.495.917,35	412.824.995.243,59

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp457.704.495.917,35 sedangkan tahun 2021 senilai Rp412.824.995.243,59. Terjadi peningkatan senilai Rp44.879.500.673,76 atau 10,87%. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada Tabel 78.

**Tabel 78. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO
Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Pajak Daerah – LO	376.418.749.983,00	346.226.491.571,00
2.	Retribusi Daerah – LO	3.436.491.600,00	2.924.546.300,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.183.285.026,00	77.368.189.840,00
4.	Lain Lain PAD yang Sah – LO	69.665.969.308,35	46.305.767.532,59
	Jumlah PAD – LO	457.704.495.917,35	412.824.995.243,59

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah LO dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.1.1.1. Pajak Daerah LO	376.418.749.983,00	346.226.491.571,00

Pendapatan dari Pajak Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp376.418.749.983,00 sedangkan tahun 2021 senilai Rp346.226.491.571,00. Terjadi peningkatan senilai Rp30.192.258.412,00 atau 8,72%. Secara rinci realisasi Pajak Daerah – LO TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 79.

Tabel 79. Daftar Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	89.715.129.926,00	76.207.669.615,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	92.158.454.750,00	89.729.008.540,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.361.420.457,00	71.764.899.586,00
4.	Pajak Air Permukaan	350.306.208,00	386.392.173,00
5.	Pajak Rokok	114.833.438.642,00	108.138.521.657,00
	Jumlah	376.418.749.983,00	346.226.491.571,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO	3.436.491.600,00	2.924.546.300,00

Pendapatan dari Retribusi Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp3.436.491.600,00 sedangkan tahun 2021 senilai Rp2.924.546.300,00, terjadi peningkatan senilai Rp511.945.300,00 atau 17,51%. Secara rinci realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 80.

Tabel 80. Daftar Rincian Realisasi Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	633.802.000,00	73.570.500,00
2.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	15.780.000,00	5.175.000,00

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
3.	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	1.099.340.000,00	1.725.280.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	727.663.000,00	389.260.000,00
5.	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	0,00	8.741.000,00
6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	177.315.000,00	50.475.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	63.365.000,00	0,00
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	719.226.600,00	672.044.800,00
	Jumlah	3.436.491.600,00	2.924.546.300,00

7.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
-----------------	-----------------

8.183.285.026,00 17.368.189.840,00

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp8.183.285.026,00 sedangkan tahun 2021 senilai Rp17.368.189.840,00, terjadi penurunan senilai Rp9.184.904.814,00 atau 52,88%. Adapun pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
-----------------	-----------------

7.5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

69.665.969.308,35 46.305.767.532,59

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp69.665.969.308,35 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp46.305.767.532,59, terjadi peningkatan senilai Rp23.360.201.775,76 atau 50,45%. Secara rinci realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 81.

Tabel 81. Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.756.667.142,00	550.000.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	73.000.000,00	24.000.000,00
3.	Jasa Giro-LO	11.333.594.692,73	11.434.166.158,00
4.	Pendapatan Bunga-LO	473.409,97	0,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.075.378.684,09	1.170.812.508,27
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	14.768.916,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	10.194.783.186,89	237.034.346,32
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.526.572.312,00	642.151.559,00

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.422.230.525,26	310.085.100,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	277.831.656,41	425.515.732,00
10.	Pendapatan dari BLUD-LO	38.453.762.499,00	31.017.690.013,00
11.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	551.675.200,00	479.543.200,00
	Jumlah	69.665.969.308,35	46.305.767.532,59

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.436.545.261.740,00	1.609.482.634.440,00

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selama Tahun 2022 Pendapatan Transfer senilai Rp1.436.545.261.740,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp1.609.482.634.440,00, terjadi penurunan senilai Rp172.937.372.700,00 atau 10,74%. Secara rinci realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 82. Daftar Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	20.886.554.055,00	23.055.410.591,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	969.853.896.329,00	970.916.874.000,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	402.941.678.356,00	599.068.685.849,00
4.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	42.863.133.000,00	16.441.664.000,00
	Jumlah	1.436.545.261.740,00	1.609.482.634.440,00

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil - LO

Dana Bagi Hasil – LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2022 senilai Rp20.886.554.055,00 sedangkan tahun 2021 senilai Rp23.055.410.591,00, terjadi penurunan senilai Rp2.168.856.536,00 atau 9,41%. Rincian Dana Bagi Hasil - LO tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 83.

Tabel 83. Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	DBH PBB-LO	6.993.911.804,00	6.554.670.818,00
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	13.193.252.510,00	15.452.469.077,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	394.780.827,00	478.231.336,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	134.485.575,00	44.210.754,00
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	104.302.339,00	27.378.878,00

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
6.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-L	20.589.000,00	163.284.148,00
7.	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	45.232.000,00	335.165.580,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil - LO	20.886.554.055,00	23.055.410.591,00

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp969.853.896.329,00. Pendapatan tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.062.977.671,00 atau 0,11% dibandingkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp970.916.874.000,00.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp402.941.678.356,00. Pendapatan tersebut lebih rendah senilai Rp196.127.007.493,00 atau 32,74% dibandingkan tahun 2021 yaitu senilai Rp599.068.685.849,00. Rincian Pendapatan transfer DAK Tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 84.

Tabel 84. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	54.429.759.400,00	112.607.885.208,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	20.436.198.330,00	4.156.618.480,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	0,00	19.768.462.631,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	483.429.420,00	14.999.902.494,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	11.202.951.698,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	1.695.947.560,00	3.929.575.772,00
7.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	3.250.514.757,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	5.360.652.970,00	9.171.897.285,00
9.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	6.651.773.174,00	5.229.137.125,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	3.943.407.660,00	12.550.688.441,00
11.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.842.810.598,00	4.589.391.423,00
12.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.387.764.550,00
13.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	16.832.639.515,00	3.051.185.000,00
14.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK-LO	112.136.412.316,00	0,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	2.484.723.830,00	0,00
16.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	0,00	3.099.108.262,00

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
17.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	29.975.421,00
18.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	95.934.709.523,00	309.309.652.000,00
19.	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO	0,00	6.120.000.000,00
20.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.844.362.000,00	1.990.000.000,00
21.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	67.048.830.000,00	65.693.086.000,00
22.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.612.250.000,00	528.000.000,00
23.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.805.624.000,00	543.226.000,00
24.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.712.500.000,00	0,00
25.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	2.014.209.000,00	2.037.968.977,00
26.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	1.622.678.340,00	1.874.103.920,00
27.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.977.590.405,00
28.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	850.365.720,00	0,00
29.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	198.395.000,00	0,00
	Jumlah	402.941.678.356,00	599.068.685.849,00

4. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk TA 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp42.863.133.000,00 naik senilai Rp26.421.469.000,00 dibandingkan Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah tahun 2021 yaitu senilai Rp16.441.664.000,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	59.559.299.321,00	53.750.623.475,09

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp59.559.299.321,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp53.750.623.475,09. Terjadi peningkatan senilai Rp5.808.675.845,91 atau 10,81%. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 85. Daftar Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	PENDAPATAN HIBAH	59.559.299.321,00	53.750.623.475,09
a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	53.807.325.941,00	47.260.169.549,27
b.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	2.196.646.434,00
c.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	4.900.000,00
d.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	4.036.804.280,00	4.045.591.771,82

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
e.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.715.169.100,00	216.682.720,00
2.	LAIN-LAIN PENDAPATAN	0,00	26.633.000,00
	Jumlah	59.559.299.321,00	53.750.623.475,09

7.5.4.2. Beban dan Transfer

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.918.483.333.546,20	1.868.269.293.503,81

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selama tahun 2022, jumlah Beban untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.918.483.333.546,20 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp1.868.269.293.503,81, terjadi peningkatan senilai Rp50.214.040.042,39 atau 2,69%, dengan rincian pada Tabel 86.

Tabel 86. Realisasi Beban dan Transfer Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Operasi	1.679.457.574.912,20	1.697.836.891.199,81
2.	Beban Transfer	237.723.309.630,00	170.432.402.304,00
3.	Beban Tidak Terduga	1.302.449.004,00	0,00
	Jumlah	1.918.483.333.546,20	1.868.269.293.503,81

7.5.4.2.1. Beban Operasi

TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.679.457.574.912,20	1.697.836.891.199,81

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Lain-Lain. Selama tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, Beban Operasi adalah senilai Rp1.679.457.574.912,20 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp1.697.836.891.199,81, terjadi penurunan senilai Rp18.379.316.287,61 atau 1,08%. Rincian Belanja Operasi dapat digambarkan dalam Tabel 87.

Tabel 87. Daftar Realisasi Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Pegawai	608.886.977.326,29	554.925.427.685,13
2.	Beban Barang dan Jasa	664.565.522.666,50	586.142.589.666,19
3.	Beban Bunga	24.506.284.232,00	13.030.112.208,00
4.	Beban Hibah	56.996.878.535,00	256.621.204.016,70
5.	Beban Bantuan Sosial	1.610.000.000,00	2.490.000.000,00
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	322.891.912.152,41	283.894.388.832,79
7.	Beban Lain-lain	0,00	733.168.791,00
	Jumlah Beban Operasi	1.679.457.574.912,20	1.697.836.891.199,81

Secara rinci uraian Beban Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.1. Beban Pegawai	608.886.977.326,29	554.925.427.685,13

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2022. Beban Pegawai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp608.886.977.326,29 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp554.925.427.685,13, terjadi peningkatan senilai Rp53.961.549.641,16 atau 9,72% dengan rincian pada Tabel 88.

Tabel 88. Daftar Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	388.200.566.109,00	351.471.232.631,30
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	96.431.259.392,29	104.424.013.080,83
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.079.177.326,00	75.782.094.005,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.833.032.404,00	21.816.825.762,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	141.714.045,00	229.662.206,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	1.201.288.050,00	1.201.600.000,00
	Jumlah	608.886.977.326,29	554.925.427.685,13

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa	664.565.522.666,50	586.142.589.666,19

Beban Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Beban Barang dan Jasa BOS serta BLUD. Realisasi Beban Barang dan Jasa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp664.565.522.666,50 sedangkan Tahun 2021 adalah senilai Rp586.142.589.666,19, terjadi peningkatan senilai Rp78.422.933.000,31 atau 13,38%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 89.

Tabel 89. Daftar Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Persediaan	246.601.690.184,17	160.896.116.547,14
2.	Beban Jasa	266.400.293.782,61	274.946.565.462,81
3.	Beban Pemeliharaan	36.163.836.927,72	37.887.847.914,24
4.	Beban Perjalanan Dinas	115.399.701.772,00	112.412.059.742,00
	Jumlah	664.565.522.666,50	586.142.589.666,19

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.3. Beban Bunga	24.506.284.232,00	13.030.112.208,00

Beban Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk membayar bunga pinjaman atas utang pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mendanai pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Sulawesi Barat dan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Beban Bunga Tahun 2022 senilai Rp24.506.284.232,00, sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp13.030.112.208,00, terdapat peningkatan senilai Rp11.476.172.024,00 atau 88,07%.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.4. Beban Hibah	56.996.878.535,00	256.621.204.016,70

Beban Hibah adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2022 dari kelompok beban hibah dalam bentuk uang dan barang. Realisasi Beban Hibah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp56.996.878.535,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp256.621.204.016,70, terdapat penurunan senilai Rp199.624.325.481,70 atau 77,79%. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 90. Daftar Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	8.249.181.484,70
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.234.347.500,00	0,00
3.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.397.136.434,00	247.297.772.932,00
4.	Beban Hibah Dana BOS	16.291.145.001,00	0,00
5.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.249.600,00	1.074.249.600,00
	Jumlah	56.996.878.535,00	256.621.204.016,70

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial	1.610.000.000,00	2.490.000.000,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp1.610.000.000,00 sedangkan tahun 2021 senilai Rp2.490.000.000,00. Nilai Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan Rp880.000.000,00 atau 35,34%.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	322.891.912.152,41	283.894.388.832,79

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap

dan Aset Tak Berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan diamortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp322.891.912.152,41 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp283.894.388.832,79, terdapat peningkatan Rp38.997.523.319,62 atau 13,74%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 91.

Tabel 91. Datar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	102.694.153.019,98	92.460.164.582,89
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.842.954.507,00	92.427.291.303,50
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.635.129.677,00	94.164.699.195,00
4.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	22.042.050,80
5.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.719.674.948,43	4.800.191.700,60
	Jumlah	322.891.912.152,41	283.894.388.832,79

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.1.7. Beban Lain-Lain	0,00	733.168.791,00

Beban Lain-Lain merupakan beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan utama entitas. Beban lain-lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.2. Beban Transfer	237.723.309.630,00	170.432.402.304,00

Beban Transfer adalah pengeluaran anggaran berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Selama tahun 2022, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi Beban Transfer adalah senilai Rp237.723.309.630,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp170.432.402.304,00, terdapat kenaikan senilai Rp67.290.907.326,00 atau 39,48%. Rincian Beban Transfer dapat ditunjukkan dalam Tabel 92.

Tabel 92. Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	203.437.930.795,00	161.832.402.304,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	20.318.689.935,00	0,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	13.966.688.900,00	8.600.000.000,00
	Jumlah	237.723.309.630,00	170.432.402.304,00

1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp203.437.930.795,00. Realisasi tersebut diperuntukkan untuk enam kabupaten se-Sulawesi Barat tahun 2022 triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan rincian pada Tabel 93.

Tabel 93. Daftar Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamuju	46.451.628.175,00	37.503.001.319,00
2.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Majene	25.524.891.280,00	19.985.477.998,00
3.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Polman	52.027.318.167,00	38.973.856.990,00
4.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamasa	18.978.097.829,00	14.811.575.467,00
5.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pasangkayu	33.601.496.723,00	22.380.684.599,00
6.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamuju Tengah	26.854.498.621,00	18.727.048.513,00
	Jumlah	203.437.930.795,00	152.381.644.886,00

2. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp20.318.689.935,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp0,00, dengan rincian pada Tabel 94.

Tabel 94. Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Polman	327.577.200,00	0,00
2.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Majene	63.550.000,00	0,00
3.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamasa	1.034.251.000,00	0,00
4.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Pasangkayu	334.756.001,00	0,00
5.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju Tengah	55.493.334,00	0,00
6.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju	18.503.062.400,00	0,00
	Jumlah	20.318.689.935,00	0,00

3. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp13.966.688.900,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp8.600.000.000,00, dengan rincian pada Tabel 95.

Tabel 95. Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Polman	494.208.800,00	1.700.000.000,00
2.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Majene	746.193.000,00	200.000.000,00
3.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamasa	10.524.209.600,00	4.100.000.000,00
4.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Pasangkayu	593.158.000,00	0,00
5.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju Tengah	949.066.500,00	0,00
6.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju	659.853.000,00	2.600.000.000,00
	Jumlah	13.966.688.900,00	8.600.000.000,00

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.4.2.3. Beban Tidak Terduga	1.302.449.004,00	0,00

Beban Tidak Terduga selama tahun 2022, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.302.449.004,00 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp0,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 diperuntukan untuk penanganan banjir di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar serta Pembayaran Utang atas Kesalahan Transfer Jasa Giro Bos untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamasa.

7.5.4.3. Surplus/(Defisit) Non Operasional

Surplus/(Defisit) Non Operasional Tahun 2022 senilai Rp14.500.431.752,63 dan tahun 2021 senilai Rp(114.662.848.256,36) terdiri dari:

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdapat transaksi Surplus dari Kegiatan Operasional Lainnya senilai Rp23.694.063.338,00, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penambahan investasi atas laba Perusa Sebuku Energi Malaqbi tahun 2022.

2. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi Defisit Penjualan Aset Non Lancar sedangkan pada tahun 2021 terdapat transaksi sebesar Rp242.380.877,41.

3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Selama tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdapat transaksi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp9.193.631.585,37 sedangkan pada tahun 2021 terdapat transaksi sebesar Rp114.420.467.378,95 sebagai akibat dari penghapusan aset lainnya dan penjualan aset non lancar.

7.5.4.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	Rp	0,00 +
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00

2. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam	Rp	0.00
Beban Luar Biasa Lainnya	Rp	29.322.500,00 +
Beban Luar Biasa	Rp	29.322.500,00

Beban Luar Biasa senilai Rp29.322.500,00 merupakan Kelebihan bayar sisa penyetoran uang pengganti senilai Rp29.322.500,00 yang wajib di kembalikan kepada terdakwa (CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA an Hasanuddin), berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid. Sus Tpk/2016/PN.Mamuju tanggal 13 Juni 2016.

7.5.4.5. Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Surplus/(Defisit) – LO sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp49.796.832.684,78 sedangkan tahun 2021 adalah senilai Rp90.479.002.530,51.

7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Kenaikan/ penurunan kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 96.

Tabel 96. Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)		
Uraian	2022	2021
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Operasi	349.690.757.807,10	440.649.573.381,64
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Investasi	(544.790.179.699,00)	(402.317.597.767,42)
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Pendanaan	141.724.225.589,00	28.774.976.144,00
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Transitoris	786.101.938,00	(3.408.355.582,17)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(52.589.094.364,90)	63.698.596.176,05

Pada Tahun 2022 penurunan kas senilai (52.589.094.364,90). Penurunan tersebut diperoleh dari arus kas bersih aktivitas operasi senilai Rp349.690.757.807,10, arus kas bersih aktivitas investasi senilai (544.790.179.699,00), arus kas bersih aktivitas pendanaan senilai Rp141.724.225.589,00, dan aktivitas transitoris senilai Rp786.101.938,00. Adapun rincian arus kas sebagai berikut.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	349.690.757.807,10	440.649.573.381,64

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2022. Arus

Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah senilai Rp349.690.757.807,10 dengan rincian pada Tabel 97.

Tabel 97. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	1.891.862.128.192,39	2.024.121.075.786,41
Arus Keluar Kas	1.542.171.370.385,29	1.583.471.502.404,77
Arus Kas Bersih	349.690.757.807,10	440.649.573.381,64

Arus Masuk Kas senilai Rp1.891.862.128.192,39 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp1.542.171.370.385,29 merupakan realisasi Belanja selain Belanja Modal.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(544.790.179.699,00)	(402.317.597.767,42)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas Investasi pada Tahun 2022 menunjukkan arus kas bersih senilai Rp(544.790.179.699,00) dengan rincian pada Tabel 98.

Tabel 98. Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	2.756.667.142,00	550.000.000,00
Arus Keluar Kas	547.546.846.841,00	402.867.597.767,42
Arus Kas Bersih	(544.790.179.699,00)	(402.317.597.767,42)

Arus Masuk Kas senilai Rp2.756.667.142,00 bersumber dari penjualan aset lainnya sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp547.546.846.841,00 bersumber dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
7.5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	141.724.225.589,00	28.774.976.144,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dalam tahun 2022 adalah senilai Rp141.724.225.589,00 dengan rincian pada Tabel 99.

Tabel 99. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	195.669.938.135,00	75.000.000.000,00
Arus Keluar Kas	53.945.712.546,00	46.225.023.856,00
Arus Kas Bersih	141.724.225.589,00	28.774.976.144,00

Arus Kas Masuk senilai Rp195.669.938.135,00 merupakan pinjaman dalam negeri- Lembaga keuangan bukan Bank, sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp53.945.712.546,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga bukan Bank (PT.SMI)

TA 2022
(Rp)

TA 2021
(Rp)

7.5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

786.101.938,00

(3.408.355.582,17)

Arus Kas Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam Tahun 2022, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah senilai Rp786.101.938,00 dengan rincian pada Tabel 100.

Tabel 100. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	129.482.174.278,00	108.693.499.064,00
Arus Keluar Kas	128.696.072.340,00	112.101.854.646,17
Arus Kas Bersih	786.101.938,00	(3.408.355.582,17)

Dengan demikian pada akhir Tahun Anggaran 2022 terdapat saldo akhir kas di BUD (Kas Daerah), Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Bendahara BOS, dan Kas di Bendahara BLUD, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Kas di BUD	Rp 170.189.851.292,74
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp (52.589.094.364,90)
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp 117.600.756.927,84

Rincian saldo akhir Kas di BUD pada Neraca dapat dilihat pada Tabel 101.

Tabel 101. Rincian Saldo Kas di BUD Pada Neraca per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	102.018.271.777,95
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	961.851.446,89
4	Kas di Bendahara BOS	59.530.974,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	121.425.084,00
6	Kas di Bendahara BLUD	14.439.677.645,00
	Jumlah	117.600.756.927,84

7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal
Jumlah ekuitas awal senilai Rp2.908.080.518.685,25 merupakan reklasifikasi dari ekuitas akhir tahun 2021.
2. Surplus/(Defisit) - LO pada periode bersangkutan
Surplus/(Defisit) - LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Surplus/(Defisit) - LO sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp49.796.832.684,78.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Pada tahun 2022 terdapat koreksi ekuitas lainnya senilai Rp29.925.685.838,88 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi Nilai Awal Kas
Sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan pengurangan atas nilai kas tersebut senilai Rp125.160.800,00.
 - b. Koreksi Nilai Awal Aset Tetap
Sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan penambahan atas nilai aset tetap tersebut senilai Rp30.685.059.120,99.
 - c. Koreksi Nilai Awal Aset
Sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan penambahan atas nilai aset tersebut senilai Rp1.245.580.878,42.
 - d. Koreksi Nilai Awal Kewajiban
Sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan penambahan atas nilai kewajiban tersebut senilai Rp2.682.559.062,00.
 - e. Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya
Sampai dengan 31 Desember 2022 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan pengurangan atas nilai ekuitas lainnya tersebut senilai Rp4.562.352.422,79.

4. Ekuitas akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus/(defisit) tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyajikan ekuitas akhir TA 2022 senilai Rp2.987.803.037.208,91 dan merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

7.6. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam tanggal 21 November 2019, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PDT/2020/TP MKS tanggal 26 Februari 2020 terkait Gugatan Wanprestasi Pengadaan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2016 antara PT Kusuma Dipa Nugraha melawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk membayar kepada PT Kusuma Dipa Nugraha senilai total Rp21.737.016.000,00 yang terdiri dari:

1. Pembayaran prestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus tahun 2016 senilai Rp20.701.920.000,00; dan
2. Pembayaran ganti rugi materiil senilai Rp1.035.096.000,00.

Berdasarkan akta pernyataan permohonan peninjauan Kembali di ajukan oleh kuasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor 08/pdtG/2019/PN Mam tanggal 14 Maret 2023, sebagai termohon /tergugat sebagai pemohon peninjauan kembali terhadap putusan :

- a. Mahkamah Agung RI tanggal 05 November 2020 Nomor 2799 K /Pdt.2020;
- b. Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2020 Nomor 08 PDT/2020/PT MKS; dan
- c. Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 November 2019 Nomor 8/pdt G /2019/PN Mam.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Belum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan selama peninjauan kembali belum keluar.

7.7. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

7.7.1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2022 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022 secara kumulatif direncanakan senilai Rp1.896.276.561.452,00 dan terealisasi senilai Rp1.894.618.795.334,39 atau 99,91% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah TA2022 dianggarkan senilai Rp428.261.986.457,00 dan terealisasi senilai Rp457.963.285.700,39 atau 106,94%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah TA 2022 ini direncanakan senilai Rp351.622.443.842,00 terealisasi senilai Rp376.418.749.983,00 atau 107,05%;
 - 2) Retribusi Daerah TA 2022 ini direncanakan senilai Rp4.366.340.000,00 terealisasi senilai Rp3.437.211.600,00 atau 78,72%;

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2021 ini direncanakan senilai Rp12.867.247.793,00 terealisasi senilai Rp8.183.285.026,00 atau 63,60%; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 direncanakan senilai Rp59.405.954.822,00 terealisasi senilai Rp69.924.039.091,39 atau 117,71%.
- b. Pendapatan Transfer TA 2022 dianggarkan senilai Rp1.466.672.574.995,00 yang sampai akhir TA 2021 terealisasi senilai Rp1.434.593.300.534,00 atau 97,81% dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 dianggarkan senilai Rp16.816.407.850,00 terealisasi senilai Rp18.629.983.935,00 atau 110,78%;
 - 2) Dana Alokasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan senilai Rp485.053.315,00 dan terealisasi senilai Rp304.608.914,00 atau 62,80%;
 - 3) Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp972.189.180.000,00 dan terealisasi senilai Rp969.853.896.329,00 atau 99,76%;
 - 4) Dana Alokasi Khusus dianggarkan senilai Rp434.318.800.830,00 dan terealisasi senilai Rp402.941.678.356,00 atau 92,78%; dan
 - 5) Dana Insentif Daerah dianggarkan senilai Rp42.863.133.000,00 dan terealisasi senilai Rp42.863.133.000,00 atau 100,00%;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan senilai Rp1.342.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.062.209.100,00 atau 153,67%.

2. Belanja

Pada Tahun 2022, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Di dalam APBD TA 2022, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp1.981.553.974.505,00 sampai akhir TA 2021 terealisasi senilai Rp1.864.813.748.898,29 atau 94,11% seperti pada Tabel 102.

Tabel 102. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah			
a.	Belanja Pegawai	628.157.169.791,00	606.681.872.761,29	96,58
b.	Belanja Barang dan Jasa	668.024.447.607,00	628.999.130.965,00	94,16
c.	Belanja Bunga	24.894.625.310,00	24.890.208.737,00	99,98
d.	Belanja Hibah	57.769.529.600,00	53.762.531.035,00	93,06
e.	Belanja Bantuan Sosial	1.634.000.000,00	1.610.000.000,00	98,53
f.	Belanja Modal	599.493.986.273,00	547.546.846.841,00	91,33
g.	Belanja Tak Terduga	1.580.215.924,00	1.323.158.559,00	83,73
2.	Transfer			
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	190.619.089.493,00	190.619.089.493,00	100,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	34.411.264.500,00	34.285.378.835,00	99,63

3. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan setelah perubahan senilai Rp365.969.587.736,00 dan terealisasi senilai Rp365.969.587.736,74 atau 100,00%; dan
- b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan setelah perubahan pada Tahun 2022 senilai Rp55.661.820.690,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi senilai Rp53.945.712.546,00 atau 96,92%.

7.7.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp170.299.649.601,74 yang merupakan SILPA Tahun 2021, sementara Saldo Anggaran Lebih akhir yang merupakan SILPA TA 2022 senilai Rp116.924.453.298,84.

7.7.3. Laporan Neraca

1. Aset

Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan pada tahun 2022 bernilai Rp3.343.152.636.287,71 dan mengalami peningkatan 6,16% dibanding tahun 2021 senilai Rp3.149.095.572.686,31. Aset tersebut terdiri atas:

a. Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 bernilai Rp183.457.037.851,26 sedangkan pada tahun 2021, Aset Lancar bernilai Rp211.058.179.593,10 atau mengalami penurunan 13,08%.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 bernilai Rp70.274.776.128,00 sedangkan pada tahun 2021, Investasi Jangka Panjang bernilai Rp46.580.712.790,00.

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat setelah penyusutan pada tahun 2022 bernilai Rp2.986.112.145.870,31 sedangkan pada tahun 2021 bernilai Rp2.823.955.099.079,73 atau mengalami kenaikan 5,74%.

d. Dana Cadangan

Pada tahun 2022 maupun 2021 tidak terdapat dana cadangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Neraca tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp103.308.676.438,14 sementara pada tahun 2021, bernilai Rp67.501.581.223,48 atau mengalami kenaikan 1,29%.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 senilai Rp355.349.599.078,80 mengalami kenaikan 47,44% dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp241.015.054.001,06.

3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 senilai Rp2.936.018.008.325,09 dan mengalami kenaikan 0,96% jika dibandingkan tahun 2021 senilai Rp2.908.080.518.685,25

7.7.4. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp1.953.809.056.978,35 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah senilai Rp457.704.495.917,35;
- b. Pendapatan Transfer/Perimbangan senilai Rp1.436.545.261.740,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp59.559.299.321,00.

2. Beban

Beban per 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp1.918.483.333.546,20 sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.868.269.293.503,81 atau naik sebesar 2,69%.

7.7.5. Laporan Arus Kas

Pada Tahun 2022, saldo Akhir Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp117.600.756.927,84 mengalami penurunan kas senilai Rp52.589.094.364,90 atau 30,90% dari Tahun 2021 senilai Rp170.189.851.292,74.

7.7.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp2.987.803.037.208,91 sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.908.080.518.685,25 dan mengalami kenaikan senilai 2,74%.

Salinan Seperti Aslinya
Hanya Untuk Pemohon Informasi
PIADC181

Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2022

Lampiran 1

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022	& dari alokasi anggaran fungsi pendidikan	P-APBD 2022	& dari alokasi anggaran fungsi pendidikan
		JUMLAH		JUMLAH	
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	598.513.642.546,00		592.804.364.603,00	
	1) Belanja Operasi:	435.848.472.335,00		422.992.091.003,00	
	a. belanja pegawai;	310.476.858.368,00		272.126.254.021,00	
	b. belanja barang dan jasa;	124.871.613.967,00		131.327.046.982,00	
	c. belanja hibah;	500.000.000,00		19.538.790.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal:	162.665.170.211,00		169.812.273.600,00	
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara	61.509.466.104,00		43.808.024.527,00	
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00	
	a. Belanja bantuan keuangan...	0,00		0,00	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	61.509.466.104,00		43.808.024.527,00	
	1 Dinas Kesehatan	246.510.080,00		276.771.080,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.220.000,00		189.481.000,00	
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.200.000,00		22.200.000,00	
	c. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.090.080,00		65.090.080,00	
	2 RSUD	1.350.450.799,00		1.298.171.987,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.178.264.799,00		1.125.985.987,00	
	b. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	172.186.000,00		172.186.000,00	
	3 Dinas Pekerjaan Umum	1.296.854.640,00		1.067.789.640,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	609.776.420,00		593.776.420,00	
	b. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	187.079.000,00		86.079.000,00	
	c. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	499.999.220,00		357.904.220,00	
	4 Dinas Perumahan dan Permukiman	525.127.820,00		425.069.020,00	
	a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	229.051.520,00		229.051.520,00	
	b. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	196.017.500,00		196.017.500,00	
	c. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	100.058.800,00		0,00	
	5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	520.263.009,00		747.225.405,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	315.993.000,00		566.273.000,00	
	b. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40.000.000,00		40.000.000,00	
	c. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	164.270.009,00		141.952.405,00	
	6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.390.000,00		32.803.000,00	
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	47.390.000,00		32.803.000,00	
	7 Dinas Sosial	475.076.980,00		378.666.980,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.410.000,00		0,00	
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00		15.000.000,00	
	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	30.000.000,00		30.000.000,00	
	d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	95.081.580,00		95.081.580,00	
	e. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	80.398.500,00		80.398.500,00	
	f. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	158.186.900,00		158.186.900,00	
	8 Dinas Tenaga Kerja	928.009.579,00		843.299.579,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.710.000,00		36.000.000,00	
	b. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	306.911.880,00		306.911.880,00	
	c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	300.387.699,00		500.387.699,00	
	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	2.203.676.600,00		2.158.727.200,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.632.000,00		24.786.000,00	
	b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.301.500.000,00		1.114.790.600,00	
	c. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	90.008.600,00		90.008.600,00	
	d. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	185.000.000,00		285.000.000,00	
	e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	75.450.000,00		0,00	
	f. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0,00		51.306.000,00	
	g. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	185.000.000,00		285.000.000,00	
	h. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	314.086.000,00		307.836.000,00	
	10 Dinas Ketahanan Pangan	38.132.000,00		32.532.000,00	
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000,00		0,00	
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.132.000,00		32.532.000,00	
	11 Dinas Lingkungan Hidup	221.329.912,00		192.366.520,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.755.652,00		69.709.260,00	
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.370.000,00		8.370.000,00	
	c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	69.709.260,00		66.759.260,00	
	d. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.495.000,00		47.528.000,00	
	12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	172.905.240,00		172.905.240,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.375.000,00		26.375.000,00	
	b. Bimbingan Teknis untuk Pendataan Penduduk	146.530.240,00		146.530.240,00	
	13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	78.810.000,00		26.764.000,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.810.000,00		26.764.000,00	
	14 Dinas Perhubungan	250.000.000,00		118.500.000,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00		18.500.000,00	
	b. Pengetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	100.000.000,00		100.000.000,00	
	15 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	487.434.652,00		666.016.820,00	
	a. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	418.207.940,00		417.822.900,00	
	b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	69.226.712,00		248.193.920,00	
	16 Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil	1.831.763.540,00		1.990.732.602,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.653.000,00		107.021.000,00	
	b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	349.585.020,00		291.570.500,00	
	c. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	921.499.900,00		1.206.130.002,00	
	d. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	94.440.600,00		94.440.600,00	
	e. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	349.585.020,00		291.570.500,00	
	17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	5.066.000,00		10.466.000,00	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.066.000,00		10.466.000,00	
	18 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.390.929.060,00		5.524.706.360,00	
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.792.000,00		40.820.000,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022	& dari alokasi anggaran fungsi pendidikan	P-APBD 2022	& dari alokasi anggaran fungsi pendidikan
		JUMLAH		JUMLAH	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	773.829.400,00		773.829.400,00	
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	204.749.920,00		0,00	
d	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.002.877.060,00		1.466.377.060,00	
e	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Di selenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	450.000.000,00		426.000.000,00	
f	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	325.000.000,00		324.998.000,00	
g	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1.256.680.680,00		1.732.681.900,00	
h	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	240.000.000,00		210.000.000,00	
i	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	550.000.000,00		50.000.000,00	
j	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00		500.000.000,00	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.296.114.000,00		7.557.750.658,00	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.924.000,00		23.000.000,00	
b	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	680.000.000,00		663.915.000,00	
c	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	0,00		25.582.000,00	
d	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	486.538.000,00		6.772.993.658,00	
e	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	99.652.000,00		92.000.000,00	
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.397.798.185,00		994.389.600,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.493.000,00		76.166.000,00	
b	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	348.073.875,00		321.554.500,00	
c	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	306.296.000,00		182.835.000,00	
d	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	636.935.310,00		4.69.833.000,00	
21	Dinas Pariwisata	311.828.741,00		605.247.080,00	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.328.741,00		141.140.080,00	
b	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100.000.000,00		400.000.000,00	
c	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	64.500.000,00		64.407.000,00	
22	Dinas Perkebunan	368.936.000,00		213.915.500,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	203.936.000,00		115.977.500,00	
b	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	97.938.000,00		97.938.000,00	
c	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	67.062.000,00		0,00	
23	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	318.801.520,00		269.411.140,00	
a	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	318.801.520,00		269.411.140,00	
24	Dinas Kehutanan	2.125.698.190,00		2.077.664.130,00	
a	Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tari Hutan	2.125.698.190,00		2.077.664.130,00	
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.000.000,00		24.209.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00		24.209.000,00	
26	Dinas Transmigrasi	414.716.560,00		380.789.560,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.195.000,00		31.500.000,00	
b	Penyuluhan Transmigrasi	99.509.560,00		99.509.560,00	
c	Pelatihan Transmigrasi	18.780.000,00		118.780.000,00	
d	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	141.232.000,00		131.000.000,00	
27	Sekretariat Daerah	24.688.029.412,00		955.449.412,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	327.915.200,00		161.888.200,00	
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	562.706.000,00		359.198.000,00	
c	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	23.48.978.020,00		88.303.020,00	
d	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	365.033.192,00		279.509.192,00	
e	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	83.406.000,00		66.551.000,00	
28	Sekretariat DPRD	9.845.301.180,00		9.051.139.640,00	
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.606.949.200,00		7.266.427.660,00	
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	411.224.720,00		411.224.720,00	
c	Bimbingan Teknis DPRD	1.827.127.260,00		1.373.487.260,00	
29	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	15.000.000,00		7.800.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00		7.800.000,00	
30	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	22.125.000,00		27.445.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000,00		27.445.000,00	
31	Badan Kepegawaian Daerah	1.066.681.424,00		767.101.424,00	
a	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	91.436.944,00		101.636.944,00	
b	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	975.244.480,00		665.464.480,00	
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.288.019.821,00		2.485.180.290,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.382.000,00		58.382.000,00	
b	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan/Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	130.724.060,00		629.224.060,00	
c	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	36.046.750,00		36.046.750,00	
d	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Penguembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	59.812.900,00		215.811.600,00	
e	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.003.054.111,00		1.545.715.880,00	
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	216.616.560,00		170.516.560,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00		15.000.000,00	
b	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	47.855.000,00		41.755.000,00	
c	Sosialisasi dan Difusi Hasil-Hasil Penelitian	153.761.560,00		113.761.560,00	
34	Badan Penghubung	259.897.000,00		224.897.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.897.000,00		224.897.000,00	
35	Inspekturat Daerah	404.555.000,00		391.766.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	314.558.000,00		231.508.000,00	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.999.000,00		137.858.000,00	
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.998.000,00		22.400.000,00	
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.559.617.600,00		1.639.569.100,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.568.000,00		24.632.000,00	
b	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.193.844.600,00		1.193.844.600,00	
c	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	123.800.000,00		245.000.000,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022	& dari alokasi anggaran fungsi pendidikan	P-APBD 2022	& dari alokasi anggaran fungsi pendidikan
		JUMLAH		JUMLAH	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180.405.000,00		176.092.500,00	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		660.023.108.650,00		636.612.389.130,00
3	Total Belanja Daerah		2.015.662.940.595,00		2.164.532.583.986,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2.3) x 100%		32,74%		29,41%

Salinan Seperti Aslinya
Hanya Untuk Pemohon Informasi
PIADC181

Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022	& dari alokasi anggaran Alokasi Kesehatan	P-APBD 2022	& dari alokasi anggaran Kesehatan
		JUMLAH		JUMLAH	
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:		127.823.293.695,00		150.952.074.325,00
	1) Belanja Operasi:	122.422.816.012,00		142.182.596.144,00	
	a. belanja pegawai;	53.969.878.648,00		50.816.127.644,00	
	b. belanja barang dan jasa;	67.452.937.364,00		90.366.468.500,00	
	c. belanja hibah;	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	5.400.477.683,00		8.769.478.181,00	
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		42.739.474.790,00		36.088.737.286,00
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00	
	Belanja bantuan keuangan...				
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	42.739.474.790,00		36.088.737.286,00	
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.351.418.000,00		7.837.405.600,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan				
	a. Sekolah pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.695.274.000,00		3.076.261.600,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan				
	b. Sekolah pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.223.440.000,00		3.328.440.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan				
	c. Sekolah pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.432.704.000,00		1.432.704.000,00	
	2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.012.079.000,00		2.881.624.500,00	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan				
	a. Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bayangkara POLDA SULBAR)	2.825.000.000,00		2.795.545.500,00	
	Pembinaan Teknis SDM dan				
	b. Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	187.079.000,00		86.079.000,00	
	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	114.486.460,00		124.550.470,00	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				
	a. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	50.187.520,00		55.374.220,00	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	64.298.940,00		69.176.250,00	
	4 Dinas Sosial	483.982.400,00		530.708.400,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan				
	a. Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar	78.960.400,00		113.960.400,00	
	Penyandang Disabilitas Terlantar				
	b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	44.983.500,00		43.733.500,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan				
	c. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	26.991.000,00		26.991.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan				
	d. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	37.320.000,00		46.036.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan				
	e. Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	38.755.000,00		38.755.000,00	
	Penyediaan Perumahan				
	f. Penyediaan Perumahan	44.227.000,00		44.227.000,00	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				
	g. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	212.745.500,00		217.005.500,00	
	5 Dinas Tenaga Kerja	280.111.660,00		385.842.110,00	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				
	a. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	280.111.660,00		385.842.110,00	
	6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kelangkaan	1.240.650.000,00		1.200.707.420,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	118.000.000,00		183.818.000,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	205.000.000,00		194.768.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	175.000.000,00		175.044.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30.600.000,00		52.350.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				
	e. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	154.534.000,00		140.203.560,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				
	f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	247.016.000,00		165.467.860,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022	& dari alokasi anggaran Alokasi Kesehatan	P-APBD 2022	& dari alokasi anggaran Kesehatan
		JUMLAH		JUMLAH	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga				
g	Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0,00		51.306.000,00	
h	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	160.500.000,00		131.700.000,00	
i	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	150.000.000,00		106.050.000,00	
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.109.743.484,00		1.967.285.504,00	
a.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	162.436.700,00		152.376.700,00	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	94.927.730,00		70.608.730,00	
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	94.126.900,00		91.278.900,00	
d	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	438.286.924,00		431.261.924,00	
e	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	750.000.000,00		725.040.800,00	
f	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	77.893.580,00		49.797.580,00	
g	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	57.888.880,00		54.678.880,00	
h	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	78.929.380,00		71.329.380,00	
i	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.495.000,00		47.528.000,00	
j	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	54.711.680,00		45.737.900,00	
k	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	230.046.710,00		227.646.710,00	
8	Dinas Lahan, Rancangan, Rukututuran dan	552.305.231,00		997.343.981,00	
a.	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	173.246.650,00		548.445.380,00	
b	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	35.993.500,00		120.431.520,00	
c.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	299.865.081,00		289.767.081,00	
d	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	43.200.000,00		38.700.000,00	
9	Sekretariat Daerah	111.882.261,00		84.285.121,00	
a.	Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	64.195.140,00		47.097.140,00	
b	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43.499.160,00		33.000.020,00	
c.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH)	3.099.600,00		3.099.600,00	
d	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH)	372.090,00		372.090,00	
e	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH)	716.271,00		716.271,00	
10	Sekretariat DPRD	489.962.880,00		289.823.513,00	
a.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	337.788.000,00		150.288.000,00	
b	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD)	130.500.000,00		126.637.840,00	
c.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD)	3.442.320,00		3.045.993,00	
d	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Belanja Jaminan Kematian Kerja DPRD)	18.232.560,00		9.851.680,00	
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	649.719.779,00		551.921.100,00	
a.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Pelaksanaan Stunting)	649.719.779,00		551.921.100,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2022	& dari alokasi anggaran Alokasi Kesehatan	P-APBD 2022	& dari alokasi anggaran Kesehatan
		JUMLAH		JUMLAH	
	12 Bantuan Pengelola Keuangan dan Penerimaan Daerah	25.817.569.683,00		19.025.630.475,00	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN)	23.267.569.683,00		16.475.630.475,00	
	b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Kesehatan)	2.550.000.000,00		2.550.000.000,00	
	13 ALL OPD	525.563.952,00		211.609.092,00	
	a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	525.563.952,00		211.609.092,00	
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		170.562.768.485,00		187.090.811.611,00
3.	Total Belanja Daerah		2.015.662.940.595,00		2.164.532.583.986,00
4.	Gaji ASN		330.436.484.186,00		294.636.766.567,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.685.226.456.409,00		1.869.895.797.419,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		10,12		10,00

Salinan Seperti Aslinya
Hanya Untuk Pemohon Informasi
PIADC181

Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Infrastruktur pada Provinsi Sulawesi Barat TA 2022

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2022 (Rp)	Jumlah dalam P-APBD 2022 (Rp)
1	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	972.189.180.000,00	972.189.180.000,00
	b) DBH	15.124.863.000,00	15.124.863.000,00
	Jumlah Penerimaan	987.314.043.000,00	987.314.043.000,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0,00	0,00
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	0,00	0,00
	c) ADD	0,00	0,00
	Jumlah Pengurang	0,00	0,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	987.314.043.000,00	987.314.043.000,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	Jumlah
1	a) Belanja Modal	407.935.984.219,00	408.826.574.324,00
	1) Tanah	18.135.600.000,00	19.250.100.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	71.524.214.173,00	63.582.959.211,00
	3) Bangunan dan Gedung	127.078.762.097,00	151.699.716.874,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	164.372.713.449,00	168.494.780.139,00
	5) Aset tetap lainnya	26.824.674.500,00	5.084.518.100,00
	6) Aset lainnya	0,00	714.500.000,00
	b) Belanja pemeliharaan	0,00	21.120.888.587,00
2	a) Belanja Hibah	82.219.529.600	58.269.529.600,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.390.000.000	1.634.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	47.900.000.000	34.411.264.500,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	519.445.493.819,00	524.262.257.011,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	52,61%	53,10%

Rincian SiLPA Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Per 31 Desember 2022

No	URAIAN	SALDO KAS DAERAH
1	SALDO KAS DAERAH	Rp 102.018.271.777,95
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 244.621.493,89
4	Kas Dana Kapitasi Kapitasi JKN	Rp 121.425.084,00
5	Kas di Bendahara BOS	Rp 59.530.974,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	Rp 14.232.297.719,00
7	Koreksi Kurang Pajak	-Rp 1.079.340,00
8	Pembayaran Dana Bomda	Rp 80.000,00
9	Sisa Giro Bos	Rp 200.600,00
10	Koreksi Kas BLUD Ke Kasda	Rp 125.160.800,00
11	Koreksi Belanja Duk Capil	-Rp 130.982.160,00
12	Pembayaran Piutang Dinas Kelautan	Rp 254.926.350,00
	Total SiLPA TA 2022	Rp 116.924.453.298,84

Salinan Seperti Aslinya
Hanya Untuk Pemohon Informasi
PIADC181

Lampiran 5

Rincian Kas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Per 31 Desember 2022

No	URAIAN	SALDO KAS DAERAH
1	4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 29.701.289.015,00
2	4.2. PENDAPATAN TRANSFER	Rp 71.528.899.230,95
3	4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 71.528.899.230,95
4	4.2.01.01. Dana Perimbangan	Rp 71.528.899.230,95
5	4.2.01.01.02. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 51.266.506.877,95
6	4.2.01.01.03. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 1.355.974.414,00
7	4.2.01.01.04. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 1.938.869.215,00
8	4.2.01.01.04.0000. DAK Non Fisik-BOS	Rp 538.518.000,00
9	4.2.01.01.04.0004. DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp 9.787.130,00
10	4.2.01.01.04.0005. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp 257.250.000,00
11	4.2.01.01.04.0006. DAK Non Fisik-TKG PNSD	Rp 424.713.820,00
12	4.2.01.01.04.0009. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Rp 148.933.288,00
13	4.2.01.01.04.0011. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Rp 226.190.657,00
14	4.2.01.01.04.0016. DAK Non Fisik-PK2UKM	Rp 272.800.502,00
15	4.2.01.01.04.0020. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	Rp 14.022.800,00
16	4.2.01.01.04.0022. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 48.653.018,00
17	4.2.01.02. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 16.967.549.224,00
18	6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 788.083.532,00
19	6.1.04.04. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Rp 788.083.532,00
20	6.1.04.04.03. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	Rp 788.083.532,00
21	6.1.04.04.03.0001. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	Rp 788.083.532,00
22	Saldo Kas Daerah Per 31 Desember 2022	Rp 102.018.271.777,95

Sisa Dana DAK Swakelola TA 2022

No	Kabupaten	Nama Sekolah	Nomor Rek DAK TA 2020	Nama Bank	Nama Nasabah	Saldo Awal	Mutasi Tambah (Jagir/Jatab)	Mutasi Kurang (Biaya Pengelolaan, Biaya Rek Pasif)	Saldo Akhir
1	KAB. MAMUJU	SMAN 1 MAMUJU	071-202-000002879-2	BANK SULSELBAR	SMAN 1 MAMUJU	620.095,00	15.095,80	-	635.190,80
2	KAB. MAMUJU	SMAN 1 BONEHAU	071-202-000002877-6	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 BONEHAU	491.027,00	12.482,04	2.452,00	501.057,04
3	KAB. MAMUJU	SMAN 1 TOMMO	071-202-000003533-1	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 TOMMO	1.450.383,00	35.471,90	-	1.485.854,90
4	KAB. MAMUJU	SMAN 3 MAMUJU	071-202-000002286-7	BANK SULSELBAR	SMAN 3 MAMUJU	228.456,00	2.290,00	230.746,00	-
5	KAB. MAMUJU	SMAN 2 BONEHAU	071-202-000003528-4	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 2 BONEHAU	147.334,00	3.488,00	-	150.822,00
6	KAB. MAMUJU	SMAN 2 TOMMO	071-202-000002885-7	BANK SULSELBAR	SMAN 2 TOMMO	219.871,00	5.203,00	-	224.074,00
7	KAB. MAMUJU	SMAN 3 KALUKKU	071-202-000002893-7	BANK SULSELBAR	SMAN 3 KALUKKU	587.617,00	14.306,36	-	601.923,36
8	KAB. MAMUJU	SMAN 1 KALUMPANG	071-202-000002904-7	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 KALUMPANG	286.092,60	6.765,00	-	292.857,60
9	KAB. MAMUJU	SMAN 1 TAPALANG BARAT	071-202-000002882-2	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 TAPALANG BARAT	631.409,00	15.383,04	-	646.792,04
10	KAB. MAJENE	SMAN 1 SENDANA	072-202-000004623-0	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 SENDANA	126.396,00	1.748,00	128.143,00	-
11	KAB. MAJENE	SMAN 3 MAJENE	072-202-000005136-5	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 3 MAJENE	69.727,00	501,00	70.228,00	-
12	KAB. POLTMAN	SMAN 1 ALU	070-202-000005173-1	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI 1 ALU	214.218,00	1.890,00	216.108,00	-
13	KAB. POLTMAN	SMAN 1 CAMPALAGIAN	070-202-000005176-5	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI CAMPALAGIAN	206.417,00	1.968,00	208.385,00	-
14	KAB. POLTMAN	SMAN 1 POLEWALI	070-202-000004883-7	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMAN 1 POLEWALI	677.544,00	16.494,00	-	694.038,00
15	KAB. POLTMAN	SMAN 1 TINAMBUNG	070-202-00000167-6	BANK SULSELBAR	SMAN 1 TINAMBUNG	388.531,00	8.060,00	126.000,00	270.591,00
16	KAB. POLTMAN	SMAN 2 POLEWALI	070-202-000004882-9	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMAN 2 POLEWALI	301.564,00	2.114,00	283.678,00	20.000,00
17	KAB. POLTMAN	SMAN 3 POLEWALI	070-202-000004889-6	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI 3 POLEWALI	241.685,00	5.739,00	-	-
18	KAB. POLTMAN	SMAN 4 POLEWALI	070-202-000005170-6	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI 4 POLEWALI	830.403,00	5.925,00	836.328,00	-
19	KAB. POLTMAN	SMAN MATAKALI	070-202-000005172-2	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA MATAKALI	559.073,00	14.013,76	-	573.086,76
20	KAB. POLTMAN	SMAN NEGERI 1 MATANGNGA	075-202-000005174-9	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI 1 MATANGNGA	66.045,00	1.492,00	-	67.537,00
21	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 PASANGKAYU	075-202-000001553-2	BANK SULSELBAR	SMAN 1 PASANGKAYU	523.644,00	12.735,76	-	536.379,76
22	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 BAMBALAMUTU	075-202-000001366-1	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 BAMBALAMUTU	998.915,00	24.205,88	60.000,00	963.120,88
23	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 BULUTABA	075-202-000001749-7	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMAN 1 BULUTABA	220.113,00	5.272,00	-	228.385,00
24	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 SARUDU	221-202-00000013-5	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMAN 1 SARUDU	200.165,00	3.314,00	136.500,00	66.975,00
25	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 DAPURANG	221-202-00000012-7	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI 1 DAPURANG	205.302,00	3.457,00	136.500,00	72.259,00
26	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 TIKKE RAYA	075-202-000001551-6	BANK SULSELBAR	SMAN 1 TIKKE RAYA	182.126,00	4.329,00	-	186.455,00
27	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 BAMBARA	075-202-000001742-0	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEGERI 1 BAMBARA	185.095,00	3.176,00	126.000,00	-
28	KAB. PASANGKAY	SMAN 1 LARIANG	075-202-000001740-3	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMAN 1 LARIANG	147.282,00	3.484,00	-	150.766,00
29	KAB. PASANGKAY	SMA NEGERI 2 PASANGKAYU	075-202-000001562-4	BANK SULSELBAR	P25 SMAN 2 PASANGKAYU	168.230,00	3.944,00	-	172.174,00
30	KAB. PASANGKAY	SMA NEGERI 1 DURIPOKU	075-002-000000065-6	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 DURIPOKU	2.092.932,00	18.786.054,00	16.562.665,00	4.316.322,00
31	KAB. PASANGKAY	SMA NEGERI 1 SARJO	075-202-000001597-5	BANK SULSELBAR	SMAN 1 SARJO	642.599,00	15.645,14	-	658.244,14
32	KAB. MAMUJU	SMAN 1 PANGALE	071-202-000002874-4	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 PANGALE	38.671,75	870,00	-	39.541,75
33	KAB. MATENG	SMAN 1 KAROSSA	072-002-000000403-3	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 1 KAROSSA	46.639,00	958,00	-	47.597,00
34	KAB. MATENG	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	072-202-000000406-8	BANK SULSELBAR	SMA NEGERI 2 BUDONG BUDONG	268.535,00	6.398,00	-	274.933,00
35	KAB. MAMUJU	SMKN 1 TAPALANG	071-202-000003611-6	BANK SULSELBAR	P25 SMK NEGERI 1 TAPALANG	121.920,00	2.900,00	-	124.820,00
36	KAB. MAMUJU	SMK NEGERI 1 TOMMO	071-202-000003619-1	BANK SULSELBAR	P25 SMK NEGERI 1 TOMMO	123.665,00	2.909,00	-	126.574,00
37	KAB. MAMUJU	SMKN 1 BONEHAU	071-202-000003610-8	BANK SULSELBAR	P25 SMKN 1 BONEHAU	99.896,00	2.117,00	-	96.013,00
38	KAB. MAMUJU	SMKN 1 RANGAS	071-202-000002754-1	BANK SULSELBAR	P25 SMK NEGERI 1 RANGAS	2.271.836,00	55.605,18	-	2.327.441,18
39	KAB. MAMUJU	SMKN 1 MAMUJU	071-202-0000003612-4	BANK SULSELBAR	P25 SMKN 1 MAMUJU	138.400,00	3.232,00	-	141.632,00
40	KAB. MAJENE	SMKN 9 MAJENE	072-202-000005197-7	BANK SULSELBAR	SMK NEGERI 9 MAJENE	180.841,00	4.270,00	-	185.111,00
41	KAB. POLMAN	SMKN 1 TINAMBUNG	076-202-000000192-7	BANK SULSELBAR	P25 SMK NEGERI 1 TINAMBUNG	96.002,00	202.432,00	233.817,00	64.617,00
42	KAB. POLMAN	SMKN LABUANG	076-202-000000191-9	BANK SULSELBAR	P25 SMKN LABUANG	102.278,00	1.329,00	103.607,00	-
43	KAB. POLTMAN	SMKN 2 POLEWALI	070-202-000004884-1	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMK NEGERI 2 POLEWALI	210.976,00	602.474,00	750.000,00	63.450,00
44	KAB. POLTMAN	SMKN BALANIPA	070-002-000002400-9	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMK NEGERI BALANIPA	92.564,00	640,00	92.681,00	523,00
45	KAB. POLMAN	SMK NEGERI ALU	076-202-000000193-5	BANK SULSELBAR	P25 SMKN ALU	156.388,00	2.836,00	106.000,00	53.224,00

No	Kabupaten	Nama Sekolah	Nomor Rek DAK TA 2020	Nama Bank	Nama Nasabah	Saldo Awal	Mutasi Tambah (Jagir/Jatib)	Mutasi Kurang (Biaya Pengelolaan, Biaya Rek Pasif)	Saldo Akhir
46	KAB. POLIMAN	SMKN PAKU	070-202-00024191-1	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMKN PAKU	198.418,00	4.149,00	762,00	201.805,00
47	KAB. POLIMAN	SMKN TAPANGO	073-202-000000960-6	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMA NEG 1 TAPANGO	92.173,00	2.094,00	-	94.267,00
48	KAB. PASANGKAY	SMKN 1 SARUDU	221-202-000000010-1	BANK SULSELBAR	P25 SMKN 1 SARUDU	430.836,00	8.874,00	136.500,00	303.210,00
49	KAB. PASANGKAY	SMKN 2 BARAS	221-202-000000090-9	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMK NEGERI 2 BARAS	302.843,00	5.792,00	136.500,00	172.135,00
50	KAB. PASANGKAY	SMKN 1 BAMBALAMITU	075-202-000001521-4	BANK SULSELBAR	DANA P25 SMKN 1 BAMBALAMOTU	756.759,00	18.460,68	-	775.219,68
51	KAB. PASANGKAY	SMKN 1 DAPURANG	075-202-000001765-9	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMKN 1 DAPURANG	143.906,00	3.343,00	-	147.249,00
52	KAB. PASANGKAY	SMKN 1 TIKKE	075-202-000001811-6	BANK SULSELBAR	DANA DAK SMKN 1 TIKKE	465.426,00	11.103,00	-	476.529,00
53	KAB. PASANGKAY	SMKN 1 SARJO	075-202-000001519-2	BANK SULSELBAR	P25 SMK NEGERI 1 SARJO	259.600,00	6.146,00	-	265.746,00
54	KAB. MATENG	SMKN 1 BUDONG BUDONG	077-202-000000633-2	BANK SULSELBAR	SMKN 1 BUDONG BUDONG	42.906,00	917,00	-	43.823,00
55	KAB. MATENG	SMKN 1 BUDONG BUDONG	077-202-000000409-2	BANK SULSELBAR	SMK NEGERI 1 TOPOYO	2.020.965,00	29.152,00	2.650.117,00	-
56	KAB. MATENG	SMKN 1 TOBADAK	077-202-000000648-6	BANK SULSELBAR	SMKN 1 TOBADAK	21.870,00	378,00	-	22.248,00
Jumlah									19.872.307,89

Salinan seperti Asli
Untuk Pemohon
PIADC181

Salinan seperti Asli
Untuk Pemohon
PIADC181

Rincian Dana PFK DAK Swakelola TA 2022

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MOU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
KAB POLMAN 1							
1	SMAN 1 POLEWALI	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	209.496.000,00	209.496.000,00	100%	Nihil	1.739.634,00
2	SMAN 1 POLEWALI	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	209.496.000,00	209.496.000,00	100%	Nihil	2.312.518,13
3	SMAN 1 POLEWALI	Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	209.496.000,00	209.496.000,00	100%	Nihil	2.519.082,89
4	SMAN 1 POLEWALI	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	167.597.000,00	167.597.000,00	100%	Nihil	2.501.635,00
5	SMAN 1 POLEWALI	Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	34.815.000,00	34.815.000,00	100%	Nihil	-
6	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	Nihil	6.008.410,00
7	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	Nihil	3.062.742,00
8	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	Nihil	4.965.322,00
9	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	Nihil	5.519.008,00
10	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	Nihil	2.699.031,00
11	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	Nihil	3.965.872,00
12	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang tata usaha beserta prabotnya	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	Nihil	2.323.134,00
13	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	Nihil	3.353.154,07
14	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	Nihil	2.627.166,00
15	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang bimbingan konseling perabotnya	227.027.000,00	227.027.000,00	100%	Nihil	2.540.020,00

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
16	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	232.773.000,00	232.773.000,00	100%	Nihil	2.573.494,00
17	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	Nihil	5.200.008,00
18	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	Nihil	2.414.584,00
19	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	Nihil	3.804.287,00
20	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	Nihil	4.932.675,00
21	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	Nihil	5.947.637,00
22	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	Nihil	4.903.877,00
23	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	Nihil	4.546.567,00
24	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	Nihil	5.184.188,00
25	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	Nihil	3.315.741,00
26	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	Nihil	3.093.047,00
27	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya	427.835.000,00	427.835.000,00	100%	Nihil	3.601.340,00
28	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	Nihil	7.090.296,00
29	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	Nihil	2.130.358,39
30	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	Nihil	2.860.745,00
31	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang bimbingan konseling perabotnya	227.027.000,00	227.027.000,00	100%	Nihil	2.664.125,00
32	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	232.773.000,00	232.773.000,00	100%	Nihil	3.866.366,00
33	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	465.548.000,00	465.548.000,00	100%	Nihil	8.204.363,00

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
KAB. MAMASA							
1	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1.859.844.000,00	1.859.844.000,00	100%	Nihil	13.040.508,00
2	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	253.600.000,00	253.600.000,00	100%	Nihil	660.406,00
3	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	253.600.000,00	253.600.000,00	100%	Nihil	765.008,00
4	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	202.880.000,00	202.880.000,00	100%	Nihil	410.045,00
5	SMAN 1 MAMASA	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	422.667.000,00	422.667.000,00	100%	Nihil	2.979.207,00
6	SMAN 1 MAMASA	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	281.778.000,00	281.778.000,00	100%	Nihil	689.653,00
7	SMAN 1 NOSU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	563.558.000,00	563.558.000,00	100%	Nihil	3.372.424,00
8	SMAN 1 NOSU	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya	469.631.000,00	469.631.000,00	100%	Nihil	3.546.786,00
9	SMAN 1 NOSU	Pembangunan ruang bimbingan konseling perabotnya	274.822.000,00	274.822.000,00	100%	Nihil	2.196.409,00
10	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan ruang Kepala sekolah/Pimpinan beserta perabotnya	260.906.000,00	260.906.000,00	100%	Nihil	1.123.909,00
KAB. MAJENE							
1	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan Ruang Bimbingan konseling beserta perabotnya	227.027.000	227.027.000	100%	Nihil	1.938.422,00
2	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan Ruang kelas Baru beserta perabotnya	1.163.870.000	1.163.870.000	100%	Nihil	21.879.279,00
3	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang Osis beserta perabotnya	232.773.000	232.773.000	100%	Nihil	2.089.527,00
4	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang Unit kesehatan beserta perabotnya	215.531.000	215.531.000	100%	Nihil	1.891.869,00
5	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	387.956.000	387.956.000	100%	Nihil	5.902.553,00
6	SMAN 1 MAJENE	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1.280.260.000	1.280.260.000	100%	Nihil	16.041.015,00

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
KAB PASANGKAYU II							
1	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya	1.286.380.000	1.286.380.000	100%	Nihil	48.781.063,00
2	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang laboratorium Biologi beserta perabotnya	428.794.000	428.794.000	100%	Nihil	13.313.821,00
3	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya	304.998.000	304.998.000	100%	Nihil	5.225.131,00
4	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya	238.219.000	238.219.000	100%	Nihil	5.947.428,00
5	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya	238.219.000	238.219.000	100%	Nihil	6.023.090,00
6	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	238.219.000	238.219.000	100%	Nihil	5.878.016,00
7	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang Osis beserta perabotnya	257.276.000	257.276.000	100%	Nihil	7.281.439,00
8	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling beserta perabotnya	250.923.000	250.923.000	100%	Nihil	5.956.785,00
9	SMAN 1 SARJO	Pembangunan Ruang Asrama Siswa beserta perabotnya	503.622.000	503.622.000	100%	Nihil	12.920.120,00
10	SMAN 1 DAPURANG	Pembangunan ruang Osis beserta perabotnya	257.276.000	257.276.000	100%	Nihil	6.047.076,00
11	SMAN 1 DAPURANG	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	238.219.000	238.219.000	100%	Nihil	4.140.072,00
12	SMAN 1 DAPURANG	Relabilitas ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	185.238.000	185.238.000	100%	Nihil	3.477.387,00

N 1 SARJO	Pembangunan Ruang Asrama Siswa beserta perabotnya
N 1 DAPURANG	Pembangunan ruang Osis beserta perabotnya
N 1 DAPURANG	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya
N 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang at berat beserta perabotnya

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
KAB PASANGKAYU I							
1	SMAN 1 PASANGKAYU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1.698.024.000	1.698.024.000	100%	Nihil	68.498.875,00
2	SMAN 1 PASANGKAYU	Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	231.548.000	231.548.000	100%	Nihil	4.848.085,00
3	SMAN 1 PASANGKAYU	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	185.238.000	185.238.000	100%	Nihil	5.604.391,00
4	SMAN 1 PASANGKAYU	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	141.502.000	141.502.000	100%	Nihil	4.732.995,00
5	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	514.552.000	514.552.000	100%	Nihil	16.488.176,00
6	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya	428.794.000	428.794.000	100%	Nihil	13.457.094,00
7	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	503.622.000	503.622.000	100%	Nihil	16.290.427,00
8	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya	304.998.000	304.998.000	100%	Nihil	7.243.806,00
9	SMAN 1 BULUTABA	Rehabilitasi ruang laboratorium, biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	231.548.000	231.548.000	100%	Nihil	-
10	SMAN 1 BULUTABA	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	185.238.000	185.238.000	100%	Nihil	-
11	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya	428.794.000	428.794.000	100%	Nihil	-
12	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya	428.794.000	428.794.000	100%	Nihil	-
13	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya	448.309.000	448.309.000	100%	Nihil	-
14	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	503.622.000	503.622.000	100%	Nihil	-
15	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya	238.219.000	238.219.000	100%	Nihil	-
16	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	238.219.000	238.219.000	100%	Nihil	-
17	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya	304.998.000	304.998.000	100%	Nihil	10.277.477,00

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
18	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya	250.923.000	250.923.000	100%	Nihil	7.723.198,00
19	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	257.276.000	257.276.000	100%	Nihil	
KAB MAMUJU							
1	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Prabotnya	Rp 980.100.000	Rp 980.100.000	100%	Nihil	36.355.583,48
2	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Prabotnya	Rp 245.025.000	Rp 245.025.000	100%	Nihil	7.792.958,68
3	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Ruang LAB Fisika beserta Prabotnya	Rp 408.375.000	Rp 408.375.000	100%	Nihil	13.620.054,51
4	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Ruang TU beserta Prabotnya	Rp 226.875.000	Rp 226.875.000	100%	Nihil	
5	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Ruang UKS beserta Prabotnya	Rp 226.875.000	Rp 226.875.000	100%	Nihil	6.248.845,72
6	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Ruang OSIS beserta Prabotnya	Rp 245.025.000	Rp 245.025.000	100%	Nihil	7.731.739,02
7	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Prabotnya	Rp 245.025.000	Rp 245.025.000	100%	Nihil	6.473.315,67
8	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Ruang BK beserta Prabotnya	Rp 238.975.000	Rp 238.975.000	100%	Nihil	5.820.593,99
9	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Ruang OSIS beserta Prabotnya	Rp 245.025.000	Rp 245.025.000	100%	Nihil	6.877.735,42
10	SMAS DARUL ILMI SAMPOANG	Pembangunan Ruang LAB Komputer Beserta Prabotnya	Rp 245.025.000	Rp 245.025.000	100%	Nihil	
11	SMAS DARUL ILMI SAMPOANG	Pembangunan Ruang TU beserta Prabotnya	Rp 226.875.000	Rp 226.875.000	100%	Nihil	
12	SMAS DARUL ILMI SAMPOANG	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah Beserta Prabotnya	Rp 226.875.000	Rp 226.875.000	100%	Nihil	
13	SMAS DARUL ILMI SAMPOANG	Pembangunan Ruang UKS beserta Prabotnya	Rp 226.875.000	Rp 226.875.000	100%	Nihil	

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
KAB POLMAN III							
1	SMAN 1 WONOMULYO	PEMBANGUNAN RUANG KEPALA SEKOLAH BESERTA PERABOTNYA SMAN 1 WONOMULYO	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	NIHIL	-
2	SMAN 1 WONOMULYO	PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMAN 1 WONOMULYO	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	NIHIL	-
3	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan ruang Unit kesehatan Sekolah beserta perabotnya SMAN 1 WONOMULYO	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	NIHIL	-
4	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling beserta perabotnya SMAN 1 WONOMULYO	227.027.000,00	227.027.000,00	100%	NIHIL	-
5	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMAN 1 WONOMULYO	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	NIHIL	-
6	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan ruang Osis beserta perabotnya MATAKALI	232.773.000,00	232.773.000,00	100%	NIHIL	-
7	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan ruang Unit kesehatan Sekolah beserta perabotnya MATAKALI	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	NIHIL	-
8	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya MATAKALI	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	NIHIL	-
9	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan ruang laboratorium Biologi beserta perabotnya MATAKALI	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	NIHIL	-
10	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya MATAKALI	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	NIHIL	-
11	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya MATAKALI	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	NIHIL	-
12	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya MATAKALI	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	NIHIL	-
13	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling beserta perabotnya MATAKALI	227.027.000,00	227.027.000,00	100%	NIHIL	-
14	SMAN 1 MATAKALI	PEMBANGUNAN ASRAMA SISWA BESERTA PERABOTNYA SMAN MATAKALI	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	NIHIL	-
15	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SMAN 1 CAMPALAGIAN	384.078.000,00	384.078.000,00	100%	NIHIL	-
16	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMAN 1 CAMPALAGIAN	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	NIHIL	-
17	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya SMAN 1 CAMPALAGIAN	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	NIHIL	-

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
18	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya SMAN 1 CAMPALAGIAN	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	NIHIL	-
19	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMAN 1 CAMPALAGIAN	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	NIHIL	-
KAB POLMAN II							
1	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	698.322.000,00	698.322.000,00	100%	NIHIL	-
2	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	NIHIL	-
3	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya	387.956.000,00	387.956.000,00	100%	NIHIL	-
4	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	480.622.000,00	480.622.000,00	100%	NIHIL	-
5	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	215.531.000,00	215.531.000,00	100%	NIHIL	-
6	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya	291.069.000,00	291.069.000,00	100%	NIHIL	-
7	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang bimbingan konseling perabotnya	227.027.000,00	227.027.000,00	100%	NIHIL	-
8	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	232.773.000,00	232.773.000,00	100%	NIHIL	-
9	SMAN 1 TINAMBUUNG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1.152.234.000,00	1.152.234.000,00	100%	NIHIL	18.918.913,00
10	SMAN 1 ALU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	232.774.000,00	232.774.000,00	100%	NIHIL	-
KAB MAMUJU TENGAH							
1	SMAN 1 TOPOYO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	277.614.000,00	277.614.000,00	100%		6.098.111,00
2	SMAN 1 TOPOYO	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	227.138.000,00	227.138.000,00	100%		4.595.024,00
3	SMAN 1 TOPOYO	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	227.138.000,00	227.138.000,00	100%		3.837.648,00
4	SMAN 1 TOPOYO	Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	227.138.000,00	227.138.000,00	100%		4.572.315,00

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK/ MoU (Rp)	REALISASI KEUANGAN 31/12/2022 (Rp)	REALISASI FISIK 31/12/2022 (%)	SALDO KAS 31/12/2022	UTANG PFK/ PAJAK YANG TERLAMBAT DISETOR
5	SMAN 1 TOPOYO	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1.388.070.002,00	1.388.070.002,00	100%		3.185.330,00
6	SMAN 3 BUDONG - BUDONG	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya	420.626.000,00	420.626.000,00	100%		13.703.995,00
7	SMAN 3 BUDONG - BUDONG	Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya	420.626.000,00	420.626.000,00	100%		14.094.029,00
8	SMAN 3 BUDONG - BUDONG	Pembangunan asrama siswa beserta Perabotnya	505.713.000,00	505.713.000,00	100%		15.796.281,00
9	SMAN 3 BUDONG - BUDONG	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	233.681.000,00	233.681.000,00	100%		5.716.718,00
10	SMAN 3 BUDONG - BUDONG	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	306.265.000,00	306.265.000,00	100%		8.813.920,00
11	SMAN 3 BUDONG - BUDONG	Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya	252.375.000,00	252.375.000,00	100%		5.496.967,00
12	SMAN 1 TOBADAK	Pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya	306.265.000,00	306.265.000,00	100%		7.099.479,00
					Sub Jumlah		683.992.955,98
					Utang PFK 2021		3.889.846,00
					Jumlah		687.882.801,98

Salinan seperti ini
 hanya untuk Pemohon
 PIADC181

REKAPAN BOS
DINAS PENDIDIKAN PRVINSI SULAWESI BARAT

No	Uraian	Penerimaan	Belanja Negeri	Belanja Swasta	Pajak	Saldo
	Saldo Awal					767.491.779,00
1	BOS Kinerja	932.500.000,00	978.145.000,00	-		721.846.779,00
2	BOS Reguler Tahap I - SLB	911.862.000,00	910.353.400,00	-	1.508.600,00	721.846.779,00
3	BOS Reguler Tahap I - SMA	13.398.687.000,00	11.664.786.306,00	-	21.621.627,00	2.434.285.846,00
4	BOS Reguler Tahap I - SMK	10.187.745.000,00	8.805.957.606,00	-	18.447.638,00	6.797.665.602,00
5	BOS Reguler Tahap II - SLB	1.183.456.750,00	1.216.274.350,00	-		3.764.748.002,00
6	BOS Reguler Tahap II - SMA	17.509.861.275,00	18.758.970.662,00	-		2.515.638.615,00
7	BOS Reguler Tahap II - SMK	13.190.214.497,00	13.728.767.055,00	-		1.977.086.057,00
8	BOS Reguler Tahap III - SLB	911.862.000,00	911.841.000,00	-		1.977.107.057,00
9	BOS Reguler Tahap III - SMA	13.351.941.000,00	14.145.152.627,00	-		1.183.895.430,00
10	BOS Reguler Tahap III - SMK	9.909.797.000,00	11.034.161.456,00	-		59.530.974,00
11	BOS Reguler Tahap I - SLB (Swasta)	782.040.000,00	-	782.040.000,00		59.530.974,00
12	BOS Reguler Tahap I - SMA (Swasta)	552.435.000,00	-	552.435.000,00		59.530.974,00
13	BOS Reguler Tahap I - SMK (Swasta)	3.639.990.000,00	-	3.639.990.000,00		59.530.974,00
14	BOS Reguler Tahap II - SLB (Swasta)	1.019.031.000,00	-	1.019.031.000,00		59.530.974,00
15	BOS Reguler Tahap II - SMA (Swasta)	724.304.000,00	-	724.304.000,00		59.530.974,00
16	BOS Reguler Tahap II - SMK (Swasta)	4.689.106.001,00	-	4.689.106.001,00		59.530.974,00
17	BOS Reguler Tahap III - SLB (Swasta)	782.040.000,00	-	782.040.000,00		59.530.974,00
18	BOS Reguler Tahap III - SMA (Swasta)	552.435.000,00	-	552.435.000,00		59.530.974,00
19	BOS Reguler Tahap III - SMK (Swasta)	3.549.764.000,00	-	3.549.764.000,00		59.530.974,00
JUMLAH		97.779.071.523,00	82.154.409.462,00	16.291.145.001,00	41.477.865,00	59.530.974,00

Rekapitulasi Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatanambang
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi Sulawesi Barat
Komoditas Bahan Galian Batuan

Lampiran 9.a

Jaminan Reklamasi dan Pascatanambang Tahun 2019-2020										
No.	Kabupaten	Pemegang IUP	Nomor SK	Luas (Ha)	Tahapan	Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatanambang				
						Pemerbit	No. Seri	Tanggal Penempatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mamuju Tengah	CV BM	045/76/IUP.OP-PTSP.A/III/2017	3	Operasi Produksi	BRI MAMUJU DB	6566488	10 September 2019	7.000.000,00	Periode 2019-2022 No. 0218-01002018-40-4
2	Mamuju Tengah	PT Sit	001/76/IUP.OP/PTSP.A/II/2020	26	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009731	02 Februari 2020	16.425.000,00	Periode 2020-2025, Nomor 19294/B00009731
3	Mamuju Tengah	PT LIPK	005/76/IUP.OP/PTSP.A/XII/2019	22	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009721	10 Januari 2020	12.045.000,00	Periode 2019-2024, Nomor 19197/B00009721
4	Mamuju Tengah	PT AAaP	003/76/IUP.OP/PTSP.A/III/2020	5	Operasi Produksi	BPD TOPOYO	B 006761	17 Maret 2020	26.690.125,00	Periode : 2020 No. 2815/B00006761
5	Mamuju Tengah	PT AAaP	004/76/IUP.OP/PTSP.A/II/2020	5	Operasi Produksi	BPD TOPOYO	B 009760	17 Maret 2020	35.954.000,00	Periode : 2020 No. 2607/B00006760
6	Mamuju Tengah	PT AAaP	005/76/IUP.OP/PTSP.A/III/2020	5	Operasi Produksi	BPD TOPOYO	B 009759	17 Maret 2020	26.690.125,00	Periode : 2020 No. 2593/B00006759
7	Pasangkayu	PT AUU	006/76/IUP.OP/PTSP.A/III/2020	8,1	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009736	11 Mei 2020	12.172.500,00	Periode 2020 Nomor 19294/B00009731
8	Polewali Mandar	PT BBI	008/76/IUP.OP/PTSP.A/IV/2020	0,8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009739	15 Juni 2020	10.687.219,00	Periode 2020 Nomor 19294/B00009731
9	Polewali Mandar	T	010/76/IUP.OP/PTSP.A/VI/2020	5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009738	16 Juni 2020	7.611.740,00	Periode 2020 Nomor 19367/B00009738

No.	Kabupaten	Pemegang IUP	Nomor SK	Luas (Ha)	Tahapan	Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang				
						Penerbit	No. Seri	Tanggal Penempatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Mamuju	PT HAU	007776/IUP.OP/PTSP A.VII/2020	119	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 009731	12 Juli 2020	62.500.000,00	Periode 2020 Nomor 19421/B00009744
11	Mamasa	TDP	09.a/76/IUP.OP/PTS P.A.VII/2020	1,54	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034857	18 September 2020	9.741.937,50	Periode 2020 Nomor 1949/B034857
12	Polewali Mandar	CV NK	00276/IUP.OP/PTSP A.III/2020	5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B009750	09 September 2020	10.978.330,00	Periode 2020 Nomor 19481/B00009750
13	Malene	PT PBM	01176/IUP.OP/PTSP A.X/2020	16,60	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B064865	13 Oktober 2020	137.316.096,00	Periode 2020 Nomor 19553/B00034865
14	Mamuju	CV JM	03676/IUP.OP/PTSP A.III/2017	6	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B064873	03 Desember 2020	10.000.000,00	Periode 2017-2022, Nomor 19600/B00034873
15	Polewali Mandar	CV GB	01676/IUP.OP/PTSP A.XII/2020	0,8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034876	08 Desember 2020	6.892.875,00	Periode 2020 Nomor 19634/B00034876
16	Polewali Mandar	CV AZB	01976/IUP.OP/PTSP A.XII/2020	5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034879	10 Desember 2020	26.184.383,00	Periode 2020 Nomor 19669/B00034879
17	Polewali Mandar	SAP	01876/IUP.OP/PTSP A.XII/2020	0,65	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034887	16 Desember 2020	5.974.076,00	Periode 2019-2024 Nomor 37217/B00034887
18	Mamuju Tengah	CV BI	02076/IUP.OP/PTSP A.XII/2020	1,3	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034886	16 Desember 2020	12.330.061,00	Periode 2020 Nomor 19707/B00034886
19	Mamuju	PT TBA	017776/IUP.OP/PTSP A.XII/2020	46,83	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034885	16 Desember 2020	113.082.611,00	Periode 2020-2025, Nomor 19693/B00034885
20	Mamuju	PT PSKR	01276/IUP.OP/PTSP A.X/2020	14	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034889	18 Desember 2020	10.885.000,00	Periode 2020 Nomor 348891/B00034889
21	Mamuju	PT DJL	01376/IUP.OP/PTSP A.X/2020	11,86	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034888	18 Desember 2020	9.244.400,00	Periode 2020 Nomor 19731/B00034888
22	Mamuju Tengah	CV PPU	03276/IUP.OP/PTSP A.X/2020	4,8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034893	23 Desember 2020	10.000.000,00	Periode 2017-2022, Nomor 19766/B00034893
JUMLAH									580.405.478,50	

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Tahun 2021

Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang										
No.	Kabupaten	Pemegang IUP	Nomor SK	Luas (Ha)	Tahapan					
						Penerbit	No. Seri	Tanggal Penempatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pasangkayu	PT AUU	00676/IUP.OP/PTSP A/III/2020	8,1	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045430	07 Desember 2021	7.303.506,00	Periode 2021 Nomor :20373/B00045430

No.	Kabupaten	Pemegang IUP	Nomor SK	Luas (Ha)	Tahapan	Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang				
						Penerbit	No. Seri	Tanggal Penempatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Mamuju	PT PSKR	0127/6/IUP.OP/PTSP .A/X/2020	14	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B045431	07 Desember 2021	5.531.000,00	Periode 2021 Nomor : 20381//B00045431
3	Mamuju	PT DJL	0137/6/IUP.OP/PTSP .A/X/2020	11,86	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B045429	07 Desember 2021	5.546.640,00	Periode 2021 Nomor : 20365/B00045429
4	Polewali Mandar	CV MR	0227/6/IUP.OP/PTSP .A/XII/2020	2,3	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034965	24 Februari 2021	185.041.313,00	Periode 2019-2024, Nomor 19871/B00034955
5	Mamuju Tengah	Sdr. MS	0187/6/IUP.OP/PTSP .A/XI/2018	3,0	Operasi Produksi	BPD TOPOYO	B006878	24 Mei 2021	10.000.000,00	Periode 2018-2023 Nomor : 3786/B00006878
6	Polewali Mandar	Sdr. RD	0017/6/IUP.OP- PTSP.A/2018	1,0	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B034974	31 Mei 2021	5.017.500,00	Periode 2018-2023 Nomor : 20004/B00034974
7	Mamuju Tengah	CV. PASIR CAHAYA LISE	034/IUP/PTSP.A/201 7	1	Operasi Produksi	BPD TOPOYO	B006880	7 Juni 2021	10.000.000,00	Periode 2019-2024, Nomor : 3808/B00006880
8	Pasangkayu	PT SP	135/7/6/IUP.OP- PTSP/IX/2016	14	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034982	22 Juni 2021	27.317.500,00	Periode 2016-2021, Nomor : 20039/B00034982
9	Mamuju Tengah	CV Rf	76/IUP.OP- PTSP.A/2018	18	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034983	24 Juni 2021	17.506.125,00	Periode : 2021 Nomor : 20047/B00034983
10	Polewali Mandar	PT YSM	0217/6/IUP.OP/PTSP .A/XII/2020	49,5	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034986	08 Juli 2021	117.510.000,00	Periode : 2020-2021 Nomor : 20071/B00034986
11	Pasangkayu	PT LPU	53/7/6/IUP.OP- PTSP/IX/2016	7	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B034993	29 Juli 2021	27.300.000,00	Periode :2016-2021 Nomor : 20144/B00034993
12	Pasangkayu	CV MB	193/7/6/IUP.OP- PTSP/IX/2016	24,7	Operasi Produksi	BPD Pasang kayu	B017098	25 Agustus 2021	24.850.562,05	Periode : 2017 Nomor : 161/DEPOSITO- JKW/PSK/III/2021
							B017105	02 November 2021	14.910.337,05	Periode : 2018 Nomor : 168/DEPOSITO- JKW/PSK/XI/2021
							B017106	02 November 2021	9.940.225,00	Periode :2019 Nomor : 169/DEPOSITO- JKW/PSK/XI/2021

Salinan
ra Untuk
PIADC 18

No.	Kabupaten	Pemegang IUP	Nomor SK	Luas (Ha)	Tahapan	Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang				
						Penerbit	No. Seri	Tanggal Penempatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Mamuju	PT ABL	73/76/IUP-OP-PTSP.AV/2017	198,5	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B045417	28 Oktober 2021	63.906.390,00	Jaminan Reklamasi Periode : 2017-2022 Nomor : 20241/B00045417
						B045416	28 Oktober 2021	24.959.583,00	Jaminan Pascatambang Periode : 2021 Nomor : 20233/B00045416	
JUMLAH II									556.640.681,10	

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Tahun 2022

Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang										
No.	Kabupaten	Pemegang IUP	Nomor SK	Luas (Ha)	Tahapan	Tanggal				Keterangan
						Penerbit	No. Seri	Penempatan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pasangkayu	CV Fz	004/76/IUP-OP/PTSP A/XI/2019	8	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045488	06 Juli 2022	27.308.228,00	Periode : 2019-2024 Nomor : 20811/B00045488
2	Mamuju	PT ABL	073/76/IUP-OP- PTSP.AV/2017	198,5	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 045505	11 Oktober 2022	17.471.708,10	Jaminan Pascatambang Periode : 2022 Nomor : 20942/B00045505
3	Malene	Sdr. AHS	129.a/76/IUP-OP- PTSP.AX/2017	4,9	Operasi Produksi	BPD MAMUJU	B 041344	29 September 2022	22.300.000,00	Periode : 2017-2022 Nomor : 18349/B00041344
4	Mamuju Tengah	CV Rf	76/IUP-OP- PTSP.AV/2018	18	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B 045487	04 Juli 2022	17.506.125,00	Periode : 2022 Nomor 20802/B045487
5	Polewali Mander	PT YSM	021/76/IUP-OP/PTSP A/XII/2020	49,5	Operasi Produksi	BPD Mamuju	B 045480	12 Mei 2022	29.376.248,90	Periode : 2022 Nomor : 20730/B00045480
JUMLAH III									113.962.310,00	

TOTAL/III	1.251.008.469,60	
-----------	------------------	--

Salinan
ra Untuk
PIADCO
8050473

Jaminan Kesungguhan Per 31 Desember 2022

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-01-02	CV BN	-	5.000.000,00
2	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-01-15	PT AUJ	-	5.000.000,00
3	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-01-25	Bunga Rekening	-	1.199,00
4	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-01-26	Pajak Bunga Simpanan	239,80	-
5	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-02-25	Bunga Rekening	-	2.123,00
6	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-02-25	Pajak	425,00	-
7	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-03-14	CV BI	-	5.000.000,00
8	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-03-25	Bunga Rekening	-	2.329,00
9	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-03-25	Pajak	466,00	-
10	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-03-26	Deposito a.n. CV BI	5.000.000,00	-
11	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-03-26	Deposito a.n. CV BN	5.000.000,00	-
12	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-03-26	Deposito a.n. PT AUJ	5.000.000,00	-
13	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-04-04	ATM BJ TO DINAS PENANAMAN H FROM205301000219567 TO021801003009301ATM	-	5.000.000,00
14	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-04-08	PT BPM	-	5.000.000,00
15	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-04-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
16	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-04-26	DARI 021801001951405 KE 021801003009301	-	16.988,00
17	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-04-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
18	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-05-06	A.n. T PEMB. JIMINAN KESUNGGUHAN THP IUP	-	5.000.000,00
19	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-05-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
20	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-05-26	DARI 021801001951405 KE 021801003009301	-	16.440,00
21	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-05-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
22	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-06-06	ATM UM TO DINAS PENANAMAN FROM 20420100835500 TO 021801003009301 ATM	-	5.000.000,00
23	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-06-12	EDC SETOR #5022986764 021801003009301 #7733 STR#01003009301 TRX#5187733 EDC08521098	-	5.000.000,00
24	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-06-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
25	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-06-26	DARI 021801001951405 KE 021801003009301	-	16.988,00
26	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-06-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
27	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-07-22	EEP	-	5.000.000,00
28	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-07-25	A.n. ADS-021801003009301 JAMINAN KESUNGGUHAN TAHAPAN IUP EKSPLORA T:7290051:NEWBRINETSWEB	-	5.000.000,00
29	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-07-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00
30	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-07-26	DARI 021801001951405 KE 021801003009301	-	16.440,00
31	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-07-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
32	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-08-14	PT SIT MAMUJU	-	5.000.000,00
33	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-08-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
34	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-08-26	DARI 021801001951405 KE 021801003009301	-	16.988,00
35	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-08-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
36	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-08-27	CV NIK	-	5.000.000,00
37	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-09-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
38	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-09-26	DARI 021801001951405 KE 021801003009301	-	16.988,00
39	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-09-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
40	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-10-14	EDC, BHR TO DINAS PENANAMAN FROM 495201006313531 TO 021801003009301 EDC	-	5.000.000,00
41	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-10-22	Pencatitan Deposito CV BN	-	5.000.000,00
42	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-10-22	Pencatitan Deposito CV BN	5.000.000,00	-
43	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-10-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00
44	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-10-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
45	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-11-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
46	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-11-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
47	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-12-11	PT LIPK	-	5.000.000,00
48	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-12-19	PT TBA	-	22.355.000,00
49	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-12-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00
50	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2019-12-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
51	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-01-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
52	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-01-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
53	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-01-30	6019238910058908#00175495700#ATM #TRF/LA TRF BERSAMA FROM HA A LA 021801003009301ATM 6019238910058908	-	5.000.000,00
54	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-05	6013012069524574#000000009733#MP #TRFHMB LN 021801003009301MP 6013012069524574	-	2.500.000,00
55	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-06	5198933070092849#100000187485#ATM #TRFHMB LN 021801003009301ATM 5198933070092849	-	5.000.000,00
56	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-14	PT AAP	-	5.000.000,00
57	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-14	PT AAP	-	5.000.000,00
58	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-17	6013012069524574#000000000591#MP #TRFHMB LN 021801003009301MP 6013012069524574	-	2.500.000,00
59	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-25	5198933070100972#100000548190#ATM #TRFHMB LN 021801003009301ATM 5198933070100972	-	5.000.000,00
60	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
61	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-02-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
62	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-03-04	Jamian Kesungguhan PT DKS	-	7.170.000,00
63	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-03-04	Jamian Kesungguhan PT BAP	-	5.000.000,00
64	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-03-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	15.892,00
65	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-03-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	15.892,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
66	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-04-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
67	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-04-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
68	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-05-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00
69	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-05-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
70	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-05	H. MIP. BY JAMINAN KESUNGGUHAN E CV R.	-	5.000.000,00
71	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-10	JAMINAN KESUNGGUHAN	-	5.000.000,00
72	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-11	JAMINAN KESUNGGUHAN	-	2.500.000,00
73	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-15	JAMINAN KESUNGGUHAN	-	2.500.000,00
74	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-19	UNTUK BY JAMINAN KES-021801003009301 U BY JAMINAN KUSUNGGUHN CV GB T:0645051:NEWBRINETSWEB	-	10.000.000,00
75	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-19	5198933070092849#100000527281#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDR IP LN 021801003009301ATM 5198933070092849	-	5.000.000,00
76	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-19	5198933070107316#100000332469#ATM #TRFHM TRF LINK FROM SDR IT LN 021801003009301ATM 5198933070107316	-	5.000.000,00
77	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-24	B/CV GB JAMINAN KESUNGGUHAN	-	500.000,00
78	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
79	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-06-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
80	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-07-01	CA Overbooking CA	5.000.000,00	-
81	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-07-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
82	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-07-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
83	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-07-30	HKP	-	5.000.000,00
84	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-08-05	ASW. C/A	-	5.000.000,00
85	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-08-12	RTGS#AS RTGS STP T:0369891:BRIRSS	-	1.387.800.000,00
86	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-08-19	AA	-	5.000.000,00
87	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-08-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
88	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-08-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
89	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-09-07	PT CJS	-	5.000.000,00
90	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-09-07	PT CJS	-	6.750.000,00
91	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-09-25	5198932170040948#100000603201#ATM #TRFHM TRF LINK FROM BPK JLN 021801003009301ATM 5198932170040948	-	7.425.000,00
92	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-09-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
93	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-09-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
94	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-10-07	0218058 1101 CA Cash Deposit	-	5.000.000,00
95	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-10-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00
96	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-10-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
97	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-11-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
98	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-11-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
99	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-12-23	NSR	-	5.000.000,00
100	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-12-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.440,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
101	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2020-12-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.440,00
102	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-01-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
103	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-01-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
104	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-02-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	16.988,00
105	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-02-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	16.988,00
106	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-03-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	15.344,00
107	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-03-26	DARI 021801001952401 KE 021801003009301	-	15.344,00
108	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-04-14	Dinas Penanaman Modal	-	5.000.000,00
109	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-04-14	Dinas Penanaman Modal	5.002.900,00	-
110	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-04-14	Dinas Penanaman Modal	22.357.900,00	-
111	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-04-15	20210414000698758210 REF.002180190100554 T.0372891:NEWBRINETSWEB	-	22.355.000,00
112	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-04-15	Dinas Penanaman Modal	22.357.900,00	-
113	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-04-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
114	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-05-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
115	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-06-08	Dinas Penanaman Modal	5.000.000,00	-
116	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-06-08	20210608000722319469 0021801901253541 RE T.0372891:NEWBRINETSWEB	-	5.000.000,00
117	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-06-09	Dinas Penanaman Modal	5.000.000,00	-

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
118	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-06-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
119	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-07-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
120	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-07-27	CV AZB	5.000.000,00	-
121	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-08-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
122	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-09-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
123	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-09-29	NBMB SAN TO DINAS PENANAMAN M ESB NBMB:0001500F:429749873994	-	5.000.000,00
124	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-10-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
125	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-11-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
126	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2021-12-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
127	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-01-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
128	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-02-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
129	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-03-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	9.968,00
130	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-04-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
131	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-05-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
132	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-06-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
133	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-07-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00

No.	No. Rekening	SKPD	Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
134	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-08-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
135	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-09-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
136	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-10-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
137	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-11-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	11.036,00
138	21801003009301	Dinas Penanaman Modal	2022-12-26	DARI 021801001950409 KE 021801003009301	-	10.680,00
Jumlah					89.719.830,80	1.645.490.499,00
Selisih (Kredit - Debet)						1.555.770.668,20

Salinan seperti ini
 hanya untuk Pemohon
 PIADC181

Data Piutang Jasa Medik RSUD BLUD TA 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial dari Radiologi RSUD Kab. Mamuju	Rp 1.458.457	Piutang TA 2021
2	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial dari Radiologi RSUD Kab. Mamuju bulan Februari s/d Juni 2022	Rp 6.775.000	
3	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial dari Radiologi RSUD Kab. Mamuju bulan Agustus s/d Oktober 2022	Rp 31.105.000	
4	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial dari Radiologi RS BHAYANGKARA POLDASULAWESI BARAT bulan Juni	Rp 950.000	
5	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial dari Radiologi RS BHAYANGKARA POLDASULAWESI BARAT bulan Juli s/d Agustus	Rp 8.715.000	
6	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial dari Radiologi RS BHAYANGKARA POLDASULAWESI BARAT bulan Agustus s/d Oktober	Rp 15.615.000	
7	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial Radiologi KLINIK HAYYAT MEDICAL & WELLNESS CENTRE bulan Agustus s/d Oktober	Rp 4.645.000	
8	Tagihan Pelayanan Rujukan Parsial Radiologi KLINIK HAYYAT MEDICAL & WELLNESS CENTRE bulan Januari s/d Agustus	Rp 4.575.000	
9	Tagihan Biaya perawatan pasien Jasa Raharja an MT	Rp 20.695.000	
10	Tagihan BPJS atas biaya perawatan pasien an MT	Rp 8.375.543	
11	Tagihan Biaya perawatan pasien Jasa Raharja an RR	Rp 1.193.000	
12	Tagihan Biaya Perawatan Pasien BPJS Ketenagakerjaan an. R	Rp 2.541.660	
NILAI PIUTANG		Rp 106.643.660	

Salinan Seperti Asli
Hanya Untuk Pemohon
PIADC181

PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT
REKAP PERSEDIAAN SKPD
TA. 2022

NO	SKPD	PERSEDIAAN															TOTAL PERSEDIAAN 2022
		BAHAN KIMIA	BAHAN BAKU	BAHAN BIBIT TANAMAN	BAHAN/BIBIT TERBUKA/BIBIT JALAN	BAHAN LAINNYA	ATK	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BERDA POS	ALAT/BAHAN UNTUK KESEHATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA	PERSEDIAAN DIUJUK/DIRAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERBUKA JAGA		
1	Badan Pengembangan Daerah	1	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	
3	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	29.053.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	146.802.040,00	0,00	187.407.040,00	
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.900,00	1.368.000,00	699.855.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.652.362,00	
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.500,00	
7	Badan Penghubung Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.000,00	
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
10	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.400,00	
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.740,00	
12	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	
13	Dinas Kependidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	
14	Dinas Kesehatan	324.072.350,00	7.784.848.398,00	0,00	0,00	0,00	7.494.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625.268,010,00	9.441.091.916,00	0,00	0,00	39.182.875.166,00	
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.151.200,00	1.051.671.200,00	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
17	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.530,00	
18	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.800,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.600,00	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402.517.738,69	0,00	6.403.489.338,69	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.000,00	
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.600,00	
22	Dinas Perikanan, Perindustrian, Koprasai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.240,00	
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.500,00	
24	Dinas Perencanaan, Perindustrian, Koprasai dan Usaha kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.992.000,00	0,00	174.453.500,00	
25	Dinas Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.900,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.900,00	
26	Dinas Pertumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
27	Dinas Perpusakaan dan Keairipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.800,00	264.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.800,00	
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.782.798,14	0,00	3.403.316.798,14	
29	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	
30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	373.000,00	0,00	0,00	23.936.000,00	5.900.000,00	4.151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.417.750,00	
31	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965.300,00	
32	Dinas Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.274.800,00	0,00	446.970.000,00	
33	Inspektoriat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.600,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.600,00	
34	Rumah Sakit Umum Daerah	420.121.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.603.280,00	
35	Stasiun Polisi Panting Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.200,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.200,00	
36	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.620,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.620,00	
37	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	
TOTAL		746.743.480,00	7.784.848.398,00	0,00	23.936.000,00	5.900.000,00	66.714.990,00	3.799.800,00	699.855.462,00	140.000,00	29.053.000,00	25.317.186.660,00	9.442.091.916,00	10.570.369.376,83	1.051.151.200,00	56.824.888.264,83	

Salinan
Untuk
Pihak
Dinas

Daftar Aset Lainnya - Aset Lain Lain Yang Sudah Diserahkan Namun Masih Tercatat di KIB OPD

No.	Jenis Aset	Tahun Pembelian	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	Perintisan Jalan Pantai Manding - Takatidung Kab. Polman	2008	410.584.000,00	Kabupaten Polewali Mandar
2	Perintisan Jalan Pantai Manding-Takatidung L 3 M (Lanjutan)	2009	99.500.000,00	
3	Pemb. Jalan Setapak Desa Nelayan Kenje Campalagian L 2 M	2009	124.591.000,00	
4	Pembuatan Jalan Setapak Dusun Babatua	2009	99.500.000,00	
5	Peningkatan Jalan Makam K.H Muh. Saleh DS. Pambusuang Kec. Balanipa Kab Polman	2009	99.500.000,00	
6	Peningkatan Jalan Kompleks makam To Salaman Ds Lampoko Kec. Campalagian	2009	94.791.000,00	
7	Peningkatan Jalan, Saluran, Plat Duiker Kel. pekkabata	2010	228.794.887,00	
8	Jalan Desa Gadde kec Tinambung	2010	102.615.020,00	
9	Peningkatan Jalan Desa Parappe kec campalagian	2010	96.666.323,00	
10	Peningkatan Jl Kerikil Desa Kence Kec. Campalagian	2010	91.175.218,00	
11	Pembangunan Jalan Setapak Desa Babatua Kab. Polman	2010	45.416.012,00	
12	Rehabilitasi Jalan dan Normalisasi Sungai Desa Papandangan Kab. Polman	2009	173.740.000,00	
13	Jalan desa Suruang Kec. Campalagian	2010	114.169.219,00	
14	Drainase Jalan Ds. Papandangan Kec. Anreapai	2009	97.761.000,00	
15	Pemb. Jalan Tani Desa Batu Panga Kec. Luyo	2008	156.407.000,00	
16	Perintisan Jalan Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman	2008	99.775.000,00	
17	Pemb. Jalan Setapak desa Lapeo Kec. Campalagian	2008	98.000.000,00	
18	Pembangunan Jalan Setapak Kel. Batu Panga Kec. Luyo	2009	99.500.000,00	
19	Perintisan Jalan Setapak Desa Kelapa 2 Kec Anreapi	2009	94.500.000,00	
20	Pengk. Jln Desa Limboro	2010	221.893.255,00	
21	Jalan Usaha Tani Watampnua	2010	172.123.254,00	
22	Peningkatan Jalan Tande-Galung	2010	271.867.386,00	
23	Pemb. Jalan Setapak Desa Nelayan Kel Mosso Sendana L 2 M	2009	29.943.000,00	Kabupaten Majene
24	Jalan Baru Ruas Kuburan Islam Tande	2008	360.000.000,00	
25	Pembangunan Jalan Setapak Galung Barat Kel. Banggae Rabat Beton	2009	59.890.000,00	
26	Peningkatan Jalan Azis Bustam	2010	186.354.368,00	
27	Pemb. Jalan Setapak TK Pembina Malunda (Rabat Beton) 20	2009	49.900.000,00	
28	Peningkatan Jalan Desa Tubo	2010	102.786.617,00	
29	Peningkatan Jalan Sirtu Dsn Passad Kec. Sendana	2010	223.846.029,00	
30	Plat Duiker Jalan Hapati Hasan	2009	66.417.250,00	Kabupaten Mamuju
31	Paving Block Kelurahan Rimuku	2010	129.326.957,00	
32	Jalan Usaha tani Dusun Ashan Kel. Kalukku	2010	102.706.538,00	
33	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Karama Kec. Tapalang	2010	45.644.808,00	
34	Pembuatan Jalan, Pagat Pintu Gerbang Pekuburan Islam Kec. Kalukku Ling. Kayu Mate Kab. Mamuju	2008	59.950.000,00	
35	Jl. Lingkar Bandara Tumpa Padang	2012	399.549.000,00	
36	Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan Ferry Simboro Mamuju	2013	1.850.797.000,00	
37	Pembangunan Jalan Wisata Sumare	2015	1.079.396.000,00	
38	Jalan Strategis Mamuju	2015	1.027.328.000,00	
39	DED Alterial Road to Support Belang-belang Internasional Port	2013	1.609.212.250,00	
40	Pembangunan Jalan Dusun Tambing-tambing Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju	2014	197.693.485,00	
41	Pembangunan Jalan Dusun Bungin Busa Desa Sandapang Kec. Kalumpang	2014	197.693.485,00	
42	Pembangunan Jalan Dusun Makollong Desa Sandapang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju	2014	197.642.442,00	
43	Pembangunan Jalan Dusun Sumua Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju	2014	197.578.898,00	
44	Pembangunan Jalan Dusun Rante Pata Desa Pulio Kab. Mamuju	2014	156.025.558,00	
45	Pembangunan Jalan Dusun Rante Dame Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju	2014	156.025.557,00	
46	Pembangunan Jalan Dusun Takari Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju	2014	145.608.575,00	
47	Pemb. Jalan Tani Desa Kasamba Kec. Tapalang Kab. Mamuju	2008	160.000.000,00	
48	Pengerasan Jalan Desa Kasambang Kec. Tapalang	2009	140.136.000,00	
49	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kakao Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju	2010	45.559.010,00	
50	Pembuatan Jalan Lingkungan Desa bela Kec. Tapalang	2009	99.500.000,00	
51	Pembuatan Jalan Lingkungan Desa Bela Kec. Tapalang	2009	75.000.000,00	
52	Jalan Baru Ruas Tamasapi - Kurungan Besi	2008	297.000.000,00	
53	Pemb. Jalan Status Ruas Takosang, Ds Kalonding Kab. Mamuju	2009	100.000.000,00	

No.	Jenis Aset	Tahun Pembelian	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
54	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kakao Lingk. Kalubibing Kel. mamuju Kab. MAMUJU	2010	45.644.808,00	Kabupaten Mamuju Tengah
55	Perencanaan Jln Teknik Ke Pelabuhan Feri	2011	64.395.000,00	
56	Pemb. Jalan Tani Desa Kadoangin Kab. Mamuju	2008	260.431.000,00	
57	Pengerasan Jalan Tani Usaha Dusun Patula Tengah ke dusun glean desa budong-budong	2010	45.644.808,00	
58	pembangunan Jalan Desa karama pangale	2010	45.644.808,00	
59	Pembangunan Jalan setapak desa nelayan sarudu L 2 M	2009	130.502.000,00	
60	Peningkatan Jalan lingk. Rawah Indah Kec. Tobadak	2010	183.723.213,00	
61	Peningkatan Jalan Tani Usaha di desa Kalia Kec. Karossa	2010	101.699.836,00	
62	Peningkatan Jalan Tani Usaha di desa Kalia Kec. Kalukku	2010	102.550.612,00	
63	Dusun Polongan Kec. Tobadak	2010	114.054.834,00	
64	Peningkatan Jalan desa Mora IV Kec. Tobadak	2009	79.920.000,00	
65	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kakao Tobadak IV	2010	45.644.808,00	
66	Pembangunan Jalan Desa Babana Kec. Budong-Budong	2009	228.900.000,00	
67	Peningkatan Jalan Ds. Bojo Kec. Budong-budong	2009	99.800.000,00	
68	Jalan Desa Bojo	2010	188.811.959,00	
69	Pemb. Jalan Setapak Desa Nelayan Babana-Budong2 L 2 M	2009	99.800.000,00	Kabupaten Mamasa
70	Pengerasan Jalan Tani Desa Bojo	2010	45.644.808,00	
71	Rekonstruksi Jalan Desa Longsor Desa Persiapan Saloan Kec. Pana Kab. Mamasa	2009	576.121.000,00	
72	Pembukaan Jalan ke Tabulahan	2009	189.000.000,00	
73	Peningkatan jalan ruas Salubatu - Mambi simpang Salubulung - Malaitiro Tondak Tua Kec. Tabulahan	2014	221.411.722,00	
74	Peningkatan Jalan Ruas Salutambung - Urekang simpang Maerang - Salubulung Kec. Mambi	2014	221.401.747,00	
75	Peningkatan Jalan Ruas Aralle - Mambi Simpang Sondong Layu	2014	221.399.531,00	
76	kontruksi jalan	2007	4.577.910.000,00	
77	kontruksi jalan	2007	1.836.625.575,00	
78	kontruksi jalan	2007	531.882.900,00	
79	Pemb. Jalan Tani Mamasa-Simbuang	2008	281.745.000,00	
80	Pembangunan Jalan Usaha Tani Mamasa-Simbuang L 3 M (Lanjutan)	2009	99.900.000,00	
81	Pembangunan Jlan Usaha Tani Mamasa-Simbuang	2010	45.644.808,00	
82	Perintisan Jalan Setapak di Balla-Bulo	2009	135.070.000,00	Kabupaten Pasangkayu
83	Pembangunan Jalan dan Plat Duiker desa nelayan sarudu	2010	45.664.808,00	
84	Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Tangan Kel Pasangkayu (sirtu) L 3 M	2009	99.788.000,00	
85	Pembangunan Jalan desa sarjo	2010	102.279.418,00	
86	Pembangunan Jalan Lingkungan Matra	2010	321.601.421,00	
87	Rekontruksi Jalan Desa Sarudu	2009	417.739.000,00	
88	Pembuatan Jalan, Bagar, Pintu Gerbang pekuburan di Desa Sarudu Kec Sarudu Kab. Matra	2008	79.493.000,00	
89	Jalan desa Kira	2010	147.813.676,00	
90	Pembangunan Jalan Tani Panura Kec. Pana	2008	177.121.000,00	
91	Pemeliharaan Ruas Takosang	2008	100.000.000,00	Kabupaten Mamasa
92	Peningkatan Usaha Tani Dusun Manakarra	2010	102.615.020,00	
93	Peningkatan Jalan Usaha Tani Nelayan Tambak Dusun Tumuki Desa Bambu	2010	45.644.808,00	
94	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Panggaloang	2010	45.644.808,00	
95	Perintisan Jalan Pantai Kerikil	2010	43.145.211,00	
96	Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar (5 Lokasi)	2009	349.858.000,00	
97	Perintisan Jalan Setapak di Randang Buntu Bunda	2009	127.662.000,00	
98	Pembangunan Jalan Usaha Tani Padang Loang	2009	94.800.000,00	
99	Pembuatan jalan setapak dsn mallawa ds tapandullu kec. tapalang barat	2009	29.939.700,00	
100	Jalan Desa Salubune	2010	437.572.410,00	
101	Jlan Dsn Dangannia	2010	227.728.697,00	
102	Pematangan Lahan Kawasan Penampungan Pekerja Migran Indonesia di Polewali Mandar	2021	1.552.519.861,82	Reklas dari KIB C yang diserahkan
103	Pengawasan Pematangan Lahan Kawasan Penampungan Pekerja Migran Indonesia di Polewali Mandar	2021	49.923.500,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan
104	Pematangan Lahan Persiapan Sekolah MAN Insan Cendikia	2021	456.850.300,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan
105	Perencanaan pematangan lahan persiapan sekolah MAN Insan Cendekiah	2021	19.860.280,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan

No.	Jenis Aset	Tahun Pembelian	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
106	Pengawasan Pematangan Lahan Persiapan Sekolah MAN Insan Cendikia	2021	17.498.800,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan
107	Pembangunan Jalan Akses STAIN Majene	2021	837.955.000,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan ke kab majene
108	Perencanaan Pembangunan Jalan Akses STAIN Majene	2021	34.881.000,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan ke kab majene
109	Pengawasan Pembangunan Jalan Akses STAIN Majene	2021	29.727.500,00	Reklas dari KIB C yang diserahkan ke kab majene
110	Dinas Perhubungan	19/11/2018	187.675.000	Pekerjaan Pembuatan Partisi Ruangan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Selopo
111	Pembangunan RKB SMKS Darul Khasanah		196.400.000,00	
112	Pembangunan Pagar SMA PGRI Tammerodo		195.520.000,00	
113	Penataan Halaman SLB Ulumanda		107.770.000,00	
114	Pembangunan Pagar SMA PGRI Binanga Mamuju		197.056.000,00	
115	Pembangunan Pagar Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Kab. Polman		196.581.000,00	
116	Pembangunan Pagar SMK Islam Poniang		196.720.000,00	
117	Pembangunan RKB Madrasah Aliyah Nur Maarif		196.670.000,00	
118	Pembangunan Pagar SMK Pelayaran Mamuju		203.770.000,00	
119	Penataan Jalan Sekolah SMK Keperawatan Mamuju		174.710.000,00	
120	Pembangunan Rumah Kebudayaan Adat Besoangin		241.640.000,00	
121	Perencanaan Lariang		12.000.000,00	
122	Laboratorium Agro Bisnis Tanaman Perkebunan (ATP) SMK Y Majene		7.900.000,00	
123	Pengadaan Buku Agenda Kerja		60.000.000,00	
124	Pengadaan Buku Cerpen		149.850.000,00	
125	Pengadaan Buku "Jejak Dua Lelaki dalam Perjuangan Pembentukan Sulawesi Barat		199.950.000,00	
126	Pengadaan Buku "Ma'mun Hasanuddin dimata keluarga dan teman seperjuangan		199.950.000,00	
127	Penerbitan Buku "Sibali Parri Gender Masyarakat Mandar		99.992.500,00	
128	Penerbitan buku " Barasanji dalam Bahasa Mandar		99.813.750,00	
129	Penerbitan Buku " Saiyyang Patunndug di Mandar Sulawesi barat		99.640.500,00	
130	Penerbitan buku Cerita rakyat		149.850.000,00	
131	Penerbitan Buku " Esai Foto Event Seni Budaya Tana Lotong		99.850.000,00	
132	Penerbitan Buku Ontologi Ruisi		149.850.000,00	
133	Pengadaan Booklet "Potret Kebudayaan Sulbar		74.705.400,00	
134	Percetakan Buku " Benteng Kayu Mangiwang		199.825.000,00	
135	Pengadaan Alat Musik dan Sound System Klp pemuda perdana Gratindo		99.400.000,00	
136	Pengadaan Kelengkapan dan Properti marching Band Gita Swara Malaqbi		29.600.000,00	
137	Pengadaan Marching Band Gita Swara Malabi		199.709.900,00	
138	Pengadaan Film Pendek " Sejarah Tanah Mandar		99.740.000,00	
139	Pengadaan Film Dokumenter " Event Seni Budaya Tana Lotong		139.950.000,00	
140	Pembuatan Recycle Album Mandar Lawas		199.850.000,00	
141	Pengadaan Film Dokumenter " Pendidikan itu Penting		149.825.000,00	
142	Pengadaan Film Kebudayaan Bermuatan Lokal "PEPUTIQ CINA		198.500.000,00	
143	Pengadaan buku Braille untuk SLB Benteng Kab. Mateng + SLB Almunawarah Kab. Majene + SLB Polewali		131.996.000,00	
144	Pengadaan Buku Bacaan SLB		99.833.333,00	
	Jumlah		34.501.725.779,82	

**DAFTAR UTANG PAJAK PFK
PER 31 DESEMBER 2022**

Lampiran 13

NO	NAMA SKPD	2021	2022	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp 3.899.846	Rp 683.992.956	Rp 687.892.802
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Rp 914.275	Rp 914.275
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp -	Rp 26.005.611	Rp 26.005.611
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp -	Rp 159.068	Rp 159.068
5	DINAS KOPERASI DAN UKM		Rp 1.126.126	Rp 1.126.126
6	DINAS TRANSMIGRASI	Rp 11.804.178	Rp 1.132.072	Rp 1.132.072
7	RUMAH SAKIT DAERAH	Rp -	Rp 195.575.747	Rp 207.379.925
JUMLAH		Rp 15.704.024	Rp 908.905.855	Rp 924.609.879

Salinan seperti ini
dikirimkan kepada Pemohon
untuk PIADC181

DAFTAR UTANG BEBAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA SKPD	Belanja Pegawai			PLN			Belanja Bagi Hasil			PDAM	
		2021	2022	Jumlah	2021	2022	Jumlah	2021	2022	Jumlah	Jumlah	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		6.755.798.820,00	6.755.798.820,00			-			-	-	
2	DINAS KESEHATAN				62.994.838,00		62.994.838,00			-	1.931.394,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				11.721.658,00		11.721.658,00			-	-	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			-			-			-	-	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PK			-			-			-	87.500,00	
6	BADAN PENGUJILANGAN BENCANA DAERAH			-		5.168.524,00	5.168.524,00			-	-	
7	DINAS SOSIAL		8.863.213,00	8.863.213,00		4.268.816,00	4.268.816,00			-	-	
8	DINAS TENAGA KERJA		-	-		8.271.032,00	8.271.032,00			-	85.000,00	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA			-			-			-	-	
10	DINAS KETAHANAN PANGAN			-			-			-	-	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			-	7.338.930,00		7.338.930,00			-	-	
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-			-			-	-	
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			-	5.342.726,00		5.342.726,00			-	-	
14	DINAS PERHUBUNGAN	6.213.834,00	9.453.863,00	15.667.697,00			-			-	-	
15	DINAS KONTRINO	-			12.668.297,00		12.668.297,00			-	-	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN LITSP		3.921.312,00	3.921.312,00		9.987.542,00	9.987.542,00			-	-	
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN OLARAHAGA		2.517.809,00	2.517.809,00	6.986.172,00		6.986.172,00			-	-	
18	DINAS PERKUSTAKAN DAN KEMASIPAN		-	-	17.601.126,00		17.601.126,00			-	-	
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		8.416.907,00	8.416.907,00	4.695.801,00		4.695.801,00			-	-	
20	DINAS PARIWISATA		5.597.560,00	5.597.560,00	10.548.679,00		10.548.679,00			-	-	
21	DINAS PERKEHUTAN		11.403.606,00	11.403.606,00	7.243.000,00		7.243.000,00			-	-	
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & TERNAK		-	-	18.803.846,00		18.803.846,00			-	-	
23	DINAS KEHUTANAN			-			-			-	-	
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		30.063.544,00	30.063.544,00	8.952.568,00		8.952.568,00			-	-	
25	DINAS KOOPERASI DAN UKM	646.219,00		646.219,00	2.246.380,00		2.246.380,00			-	-	
26	DINAS TRANSMIGRASI			-	6.394.219,00		6.394.219,00			-	-	
27	BENDAHARA SEKRETARIAT	45.950.050,00		135.750.050,00	3.996.896,00		3.996.896,00			-	-	
28	INSPEKTORAT DAERAH			-	190.361.250,00		190.361.250,00			-	3.680.800,00	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.520.017,00	1.520.017,00	1.391.782,00		1.391.782,00			-	-	
30	BADAN PENGUJILAN KEUANGAN & PEND. DAERAH				11.495.025,00		11.495.025,00			-	-	
31	BADAN KEPENGAWAHAN DAERAH	14.678.140,00	857.428.544,00	872.106.684,00	28.424.719,00		28.424.719,00		12.818.841.302,00	12.818.841.302,00	346.000,00	
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			-			-			-	-	
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		48.597.822,00	2.830.782,00			-			-	-	
34	SEKRETARIAT DPRD	3.600.990,00	9.372.846,00	12.973.836,00			-			-	-	
35	BADAN PENGUJILAN PROVINSI			-	48.726.923,00		48.726.923,00			-	4.003.990,00	
36	BADAN KESIBANG DAN POLITIK			-			-			-	-	
37	RUMAH SAKIT DAERAH		333.859.390,00	333.859.390,00			-			-	-	
38	RUMAH SAKIT DAERAH (BLUD)			-			-			-	-	
Jumlah Utang Beban		24.686.284,00	8.058.827.283,00	8.081.495.544,00	-	509.717.817,00	509.717.817,00	12.818.841.302,00	12.818.841.302,00	-	10.134.684,00	
											10.134.684,00	

NO	NAMA SKPD	Tetap/Indhome		Barang & Jasa		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
2	DINAS KESEHATAN		-	-	-	6.755.798.820,00	6.755.798.820,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					64.926.232,00	64.926.232,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			185.000.000,00		11.721.658,00	196.721.658,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PK		657.400,00		528.990.000,00	-	528.990.000,00
6	BADAN PENGUJILANGAN BENCANA					-	5.913.434,00
7	DINAS SOSIAL	1.204.080,00	1.204.080,00	-	-	5.486.896,00	5.486.896,00
8	DINAS TENAGA KERJA	2.194.500,00	2.194.500,00	-	-	14.738.488,00	14.738.488,00
9	DINAS PEMERDAYAAN PERUMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA					-	10.550.632,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN			-	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			-	-	-	7.338.930,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-			7.338.930,00
13	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	474.250,00				-	-
14	DINAS PERLUBRIKAN				72.000.000,00		
15	DINAS KONTRIFO			-		5.816.976,00	5.816.976,00
16	DINAS PENANAMAN MODUL DAN LTPS	568.600,00	568.600,00	-	-	94.122.160,00	94.122.160,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN OLARAHAGA	1.925.830,00	1.925.830,00			9.987.542,00	9.987.542,00
18	DINAS PERKUS TAKAN DAN KEASIPAN					11.476.084,00	11.476.084,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	516.150,00	516.150,00	-	-	22.044.785,00	22.044.785,00
20	DINAS PARIWISATA					4.695.801,00	4.695.801,00
21	DINAS PERREBUHAN	696.252,00	696.252,00	-	-	19.481.736,00	19.481.736,00
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & TERNAK			-	-	12.840.560,00	12.840.560,00
23	DINAS KEHUTANAN					20.297.541,00	20.297.541,00
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			-	-	18.803.846,00	18.803.846,00
25	DINAS KOPERASI DAN UKM			-	-	8.952.568,00	8.952.568,00
26	DINAS TRANSMIGRASI	4.696.700,00	4.696.700,00	-		32.309.924,00	32.309.924,00
27	BENDAHARA SEKRETARIAT	8.270.911,00	8.270.911,00	-		6.646.219,00	6.646.219,00
28	INSPEKTORAT DAERAH			-	-	5.617.596,00	5.617.596,00
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-	-	218.063.011,00	218.063.011,00
30	BADAN PENGUJILAN KEUANGAN & PEND. DAERAH	74.764.000,00	74.764.000,00	-	-	1.391.782,00	1.391.782,00
31	BADAN KEPERAWATAN DAERAH					-	13.015.042,00
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			82.634.810,00		89.442.140,00	13.712.911.375,00
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			-	-	-	-
34	SEKRETARIAT DPRD	5.929.174,00	5.929.174,00	-	-	2.859.782,00	2.859.782,00
35	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	1.800.450,00	1.800.450,00	-	-	5.927.174,00	5.927.174,00
36	BADAN KESABANG DAN POLITIK			-	-	3.130.090,00	3.130.090,00
37	RUMAH SAKIT DAERAH			-	-	76.123.209,00	76.123.209,00
38	RUMAH SAKIT DAERAH (BLUD)			-	-	-	-
Jumlah		74.764.000,00	45.964.127,00	120.710.127,00	200.106.500,00	3.446.995.341,00	3.446.995.341,00

Daftar Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022

Lampiran 15

(dalam rupiah)

NO	OPD	PELASMA	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
1	DINAS PERKEBUHAN	1	CV. BINTANG LIMA	Pelaksanaan pembangunan gedung dan bantai jenjur kelas 2 untuk kelurahan Sukra Mulyajaya	62.708.227,00	-	-	-	-	-	-	62.708.227,00
				SUB TOTAL 1	62.708.227,00	-	-	-	-	-	-	62.708.227,00
2	DINAS KOPERINDAG	1	CV. CENTRAL BINA RENCAHA	Jasa Konsultansi	6.990.000,00	-	-	-	-	-	-	6.990.000,00
				SUBTOTAL 2	6.990.000,00	-	-	-	-	-	-	6.990.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	UP2M UNHAS	Pengawasan Teknik Di 1 Tandang dan Di 1 Laseq (2014)	163.515.000,00	-	-	-	-	-	-	163.515.000,00
		2	CV. BATERA KONSTRUKSI	Rehabilitasi Jalan Rusak Lombongan - Piring Kab. Majene (T.A. 2015)	-	45.982.100,00	-	-	-	-	-	45.982.100,00
		3	CV. MUSAUFARH	Refensi Pembangunan Teras Jalan Poros Mantohakabab Di Bantabang Budai Kec. Bontolalelani Timur Kab. Mamasa (T.A. 2015)	-	8.983.000,00	-	-	-	-	-	8.983.000,00
		4	PT. AYINDA PUTRI MANDIRI	Pengadilan jalan ruas Salakembung Unkeang	-	-	408.580.074,00	-	-	-	-	408.580.074,00
		5	CV. SUMBER REZEKI	Pematangan Lahan Pemprov. Di Jalan Ateri Rengas Kab. Marau T.A. 2021	-	-	-	-	-	25.075.657,00	-	25.075.657,00
		6	CV. SUMBER REZEKI	Pematangan Lahan Pemprov. Di Jalan Ateri Rengas Kab. Marau T.A. 2021	-	-	-	-	-	-	87.711.479,00	87.711.479,00
		7	CV. ALAH CONSULTINDO	Pencanangan Pembangunan Gedung Tambahan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	6.999.980,00	6.999.980,00
		8	CV. SENUA TIMAR INDONESIA	Pembangunan Gedung Tambahan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	67.765.332,00	67.765.332,00
		9	CV. MTH	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Meas OPPO Sulawesi Barat di Jakarta	-	-	-	-	-	-	72.998.440,00	72.998.440,00
		10	CV. SWADAYA MAS ENGINEERING	Pengadilan Jalan Rusak Au. - Taurang Kab. Pangajene Mamuju	-	-	-	-	-	-	338.743.650,00	338.743.650,00
		11	CV. BULUE STRUKTUR MADANI	Pengadilan Jalan Rusak Kespri - Mantari Kab. Mamasa	-	-	-	-	-	-	246.805.000,00	246.805.000,00
			CV. DAYA KONSTRUKSI NUSANTARA	Pembangunan Jembatan Desa Bukit Duri Kusa Jalan Taurang - Nusu Kab. Mamasa	-	-	-	-	-	-	986.083.540,00	986.083.540,00
		12	CV. MALIN KARYA PERSADA	Pembangunan Jembatan Desa Pas-Pas Rusak Jalan Au. - Taurang Kab. Pitali Mandar	-	-	-	-	-	-	54.965.232,00	54.965.232,00
				SUBTOTAL 3	163.515.000,00	54.985.100,00	-	408.580.074,00	-	25.075.657,00	1.472.032.653,00	2.124.188.464,00
4	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	1	CV. WAHANA PLANNING	Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah 1 Buntang	-	9.990.000,00	-	-	-	-	-	9.990.000,00
		2	CV ALFAN KONSULTAN	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Green House SIKUN Taur	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
		3	CV. ARC BUILDING GREEN CONSULTAN	Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah 2 Tolebek	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
		4	CV. RILIMA KONSULTAN	Pengawasan Perencanaan Hutan Suk 1 Lumbanda dan Pagar Sekolah SMA 1 Buntal	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00
				TOTAL	233.173.227,00	44.975.000,00	-	408.580.074,00	-	25.075.657,00	1.472.032.653,00	44.990.000,00
				SUBTOTAL 4	-	99.995.100,00	-	-	-	-	-	2.238.615.711,00

Salinan Seperti Asli
Untuk Pemohon PIADC181
Formasi